

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai sarana informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

##### **1. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

##### **2. Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas.

##### **3. Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

##### **4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan dampak generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

##### **5. Evaluasi Kinerja**

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### **1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Informasi yang disajikan mencakup:

1. Penyediaan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Penyediaan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Penyediaan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Penyediaan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Penyediaan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Penyediaan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
7. Penyediaan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

### **1.1.3. Komponen Laporan Keuangan**

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/defisit-LRA;
- e. Pembiayaan;
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

## **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **3. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. Piutang pajak dan bukan pajak;
- d. Persediaan;
- e. Investasi jangka panjang;
- f. Aset tetap;
- g. Kewajiban jangka pendek;
- h. Kewajiban jangka panjang;
- i. Ekuitas.

#### **4. Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Laporan Operasional (LO) menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

b. Beban dari Kegiatan Operasional

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

e. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian yang tidak diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **5. Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

## 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan.
- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

## 7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

### 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan terlebih dahulu melakukan konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang petunjuk teknisnya

ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Konversi dilakukan dengan mengacu kepada Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 3/126/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 13 Seri A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 13/351/2019);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 7/163/2020);
31. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 69 Seri A);
32. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 43 Seri A).
33. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 84 tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
34. Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 188.45/Kep.446-BPKD/2020 tentang Penambahan Kodefikasi Barang pada Sub Rincian Obyek dalam Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

**Bab IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

**Bab V Penjelasan Pos-PoS Laporan Keuangan**

- 5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan
  - 5.1.1 Pendapatan – LRA
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Transfer
  - 5.1.4 Pembiayaan
  - 5.1.5 Pendapatan – LO
  - 5.1.6 Beban
  - 5.1.7 Aset
  - 5.1.8 Kewajiban
  - 5.1.9 Ekuitas
- 5.2 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada Pemerintah Daerah

**Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

**Bab VII Penutup**

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 merupakan tahun pertama penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat yang disusun berdasarkan visi **“Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia”**.

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Bandung Barat, adalah sebagai berikut:

1. Aspiratif; Pemerintah Bandung Barat yang aspiratif akan selalu mendengarkan dan menghargai harapan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan masyarakat sehingga kemudian pemerintahan dijalankan dengan berpihak pada kebutuhan dan suara masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan suaranya secara langsung, dan juga dapat melalui perwakilannya di DPRD maupun lembaga lainnya seperti lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan.
2. Kreatif; penyelenggaraan pemerintahan di Bandung Barat dilaksanakan dengan terobosan dan menggunakan gagasan yang *out of the box* dan orisinil dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat melalui pembangunan yang ramah lingkungan serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.
3. Unggul; Bandung Barat harus diarahkan agar memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki kelebihan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bandung Barat sarana prasarana dibangun dengan kualitas baik, SDM pengelola yang berkualitas, pelayanan yang diberikan dengan kualitas terbaik, dan produk yang dihasilkan unggul secara kualitas dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional.
4. Religius; masyarakat Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki dan terikat dengan nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama. Nilai, norma dan semangat keagamaan ini harus senantiasa menjawab, mewarnai dan menjadi ruh atau jiwa bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk pembinaan sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan. Kehidupan bermasyarakat di Bandung Barat dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama, serta ber-Bhineka Tunggal Ika.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan di atas, dirumuskan 4 (empat) Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi.

Pencapaian rencana kinerja Pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi yang secara umum telah diakui dan diberlakukan. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Indikator pencapaian pembangunan ekonomi yang secara umum diakui adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita dan Tingkat Inflasi.

## 2.1. Ekonomi Makro

Salah satu indikator kinerja Pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi yang secara umum telah diakui dan diberlakukan. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Indikator pencapaian pembangunan ekonomi yang secara umum diakui adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Inflasi. Besaran kontribusi perekonomian di Kabupaten Bandung Barat masih tetap dipengaruhi oleh sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian.

### 2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 secara ril ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan Tahun 2000, yang mengalami penurunan sebesar (2,41%). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Tahun 2019 mencapai 5,05%.

**Gambar 2.1. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020 (%)**



*Sumber: Data Makro BPS Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021*

Penurunan perekonomian Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 sebesar (2,41)% relatif sama dengan nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang mencapai (2,44)%.

Penurunan ekonomi ini disebabkan oleh merosotnya laju perekonomian pada setiap kelompok sektor. Kelompok sektor primer mengalami penurunan sebesar (2,10)%, sekunder sebesar (2,56)% dan tersier sebesar (2,33)%. Kelompok sektor primer merupakan kelompok sektor yang memiliki penurunan terkecil pada tahun ini.

**Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 – 2020 (%)**

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[4]
<b>I. Primer</b>	1,42	2,64	2,43	-2,10
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,39	2,66	2,77	-2,10
2. Pertambangan dan Penggalian	1,74	2,40	-1,29	-2,18
<b>II. Sekunder</b>	5,75	6,53	5,99	-2,56
3. Industri	5,99	6,62	5,79	-1,98
4. Listrik, Gas dan Air	2,9	3,61	3,16	-2,46
5. Bangunan	4,76	6,35	7,38	-5,71
<b>III. Tersier</b>	5,98	5,25	4,78	-2,33
6. Perdagangan/Hotel/Restoran	5,6	4,72	4,51	-7,20
7. Pengangkutan/Telekomunikasi	6,97	6,26	5,71	6,44
8. Keuangan/Real estate/jasa Perusahaan	6,38	8,25	7,09	-1,37
9. Jasa-jasa	5,82	4,39	3,63	0,64
<b>PDRB</b>	<b>5,21</b>	<b>5,50</b>	<b>5,05</b>	<b>-2,41</b>

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Tahun 2021

Tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor cukup bervariatif (Tabel 2.1). Variasi tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut dapat kita bagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama: LPE merosot sebesar (2,10)% ditunjukkan oleh sektor pertanian dan pertambangan/penggalian merosot sebesar (2,18)%..
2. Kelompok kedua: LPE merosot berkisar antara (1,98)% – (7,20)% ditunjukkan oleh sektor industri, listrik, gas dan air, perdagangan/hotel/restoran, pengangkutan dan telekomunikasi, serta jasa-jasa.
3. Kelompok ketiga: LPE sebesar (5,71)% ditunjukkan oleh sektor bangunan/konstruksi dan keuangan/*real estate/jasa perusahaan*.

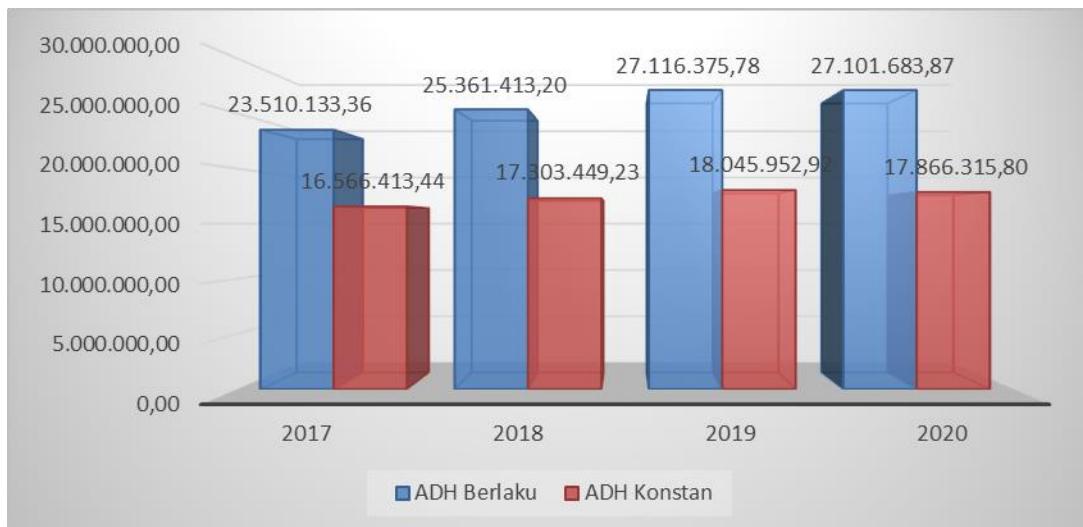
Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat secara umum cukup menunjukkan perkembangan yang relatif baik, meski masih banyak potensi ekonomi yang belum dikembangkan secara optimal. Arah dan gerak pembangunan daerah harus tetap fokus dan terarah, pembangunan tidak hanya semata-mata mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja, namun aspek pemerataan menjadi salah satu target pembangunan yang penting.

### 2.1.2. PDRB per Kapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *Percapita Income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan

dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) serta transfer masuk (*transfer in*) yang merupakan komponen penghitungan pendapatan regional, belum dapat dihitung maka dalam penghitungan pendapatan per kapita menggunakan PDRB perkapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

**Gambar 2.2. PDRB Per Kapita Kabupaten Bandung Barat  
Tahun 2017-2020\* (Juta Rupiah)**



Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Tahun 2021

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal. PDRB per kapita atas dasar berlaku selama kurun waktu Tahun 2017-2020 menunjukkan penurunan yang cukup berarti. PDRB per kapita/tahun atas dasar berlaku Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 sebesar Rp23.510.133,36,00; Tahun 2018 sebesar Rp25.361.413,20; Tahun 2019 mencapai Rp27.116.375,78 dan pada Tahun 2020 sebesar Rp27.101.683,87.

Penurunan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Tahun 2020 mencapai (0,05)% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB per kapita atas dasar berlaku tidak menggambarkan peningkatan secara riil, tetapi lebih disebabkan adanya pengaruh kenaikan harga atau tingkat inflasi yang terjadi di wilayah tersebut.

Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan Tahun 2000 yang menggambarkan nilai tambah riil penduduk Kabupaten Bandung Barat di Tahun 2017 adalah sebesar Rp16.566.413,44,00; PDRB per kapita Tahun 2018 sebesar Rp17.303.449,23; Tahun 2019 mencapai Rp18.045.952,92 dan pada Tahun 2020 sebesar Rp17.866.315,80. Pada Tahun 2020 PDRB per kapita atas dasar harga konstan Tahun 2000 menurun sebesar (1,00)% dibandingkan tahun sebelumnya.

### 2.1.3. Tingkat Inflasi

Perubahan harga dapat diukur dengan menggunakan perubahan indeks harga, seperti indeks harga konsumen (IHK), indeks harga perdagangan besar (IHPB), dan indeks harga implisit. Secara makro, inflasi dalam konteks ini adalah menunjukkan perubahan indeks implisit di

Kabupaten Bandung Barat. Pada Tahun 2020 inflasi mencapai 0,95%; lebih rendah bila dibandingkan Tahun 2019 yang mencapai sebesar 2,52%.

**Tabel 2.2. Laju Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017-2020**

URAIAN	2017	2018	2019	2020
	[1]	[2]	[3] ]	[5]
a. PDRB atas dasar harga berlaku (Miliar Rp)	40.204,39	43.807,70	47.180,08	46.478,90
b. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (Miliar Rp)	28.330,02	29.888,88	31.398,35	30.640,41
c. Indeks Harga Implisit	141,91	146,57	150,26	151,69
d. Laju Inflasi (persen)	3,15	3,28	2,52	0,95

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020, telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Nomor: [910/MOU.40-Keu/2019](#) [910/MOU.03-PUU/DPRD 2019](#) tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Nomor: [903/MOU.05-Keu/2020](#) [903/MOU.02-PUU/DPRD 2020](#) tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBD.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

### 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat potensi kenaikan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah. Potensi kenaikan pendapatan tersebut karena terdapat Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Bawah Tanah yang dipungut oleh daerah secara langsung. Untuk tahun 2020 perolehan Pendapatan Daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Peningkatan pelayanan publik melalui perizinan terpadu satu pintu melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan pengelolaan aset-aset daerah yang dapat menghasilkan potensi pendapatan bagi daerah.
3. Peningkatan kesadaran dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah.
4. Menggali potensi pajak dan retribusi daerah secara optimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Mengoptimalkan potensi pendapatan dari BUMD (PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat) sebagai badan usaha yang dapat menghasilkan profit bagi pemerintah daerah.
6. Dalam rangka meningkatkan perolehan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan yang diambil adalah:
7. Meningkatkan akurasi data potensi daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
8. Meningkatkan akuntabilitas dan pelaporan penggunaan Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK).
9. Meningkatkan penyerapan penggunaan DAK sesuai peruntukannya. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dan evaluasi dana perimbangan.

Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merencanakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

## **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

- a. Pajak hotel dan restoran masih merupakan salah satu sumber PAD, karena Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu tujuan wisata, baik lokal, regional maupun nasional, di mana target PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, asumsi pertumbuhan ekonomi, obyek penerimaan dan rinciannya. Lembang dan sekitarnya sebagai salah satu lokasi yang mempunyai potensi wisata cukup besar, akan terus dikembangkan, selain potensi wisata di lokasi lainnya.

Selain dari objek pajak tersebut di atas, dengan melibatkan OPD pengelola, PAD juga didapatkan dari retribusi daerah yang diantaranya terdiri dari: Parkir, Terminal, HO, IMB, Pasar, Perdagangan, Industri, Sampah dan lain-lain. Salah satu penyumbang kontribusi yang cukup besar bagi PAD Kabupaten Bandung Barat adalah Pajak Penerangan Jalan dari pemakai listrik industri.

- b. Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam rangka peningkatan PAD diantaranya adalah: penyederhanaan sistem serta prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, melakukan sosialisasi peraturan yang dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas

- pemungutan untuk terciptanya efektifitas serta efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- c. Mengoptimalkan potensi pendapatan dari BUMD (PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat) sebagai badan usaha yang dapat menghasilkan profit bagi pemerintah daerah.

## **2. Dana Perimbangan**

### a. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan salah satu sumber PAD yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007. Alokasi DAU yang diterima oleh Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.022.493.222.000,00. Namun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk sementara DAU untuk tahun perencanaan masih menggunakan alokasi DAU tahun sebelumnya.

### b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan salah satu sumber PAD yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah. Pemanfaatannya sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian terkait sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Alokasi DAK untuk tahun 2020 belum dicantumkan di dalam dokumen rancangan KUA ini, karena saat penyusunan dokumen ini belum diperoleh informasi kepastian alokasi DAK untuk Kabupaten Bandung Barat. DAK akan menambah belanja langsung SKPD sesuai dengan peruntukannya.

### c. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Besarnya dana bagi hasil pajak tergantung pada peningkatan masing-masing komponen pajak yang mempengaruhinya. Semakin besar pajak yang disetor ke kas negara, maka semakin besar pula bagi hasil pajak yang diterima oleh Kabupaten Bandung Barat. Dana bagi hasil pajak diantaranya adalah PBB dan BPHTB. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010, PBB mulai diserahkan ke daerah terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015, sedangkan BPHTB telah berlaku efektif 1 Januari 2011 menjadi pajak daerah dan dimasukan dalam komponen PAD. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk:

- 1) Mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum dari sumber DAU.
- 2) Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, perikanan, sarana pemerintahan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari sumber DAK.
- 3) Mendanai pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jaringan jalan, jembatan dan irigasi.

- 4) Mendanai perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Mendanai pembangunan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jenis pendapatan ini dipengaruhi oleh penghasilan/pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena Kabupaten Bandung Barat akan diberikan dana bantuan keuangan dan bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Barat. Bagi hasil pajak dari Provinsi itu antara lain, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan bahan bakar kendaraan bermotor.

Target Pendapatan Daerah/Target penerimaan PAD pada Tahun 2020 Kabupaten Bandung Barat diperkirakan naik dari tahun sebelumnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten Bandung Barat dapat memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selain dari jenis pajak di atas, daerah dilarang memungut jenis pajak lainnya. Namun demikian sebelas jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan untuk retribusi daerah, dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) objek retribusi yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

## 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2020 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan

memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD dipergunakan untuk:

1. Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan Urusan Wajib dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan penyelenggaraan Urusan Pilihan dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban daerah disesuaikan potensi daerah dan wilayah.
3. Peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi, dan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
5. Menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan untuk peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari jenis belanjanya, secara garis besar belanja daerah terbagi menjadi dua yaitu: Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tak Langsung (BTL).

**Belanja langsung** adalah: belanja yang timbul sebagai konsekuensi adanya program atau kegiatan pembangunan yang dibutuhkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, dalam hal ini belanja berbanding lurus dengan jenis dan jumlah kegiatan.

**Belanja tidak langsung** adalah: belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, artinya belanja ini merupakan belanja kebutuhan minimal untuk operasional pemerintahan. Belanja Tidak Langsung diproyeksikan melalui pertimbangan pemenuhan belanja tetap dan mengikat (*fixed cost*) seperti gaji pegawai, bantuan bagi percepatan infrastruktur desa, bantuan Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan yang sifatnya tidak mengikat serta tidak terus menerus.

Belanja Langsung merupakan proporsi usulan dari Renja OPD dan Musrenbang Kecamatan/kewilayahan, yang didasari oleh isu strategis daerah dan prioritas program pembangunan. Kebutuhan anggaran belanja langsung diperhitungkan secara efisien berdasarkan pada kebutuhan anggaran belanja menurut bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan sektor lainnya. Namun Belanja langsung ini belum termasuk DAK Tahun 2020 karena alokasi DAK untuk Kabupaten Bandung Barat baru akan diketahui pada triwulan keempat.

## **1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merencanakan penggunaan Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- 1) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas, dan ke empat belas PNSD dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), Kabupaten Bandung Barat mengalokasikan dalam APBD sesuai dengan jumlah CPNSD dan formasi pegawai Tahun 2019.
- 4) Dalam merencanakan belanja pegawai telah diperhitungkan "*accres*" gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi.
- 5) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengangkat pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap dianggarkan dalam program dan kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- 6) Pemberian honorarium bagi PNSD dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Bupati Bandung Barat tentang standar biaya belanja dan standar satuan harga barang jasa.

b. Belanja Hibah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah berupa uang yang diberikan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dengan rincian objek belanja hibah adalah pemerintah, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Nasional, Badan Usaha Milik Daerah daerah, dan/atau Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Nasional.

c. Bantuan Sosial

Dalam Pasal 23A Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dijelaskan bahwa bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga, terdiri dari: bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan.

Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat, penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. Sedangkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa digunakan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah.

e. Belanja Bagi Hasil Desa

Belanja bagi hasil bagi Pemerintah Desa yang rutin diberikan setiap tahun, tertuang dalam Alokasi Dana Desa (ADD), yang penggunaannya diarahkan untuk memenuhi dana perimbangan pada desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2009. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalokasikan bagi hasil pada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bandung Barat diberikan kepada 165 desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Besarnya ADD masing-masing desa tergantung pada variabel dan kondisi setiap desa.

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang. Yang termasuk jenis belanja ini seperti kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pelaksana teknis untuk tanggap darurat bencana ini tetap berada dalam koordinasi OPD terkait.

## 2. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan Belanja Langsung Daerah Tahun 2020 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif. Upaya tersebut antara lain adalah:

- a. Penggunaan anggaran untuk sektor pendidikan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Belanja Langsung untuk Dinas Pendidikan Tahun 2020 masih dominan dan diprioritaskan pada pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Untuk sektor kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan diupayakan melalui perbaikan fasilitas dan pengadaan pelayanan dasar kesehatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ada kebijakan bahwa besaran anggaran

- kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah terutama prasarana jalan kabupaten melalui peningkatan dan pemeliharaan secara terpadu. Infrastruktur jalan diprioritaskan guna meningkatkan distribusi barang/jasa yang mendukung sektor ekonomi masyarakat, terutama jalan yang menghubungi pusat-pusat distribusi pertanian, perikanan, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Selain prasarana jalan, infrastruktur wilayah yang lain yang diprioritaskan pada Tahun 2020 adalah peningkatan/pemeliharaan jembatan, irigasi/drainase, listrik desa, air minum, persampahan, perumahan dan permukiman serta sarana pendukung lainnya.
  - d. Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan daerah.
  - e. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat.
  - f. Mitigasi bencana.
  - g. Peningkatan UMKM dan koperasi serta akses kewirausahaan.
  - h. Peningkatan produksi pangan.
  - i. Pengembangan kemandirian pemberdayaan pemerintahan desa, dan masyarakat.

Selain itu, pada Tahun 2020 ini terdapat pula beberapa kebijakan penggunaan belanja langsung yang digunakan untuk:

- a. Peningkatan keterlibatan pemerintah dan masyarakat desa dalam program dan kegiatan partisipatif, baik untuk pembangunan fisik maupun non fisik, yang dalam implementasinya merupakan program terpadu antara aparatur di wilayah, masyarakat dan OPD.
- b. Peningkatan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di pedesaan dengan berbagai pelatihan/keterampilan praktis dengan jiwa kewirausahaan.
- c. Optimalisasi peran serta para kader desa (Kesehatan, KB) guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program kesehatan lingkungan dan KB.

### **2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Penerimaan pembiayaan tidak tergantung sepenuhnya pada SiLPA. Pada Tahun 2020 diharapkan semua program dan kegiatan OPD terealisasi dengan baik sampai tahun anggaran berakhir, sehingga penyerapan anggaran yang optimal akan mengurangi penerimaan

pembangunan dari SiLPA. Penerimaan pembangunan dari SiLPA berasal dari belanja langsung. Penerimaan ini dapat diperoleh dari pengadaan barang/jasa (sisa tender), pengembalian belanja perjalanan dinas, dan sebagainya.

Sedangkan pengeluaran pembangunan terdiri dari: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembangunan terhadap pengeluaran pembangunan disebut sebagai pembangunan netto.

## **2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD**

### **2.3.1 Prioritas Pembangunan Daerah**

Kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2025 periode lima tahun ketiga, dan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 yaitu untuk periode tahun ketiga. Dengan melalui proses tahapan perencanaan mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, telah didapatkan prioritas program kegiatan pembangunan untuk Tahun 2020.

Adapun isu-isu strategis yang relevan menjadi dasar prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2020 merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 yang menjadi dasar dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan
  - a. Belum meratanya fasilitas pendidikan yang berkualitas baik dan di semua kecamatan;
  - b. Belum bertumbuh kembangnya kesadaran pada sebagian masyarakat akan pentingnya meraih pendidikan tinggi;
  - c. Sulitnya mengakses fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin;
  - d. Belum seimbangnya perkembangan antara sistem pendidikan formal dan non formal;
  - e. Peningkatan penghargaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan.
2. Urusan Kesehatan
  - a. Belum optimalnya penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas baik dan merata di semua kecamatan;
  - b. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan mencakup kasus-kasus penyakit menular yang belum tertangani dengan baik;
  - c. Penanganan kasus-kasus gizi buruk belum tertangani dengan baik;
  - d. Masih terdapat kasus-kasus kematian ibu melahirkan dan bayi yang belum tertangani dengan baik;
  - e. Keterbatasan serta belum meratanya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan;
  - f. Belum meratanya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat;

g. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan masih rendah.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

- a. Masih rendahnya indeks aksesibilitas dan indeks mobilitas yang dibuktikan dengan nilai SPM masih di bawah untuk Kabupaten;
- b. Terbatasnya jaringan jalan yang menghubungkan internal kabupaten;
- c. Belum optimalnya penambahan jaringan irigasi;
- d. Masih terdapat kondisi jaringan irigasi yang kurang baik;
- e. Perubahan alih fungsi lahan dari lindung ke bukan lindung dan dari pertanian ke bukan pertanian yang masih melaju tinggi;
- f. Pengendalian pemanfaatan ruang yang masih belum efektif;
- g. Perkiraan peningkatan intensitas penggunaan lahan di Kawasan Walini.

4. Urusan Perumahan dan Permukiman

- a. Masih terdapat kondisi sanitasi permukiman yang tidak baik;
- b. Terdapat banyak rumah dalam kondisi fisik yang mendesak untuk diperbaiki;
- c. Masih rendahnya serah terima fasilitas umum perumahan formal.

5. Urusan Perhubungan

- a. Masih rendahnya kapasitas sistem transportasi umum;
- b. Kualitas dan jumlah terminal masih perlu untuk ditingkatkan.

6. Urusan Pertanian

- a. Keterbatasan SDM berkualitas pada sektor pertanian;
- b. Masih rendahnya penggunaan teknologi pengolahan pertanian;
- c. Belum optimalnya pasokan input sektor pertanian (bibit, pupuk dan lainnya) yang masih kurang lancar dan berkualitas;
- d. Masih rendahnya kualitas pengolahan pasca panen;
- e. Belum optimalnya sarana pemasaran hasil produk pertanian yang berskala besar;
- f. Belum terdapat sistem pendataan sektor pertanian yang baik dan berkelanjutan.

7. Urusan Pariwisata

- a. Belum optimalnya kemandirian pemerintah daerah dalam kapasitasnya mengelola obyek wisata;
- b. Masih terdapat kualitas akses menuju ke obyek wisata yang kurang baik;
- c. Belum meratanya fasilitas penunjang (fasum dan fasos) di obyek wisata yang berkualitas baik;
- d. Belum optimalnya pemasaran pariwisata daerah yang baik.

8. Urusan Perindustrian

- a. Belum terdapat hilirisasi hasil produksi pertanian dan sektor primer lainnya;
- b. Terdapat persoalan pencemaran, kemacetan dan kekumuhan akibat dampak negatif dari kegiatan industri;
- c. Diperlukan pembangunan industri yang saling keterkaitan antara industri besar yang ada di Bandung Barat dengan UMKM setempat.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut telah disusun prioritas program pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan, kerangka ekonomi daerah, serta aspirasi masyarakat yang berkembang dalam proses Musrenbang RKPD. Selanjutnya dari isu strategis yang telah mengacu pada arah pembangunan baik nasional maupun provinsi, maka disusun prioritas pembangunan dan program yang mendukungnya.

Substansi dari prioritas program pembangunan merupakan hasil rumusan dari isu strategis, usulan OPD yang tidak terlepas dari aspirasi masyarakat yang disepakati dalam musrenbang. Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 adalah:

1. Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan:
  - a. Program pendidikan anak usia dini (Dinas Pendidikan);
  - b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (BIDANG SD) (Dinas Pendidikan);
  - c. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (BIDANG SMP) (Dinas Pendidikan);
  - d. Program Pendidikan Non Formal (Dinas Pendidikan);
  - e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dinas Pendidikan);
  - b. Program Pengembangan Nilai Budaya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan);
  - c. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan);
  - d. Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan).
  - a.
2. Penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Bandung Barat:
  - a. Program Keluarga Berencana (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
  - b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
  - c. Program Pelayanan Kontrasepsi (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
  - d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
  - e. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
  - f. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
  - g. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan);

- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan);
  - i. Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan BLUD (Dinas Kesehatan);
  - j. Program Perbaikan Gizi Masyarakat (Dinas Kesehatan);
  - k. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak (Dinas Kesehatan);
  - l. Program Pengawasan Obat dan Makanan (Dinas Kesehatan);
  - m. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Dinas Kesehatan).
3. Penyediaan fasilitas dan jaminan sosial bagi masyarakat:
- a. Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya (Dinas Sosial);
  - b. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (Dinas Sosial);
  - c. Program pembinaan anak terlantar (Dinas Sosial);
  - d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma (Dinas Sosial);
  - e. Program pembinaan panti asuhan /panti jompo (Dinas Sosial);
  - f. Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial, (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya (Dinas Sosial);
  - g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (Dinas Sosial);
  - h. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan);
  - i. Program peningkatan produksi Tanaman Pangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan);
  - j. Program peningkatan kualitas produk tanaman pangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan);
  - k. Program penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

### 2.3.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

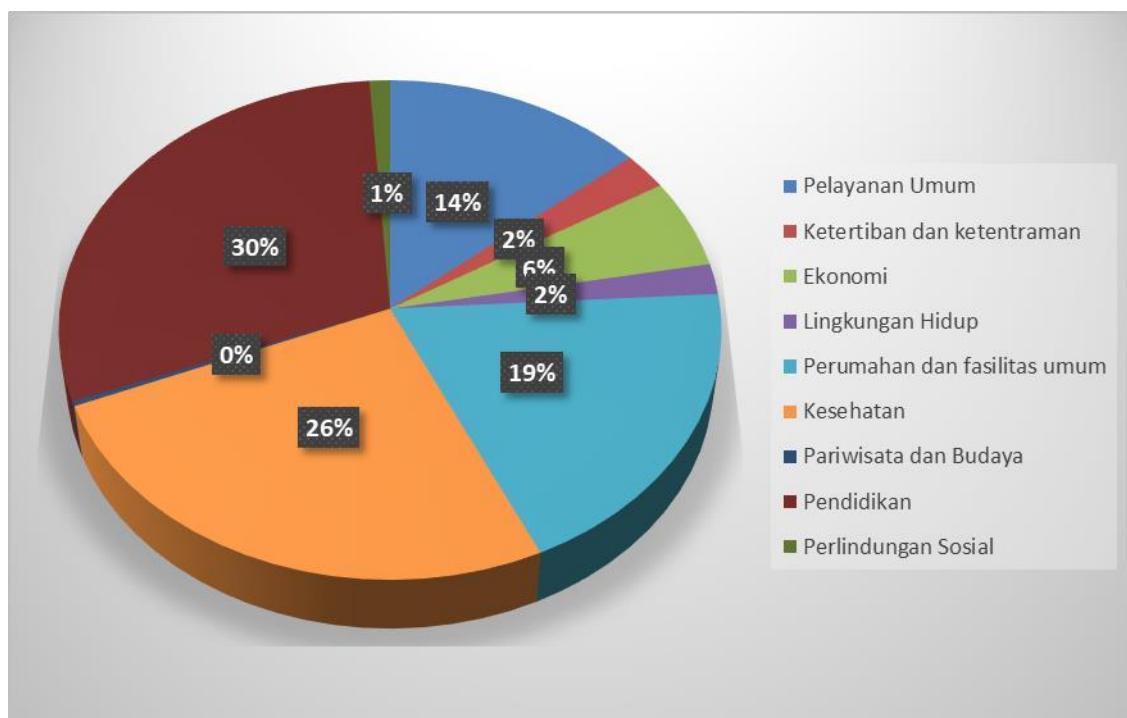
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7) realisasi program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2020 menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi terdiri dari enam Urusan Wajib Pelayanan Dasar, delapan belas Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, delapan Urusan Pilihan dan tujuh Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.

Pengalokasian anggaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 menurut fungsi keselarasan urusan pemerintahan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Pelayanan umum (ketahanan pangan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, kearsipan, adminitrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan) sebesar 10,73%;
2. Ketertiban dan keamanan (ketentraman dan keteretiban umum serta perlindungan masyarakat) sebesar 1,85%;

3. Ekonomi (tenaga kerja, permberdayaan masyarakat desa, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi) sebesar 4,45%;
4. Lingkungan hidup (pertanahan, lingkungan hidup, dan kehutanan) sebesar 1,52%;
5. Perumahan dan fasilitas umum (pekerjaan umum, perumahan, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman) sebesar 14,69%;
6. Kesehatan (kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana) sebesar 19,81%;
7. Pariwisata dan budaya (kebudayaan dan pariwisata) sebesar 0,24%;
8. Pendidikan (pendidikan, kepemudaan dan olah raga, serta perpustakaan) sebesar 22,99%; serta
9. Perlindungan sosial (sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta administrasi kependudukan dan catatan sipil) sebesar 0,84%.

**Gambar 2.3 Pengalokasian Anggaran Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020  
Menurut Fungsi Keselarasan Urusan Pemerintahan dan Keterpaduan Pengelolaan Keuangan Daerah**



Rekapitulasi capaian kinerja OPD dalam melaksanakan program kegiatan APBD menurut urusan pemerintahan dan menurut fungsi keselarasan urusan pemerintahan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah guna mencapai sasaran prioritas pembangunan Tahun 2020 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja Realisasi Anggaran**

NO	OPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				
<b>1</b>	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>1.040.798.735.361,00</b>	<b>1.008.262.242.869,00</b>	<b>96,87</b>
	- Belanja Operasi	851.464.779.303,00	822.324.202.461,00	96,58
	Belanja Pegawai	708.046.296.953,00	684.958.434.171,00	96,74
	Belanja Barang dan Jasa	20.658.215.000,00	19.854.280.364,00	96,11
	Belanja Hibah	122.760.267.350,00	117.487.167.676,00	95,70
	- Belanja Modal	189.333.956.058,00	185.962.361.658,00	98,22
<b>2</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>484.781.897.556,00</b>	<b>422.374.895.905,00</b>	<b>87,13</b>
	- Belanja Operasi	348.832.727.051,00	315.944.255.960,00	90,57
	Belanja Pegawai	116.480.889.106,00	110.705.510.548,00	95,04
	Belanja Barang dan Jasa	232.339.062.945,00	205.225.970.412,00	88,33
	Belanja Bantuan Sosial	12.775.000,00	12.775.000,00	100,00
	- Belanja Modal	135.949.170.505,00	106.430.639.945,00	78,29
<b>3</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>553.827.309.005,00</b>	<b>250.923.671.394,00</b>	<b>45,31</b>
	- Belanja Operasi	102.010.101.943,00	97.437.937.985,00	95,52
	Belanja Pegawai	17.104.994.416,00	15.448.037.420,00	90,31
	Belanja Barang dan Jasa	45.428.139.658,00	43.033.534.096,00	94,73
	Belanja Hibah	39.476.967.869,00	38.956.366.469,00	98,68
	- Belanja Modal	451.817.207.062,00	153.485.733.409,00	33,97
<b>4</b>	<b>Dinas Perumahan dan Pemukiman</b>	<b>17.194.694.509,00</b>	<b>16.456.135.202,00</b>	<b>95,70</b>
	- Belanja Operasi	16.399.269.509,00	15.669.507.032,00	95,55
	Belanja Pegawai	6.681.143.734,00	6.182.726.383,00	92,54
	Belanja Barang dan Jasa	9.718.125.775,00	9.486.780.649,00	97,62
	- Belanja Modal	795.425.000,00	786.628.170,00	98,89
<b>5</b>	<b>Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>4.622.559.825,00</b>	<b>4.542.930.948,00</b>	<b>98,28</b>
	- Belanja Operasi	4.560.932.825,00	4.481.303.948,00	98,25
	Belanja Pegawai	1.727.079.825,00	1.695.472.448,00	98,17
	Belanja Barang dan Jasa	2.833.853.000,00	2.785.831.500,00	98,31
	- Belanja Modal	61.627.000,00	61.627.000,00	100,00
<b>6</b>	<b>Kantor Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</b>	<b>26.801.472.931,00</b>	<b>26.048.437.071,00</b>	<b>97,19</b>
	- Belanja Operasi	26.706.770.667,00	25.954.103.746,00	97,18
	Belanja Pegawai	14.217.286.467,00	13.920.735.967,00	97,91
	Belanja Barang dan Jasa	12.489.484.200,00	12.033.367.779,00	96,35
	- Belanja Modal	94.702.264,00	94.333.325,00	99,61
<b>7</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>14.757.805.678,00</b>	<b>12.924.672.254,00</b>	<b>87,58</b>
	- Belanja Operasi	14.734.514.978,00	12.901.672.254,00	87,56
	Belanja Pegawai	4.533.836.709,00	4.055.456.587,00	89,45
	Belanja Barang dan Jasa	10.200.678.269,00	8.846.215.667,00	86,72
	- Belanja Modal	23.290.700,00	23.000.000,00	98,75
<b>8</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>12.668.432.519,00</b>	<b>11.952.331.113,00</b>	<b>94,35</b>
	- Belanja Operasi	12.636.932.519,00	11.920.831.113,00	94,33
	Belanja Pegawai	6.815.753.527,00	6.610.444.956,00	96,99
	Belanja Barang dan Jasa	5.095.378.992,00	4.646.390.157,00	91,19
	Belanja Hibah	79.000.000,00	61.500.000,00	77,85
	Belanja Bantuan Sosial	646.800.000,00	602.496.000,00	93,15
	- Belanja Modal	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00

NO	OPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>II</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>			
<b>9</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>12.708.419.833,00</b>	<b>12.156.988.148,00</b>	<b>95,66</b>
	- Belanja Operasi	12.166.221.033,00	11.615.852.687,00	95,48
	Belanja Pegawai	6.367.992.383,00	5.836.431.987,00	91,65
	Belanja Barang dan Jasa	4.891.728.650,00	4.872.920.700,00	99,62
	Belanja Hibah	906.500.000,00	906.500.000,00	100,00
	- Belanja Modal	542.198.800,00	541.135.461,00	99,80
<b>10</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak</b>	<b>22.444.301.397,00</b>	<b>20.670.947.461,00</b>	<b>92,10</b>
	- Belanja Operasi	22.052.649.430,00	20.285.629.334,00	91,99
	Belanja Pegawai	16.242.109.817,00	14.498.255.413,00	89,26
	Belanja Barang dan Jasa	5.767.439.613,00	5.746.273.921,00	99,63
	Belanja Hibah	43.100.000,00	41.100.000,00	95,36
	- Belanja Modal	391.651.967,00	385.318.127,00	98,38
<b>11</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>35.203.999.988,00</b>	<b>33.430.012.861,00</b>	<b>94,96</b>
	- Belanja Operasi	34.195.949.988,00	32.776.252.861,00	95,85
	Belanja Pegawai	8.659.256.088,00	8.096.794.921,00	93,50
	Belanja Barang dan Jasa	25.536.693.900,00	24.679.457.940,00	96,64
	- Belanja Modal	1.008.050.000,00	653.760.000,00	64,85
<b>12</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>15.776.541.027,00</b>	<b>13.490.253.009,00</b>	<b>85,51</b>
	- Belanja Operasi	15.197.697.027,00	12.983.201.859,00	85,43
	Belanja Pegawai	6.275.013.027,00	5.964.875.014,00	95,06
	Belanja Barang dan Jasa	8.922.684.000,00	7.018.326.845,00	78,66
	- Belanja Modal	578.844.000,00	507.051.150,00	87,60
<b>13</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>11.204.343.640,00</b>	<b>10.109.125.841,00</b>	<b>90,23</b>
	- Belanja Operasi	10.577.163.930,00	9.694.273.981,00	91,65
	Belanja Pegawai	4.579.554.834,00	4.319.162.640,00	94,31
	Belanja Barang dan Jasa	5.997.609.096,00	5.375.111.341,00	89,62
	- Belanja Modal	627.179.710,00	414.851.860,00	66,15
<b>14</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>23.641.268.488,00</b>	<b>22.231.551.210,00</b>	<b>94,04</b>
	- Belanja Operasi	21.338.059.688,00	20.018.916.060,00	93,82
	Belanja Pegawai	9.233.437.888,00	8.155.401.943,00	88,32
	Belanja Barang dan Jasa	12.104.621.800,00	11.863.514.117,00	98,01
	- Belanja Modal	2.303.208.800,00	2.212.635.150,00	96,07
<b>15</b>	<b>Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik</b>	<b>8.161.477.331,00</b>	<b>7.838.901.672,00</b>	<b>96,05</b>
	- Belanja Operasi	7.786.768.321,00	7.468.980.903,00	95,92
	Belanja Pegawai	4.091.421.057,00	3.782.803.291,00	92,46
	Belanja Barang dan Jasa	3.695.347.264,00	3.686.177.612,00	99,75
	- Belanja Modal	374.709.010,00	369.920.769,00	98,72
<b>16</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>10.950.855.962,00</b>	<b>8.533.530.057,00</b>	<b>77,93</b>
	- Belanja Operasi	10.866.938.962,00	8.449.613.057,00	77,76
	Belanja Pegawai	4.183.569.443,00	3.917.105.750,00	93,63
	Belanja Barang dan Jasa	3.358.190.143,00	3.308.820.100,00	98,53
	Belanja Hibah	3.325.179.376,00	1.223.687.207,00	36,80
	- Belanja Modal	83.917.000,00	83.917.000,00	100,00
<b>17</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>8.361.567.993,00</b>	<b>7.246.039.087,00</b>	<b>86,66</b>
	- Belanja Operasi	8.333.707.993,00	7.218.934.087,00	86,62
	Belanja Pegawai	6.145.351.367,00	5.139.996.301,00	83,64
	Belanja Barang dan Jasa	2.188.356.626,00	2.078.937.786,00	95,00

NO	OPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	- Belanja Modal	27.860.000,00	27.105.000,00	97,29
<b>18</b>	<b>Dinas Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>8.326.599.625,00</b>	<b>7.732.395.936,00</b>	<b>92,86</b>
	- Belanja Operasi	8.271.399.625,00	7.678.296.936,00	92,83
	Belanja Pegawai	4.119.346.085,00	3.657.447.454,00	88,79
	Belanja Barang dan Jasa	4.152.053.540,00	4.020.849.482,00	96,84
	- Belanja Modal	55.200.000,00	54.099.000,00	98,01
<b>19</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>	<b>10.960.860.219,00</b>	<b>10.625.112.815,00</b>	<b>96,94</b>
	- Belanja Operasi	10.895.860.219,00	10.560.782.815,00	96,92
	Belanja Pegawai	3.623.897.219,00	3.505.886.415,00	96,74
	Belanja Barang dan Jasa	7.271.963.000,00	7.054.896.400,00	97,02
	- Belanja Modal	65.000.000,00	64.330.000,00	98,97
<b>III URUSAN PILIHAN</b>				
<b>20</b>	<b>Dinas Perikanan dan Peternakan</b>	<b>31.071.212.786,00</b>	<b>30.052.715.401,00</b>	<b>96,72</b>
	- Belanja Operasi	28.429.859.786,00	27.539.684.556,00	96,87
	Belanja Pegawai	9.354.085.336,00	8.762.724.310,00	93,68
	Belanja Barang dan Jasa	19.075.774.450,00	18.776.960.246,00	98,43
	- Belanja Modal	2.641.353.000,00	2.513.030.845,00	95,14
<b>21</b>	<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>	<b>9.750.168.047,00</b>	<b>9.291.866.262,00</b>	<b>95,30</b>
	- Belanja Operasi	9.750.168.047,00	9.291.866.262,00	95,30
	Belanja Pegawai	5.678.937.347,00	5.333.849.195,00	93,92
	Belanja Barang dan Jasa	3.607.290.700,00	3.494.612.067,00	96,88
	Belanja Hibah	463.940.000,00	463.405.000,00	99,88
	- Belanja Modal	-	-	-
<b>22</b>	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>	<b>30.598.906.025,00</b>	<b>26.585.480.719,93</b>	<b>86,88</b>
	- Belanja Operasi	28.875.538.724,00	25.481.680.512,93	88,25
	Belanja Pegawai	13.693.191.284,00	12.519.198.997,00	91,43
	Belanja Barang dan Jasa	11.388.431.940,00	10.089.090.065,93	88,59
	Belanja Hibah	3.670.358.000,00	2.749.833.950,00	74,92
	Belanja Bantuan Sosial	123.557.500,00	123.557.500,00	100,00
	- Belanja Modal	1.723.367.301,00	1.103.800.207,00	64,05
<b>23</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>17.970.737.882,00</b>	<b>17.012.540.973,00</b>	<b>94,67</b>
	- Belanja Operasi	17.638.564.432,00	16.700.330.123,00	94,68
	Belanja Pegawai	13.552.764.057,00	12.935.914.219,00	95,45
	Belanja Barang dan Jasa	3.445.882.375,00	3.301.600.754,00	95,81
	Belanja Hibah	639.918.000,00	462.815.150,00	72,32
	- Belanja Modal	332.173.450,00	312.210.850,00	93,99
<b>IV URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>				
<b>24</b>	<b>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>36.989.540.900,00</b>	<b>36.433.964.670,00</b>	<b>98,50</b>
	- Belanja Operasi	36.989.540.900,00	36.433.964.670,00	98,50
	Belanja Pegawai	36.989.540.900,00	36.433.964.670,00	98,50
	- Belanja Modal	-	-	-
<b>25</b>	<b>Kepala dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1.106.618.204,00</b>	<b>1.066.207.716,00</b>	<b>96,35</b>
	- Belanja Operasi	1.106.618.204,00	1.066.207.716,00	96,35
	Belanja Pegawai	1.106.618.204,00	1.066.207.716,00	96,35
	- Belanja Modal	-	-	-
<b>26</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>59.520.641.224,00</b>	<b>55.521.057.523,00</b>	<b>93,28</b>
	- Belanja Operasi	58.036.369.144,00	54.043.927.793,00	93,12
	Belanja Pegawai	24.086.636.024,00	21.365.751.027,00	88,70
	Belanja Barang dan Jasa	33.949.733.120,00	32.678.176.766,00	96,25

NO	OPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	- Belanja Modal	1.484.272.080,00	1.477.129.730,00	99,52
<b>27</b>	<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>51.026.512.457,00</b>	<b>49.684.807.003,00</b>	<b>97,37</b>
	- Belanja Operasi	50.709.512.457,00	49.370.398.788,00	97,36
	Belanja Pegawai	6.563.621.990,00	5.865.074.731,00	89,36
	Belanja Barang dan Jasa	44.145.890.467,00	43.505.324.057,00	98,55
	- Belanja Modal	317.000.000,00	314.408.215,00	99,18
<b>28</b>	<b>Kecamatan Ngamprah</b>	<b>5.209.661.549,00</b>	<b>4.996.502.122,00</b>	<b>95,91</b>
	- Belanja Operasi	5.185.161.549,00	4.972.002.122,00	95,89
	Belanja Pegawai	4.291.452.699,00	4.078.293.272,00	95,03
	Belanja Barang dan Jasa	893.708.850,00	893.708.850,00	100,00
	- Belanja Modal	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00
<b>29</b>	<b>Kecamatan Cipatat</b>	<b>5.265.126.116,00</b>	<b>5.010.544.450,00</b>	<b>95,16</b>
	- Belanja Operasi	5.195.204.116,00	4.940.622.450,00	95,10
	Belanja Pegawai	4.473.451.316,00	4.232.369.650,00	94,61
	Belanja Barang dan Jasa	721.752.800,00	708.252.800,00	98,13
	- Belanja Modal	69.922.000,00	69.922.000,00	100,00
<b>30</b>	<b>Kecamatan Batujajar</b>	<b>4.623.510.846,00</b>	<b>4.336.223.605,00</b>	<b>93,79</b>
	- Belanja Operasi	4.585.470.846,00	4.298.183.605,00	93,73
	Belanja Pegawai	2.974.030.146,00	2.686.742.905,00	90,34
	Belanja Barang dan Jasa	1.611.440.700,00	1.611.440.700,00	100,00
	- Belanja Modal	38.040.000,00	38.040.000,00	100,00
<b>31</b>	<b>Kecamatan Padalarang</b>	<b>5.698.402.077,00</b>	<b>5.129.163.458,00</b>	<b>90,01</b>
	- Belanja Operasi	5.648.957.077,00	5.079.718.458,00	89,92
	Belanja Pegawai	4.732.395.077,00	4.181.173.558,00	88,35
	Belanja Barang dan Jasa	916.562.000,00	898.544.900,00	98,03
	- Belanja Modal	49.445.000,00	49.445.000,00	100,00
<b>32</b>	<b>Kecamatan Sindangkerta</b>	<b>4.276.466.367,00</b>	<b>4.062.202.307,00</b>	<b>94,99</b>
	- Belanja Operasi	4.257.689.867,00	4.043.425.807,00	94,97
	Belanja Pegawai	3.419.894.367,00	3.269.108.707,00	95,59
	Belanja Barang dan Jasa	837.795.500,00	774.317.100,00	92,42
	- Belanja Modal	18.776.500,00	18.776.500,00	100,00
<b>33</b>	<b>Kecamatan Cipongkor</b>	<b>4.319.266.540,00</b>	<b>4.139.968.771,00</b>	<b>95,85</b>
	- Belanja Operasi	4.287.526.540,00	4.108.228.771,00	95,82
	Belanja Pegawai	3.463.966.540,00	3.284.668.771,00	94,82
	Belanja Barang dan Jasa	823.560.000,00	823.560.000,00	100,00
	- Belanja Modal	31.740.000,00	31.740.000,00	100,00
<b>34</b>	<b>Kecamatan Gununghalu</b>	<b>4.738.703.872,00</b>	<b>4.574.044.902,00</b>	<b>96,53</b>
	- Belanja Operasi	4.692.703.872,00	4.528.044.902,00	96,49
	Belanja Pegawai	3.815.321.572,00	3.685.425.702,00	96,60
	Belanja Barang dan Jasa	877.382.300,00	842.619.200,00	96,04
	- Belanja Modal	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00
<b>35</b>	<b>Kecamatan Rongga</b>	<b>4.313.620.768,00</b>	<b>4.122.320.922,00</b>	<b>95,57</b>
	- Belanja Operasi	4.283.350.768,00	4.092.050.922,00	95,53
	Belanja Pegawai	3.547.086.068,00	3.399.254.822,00	95,83
	Belanja Barang dan Jasa	736.264.700,00	692.796.100,00	94,10
	- Belanja Modal	30.270.000,00	30.270.000,00	100,00
<b>36</b>	<b>Kecamatan Cililin</b>	<b>4.860.104.098,00</b>	<b>4.629.513.345,00</b>	<b>95,26</b>
	- Belanja Operasi	4.820.234.098,00	4.589.643.345,00	95,22
	Belanja Pegawai	2.911.026.398,00	2.682.285.245,00	92,14

NO	OPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Belanja Barang dan Jasa	1.909.207.700,00	1.907.358.100,00	99,90
	- Belanja Modal	39.870.000,00	39.870.000,00	100,00
<b>37</b>	<b>Kecamatan Cikalongwetan</b>	<b>5.227.119.617,00</b>	<b>5.074.363.028,00</b>	<b>97,08</b>
	- Belanja Operasi	5.151.491.265,00	4.999.563.028,00	97,05
	Belanja Pegawai	4.263.349.617,00	4.113.103.380,00	96,48
	Belanja Barang dan Jasa	888.141.648,00	886.459.648,00	99,81
	- Belanja Modal	75.628.352,00	74.800.000,00	98,90
<b>38</b>	<b>Kecamatan Cipeundeuy</b>	<b>4.902.981.850,00</b>	<b>4.750.304.443,00</b>	<b>96,89</b>
	- Belanja Operasi	4.825.837.850,00	4.673.160.443,00	96,84
	Belanja Pegawai	3.973.329.850,00	3.820.654.243,00	96,16
	Belanja Barang dan Jasa	852.508.000,00	852.506.200,00	100,00
	- Belanja Modal	77.144.000,00	77.144.000,00	100,00
<b>39</b>	<b>Kecamatan Parongpong</b>	<b>5.068.602.425,00</b>	<b>4.880.309.862,00</b>	<b>96,29</b>
	- Belanja Operasi	4.989.511.925,00	4.801.489.918,00	96,23
	Belanja Pegawai	4.137.267.125,00	3.950.343.062,00	95,48
	Belanja Barang dan Jasa	852.244.800,00	851.146.856,00	99,87
	- Belanja Modal	79.090.500,00	78.819.944,00	99,66
<b>40</b>	<b>Kecamatan Cisarua</b>	<b>4.704.837.197,00</b>	<b>4.582.019.063,00</b>	<b>97,39</b>
	- Belanja Operasi	4.676.937.197,00	4.554.124.063,00	97,37
	Belanja Pegawai	3.801.293.697,00	3.681.442.863,00	96,85
	Belanja Barang dan Jasa	875.643.500,00	872.681.200,00	99,66
	- Belanja Modal	27.900.000,00	27.895.000,00	99,98
<b>41</b>	<b>Kecamatan Lembang</b>	<b>6.424.673.149,00</b>	<b>6.204.176.174,00</b>	<b>96,57</b>
	- Belanja Operasi	6.333.923.149,00	6.113.426.174,00	96,52
	Belanja Pegawai	5.436.858.149,00	5.220.674.774,00	96,02
	Belanja Barang dan Jasa	897.065.000,00	892.751.400,00	99,52
	- Belanja Modal	90.750.000,00	90.750.000,00	100,00
<b>42</b>	<b>Kecamatan Cihampelas</b>	<b>5.311.671.245,00</b>	<b>4.988.359.488,00</b>	<b>93,91</b>
	- Belanja Operasi	5.130.371.245,00	4.988.359.488,00	97,23
	Belanja Pegawai	4.341.221.245,00	4.215.120.488,00	97,10
	Belanja Barang dan Jasa	789.150.000,00	773.239.000,00	97,98
	- Belanja Modal	181.300.000,00	0,00	
<b>43</b>	<b>Kecamatan Saguling</b>	<b>3.815.278.954,00</b>	<b>3.527.633.957,00</b>	<b>92,46</b>
	- Belanja Operasi	3.752.778.954,00	3.465.133.957,00	92,34
	Belanja Pegawai	2.857.724.754,00	2.570.079.957,00	89,93
	Belanja Barang dan Jasa	895.054.200,00	895.054.000,00	100,00
	- Belanja Modal	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00
<b>44</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>	<b>16.994.966.521,00</b>	<b>16.180.439.916,00</b>	<b>95,21</b>
	- Belanja Operasi	16.839.926.521,00	16.025.399.916,00	95,16
	Belanja Pegawai	14.032.394.521,00	13.228.064.916,00	94,27
	Belanja Barang dan Jasa	2.807.532.000,00	2.797.335.000,00	99,64
	- Belanja Modal	155.040.000,00	155.040.000,00	100,00
<b>45</b>	<b>Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>22.152.457.427,00</b>	<b>21.236.571.445,00</b>	<b>95,87</b>
	- Belanja Operasi	20.034.402.157,00	19.132.375.185,00	95,50
	Belanja Pegawai	10.062.103.401,00	9.509.891.128,00	94,51
	Belanja Barang dan Jasa	9.972.298.756,00	9.622.484.057,00	96,49
	- Belanja Modal	2.118.055.270,00	2.104.196.260,00	99,35
<b>46</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>91.119.814.058,00</b>	<b>82.479.113.282,00</b>	<b>90,52</b>

NO	OPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	- Belanja Operasi	86.525.734.312,00	78.306.733.282,00	90,50
	Belanja Pegawai	55.835.471.443,00	49.563.936.315,00	88,77
	Belanja Barang dan Jasa	30.690.262.869,00	28.742.796.967,00	93,65
	- Belanja Modal	4.594.079.746,00	4.172.380.000,00	90,82
<b>47</b>	<b>PPKD</b>	<b>572.021.536.956,25</b>	<b>295.348.314.687,00</b>	<b>51,63</b>
	- Belanja Operasi	447.668.176.280,00	181.339.310.114,00	40,51
	Belanja Bunga	2.855.004.000,00	2.855.004.000,00	100,00
	Belanja Hibah	54.690.500.000,00	51.612.800.000,00	94,37
	Belanja Bantuan Sosial	5.610.000.000,00	1.365.000.000,00	24,33
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	384.512.672.280,00	125.506.506.114,00	32,64
	- Belanja Tak Terduga	83.001.734.581,25	74.183.964.539,00	89,38
	- Belanja Transfer	41.351.626.095,00	39.825.040.034,00	96,31
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	40.045.292.595,00	38.518.706.534,00	96,19
	Transfer Bantuan Keuangan	1.306.333.500,00	1.306.333.500,00	100,00
<b>48</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>16.832.837.238,00</b>	<b>16.189.822.923,00</b>	<b>96,18</b>
	- Belanja Operasi	16.463.917.238,00	15.835.593.923,00	96,18
	Belanja Pegawai	8.034.851.438,00	7.614.556.516,00	94,77
	Belanja Barang dan Jasa	8.429.065.800,00	8.221.037.407,00	97,53
	- Belanja Modal	368.920.000,00	354.229.000,00	96,02
<b>Total Belanja dan Transfer</b>		<b>3.359.109.119.282,25</b>	<b>2.639.640.727.270,93</b>	<b>78,58</b>

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

##### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

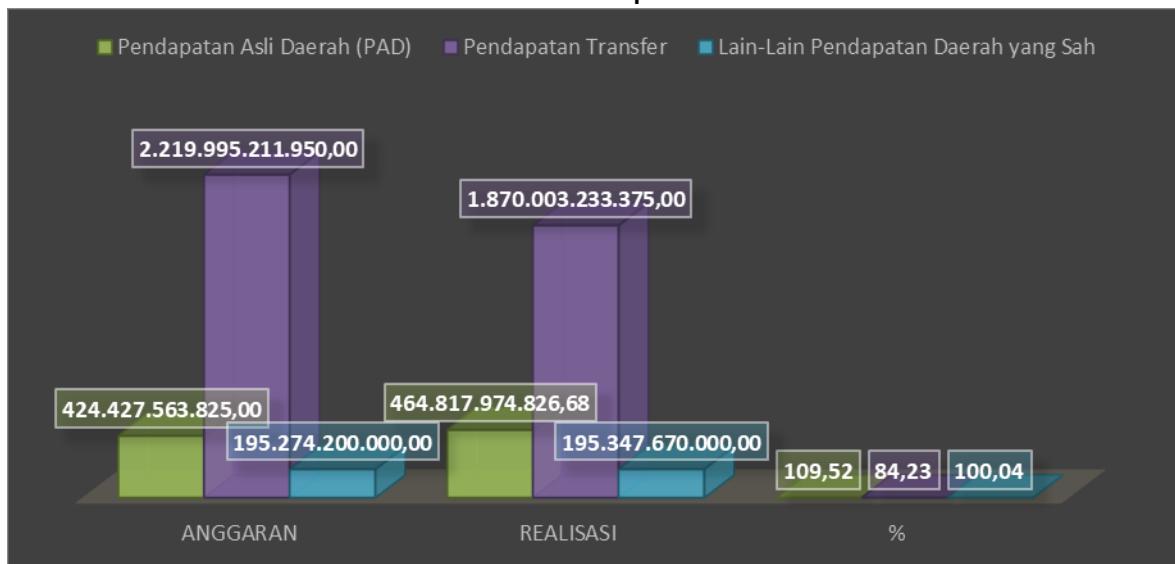
###### 3.1.1. Realisasi Pendapatan Tahun 2020

**Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
<b>PENDAPATAN – LRA</b>	<b>2.839.696.975.775,00</b>	<b>2.530.168.878.201,68</b>	<b>89,10</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	424.427.563.825,00	464.817.974.826,68	109,52
Pendapatan Transfer	2.219.995.211.950,00	1.870.003.233.375,00	84,23
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	195.274.200.000,00	195.347.670.000,00	100,04

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp2.530.168.878.201,68 atau sebesar 89,10% dari anggaran pendapatan sebesar Rp2.839.696.975.775,00. Gambar di bawah ini menggambarkan grafik realisasi pendapatan dari anggaran pada Tahun 2020.

**Gambar 3.1 Grafik Realisasi Pendapatan Tahun 2020**



###### 3.1.1.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

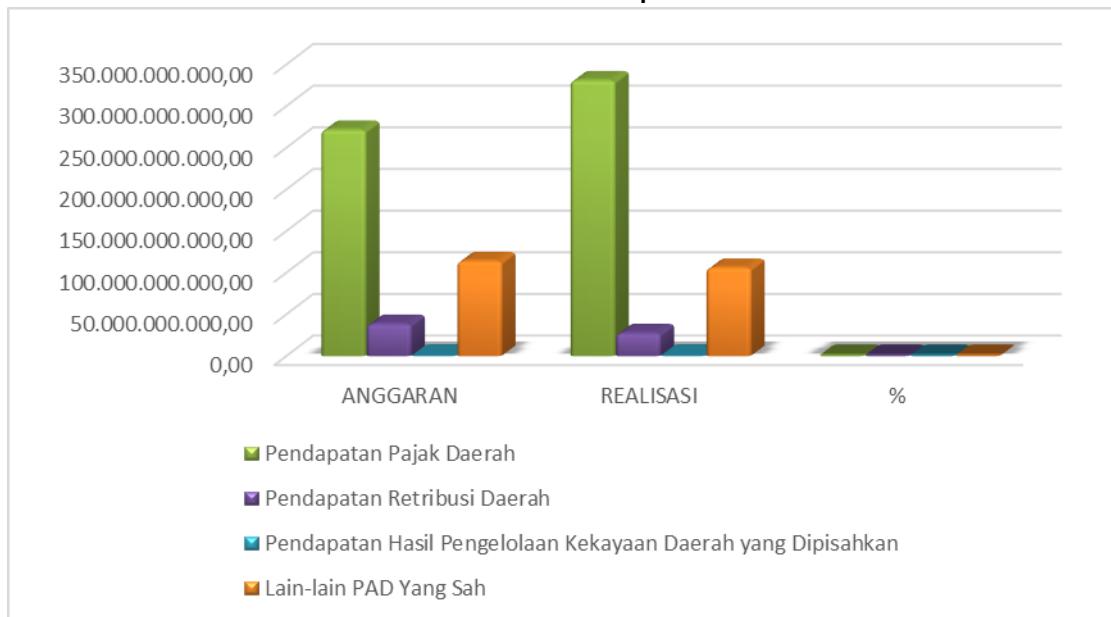
**Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>424.427.563.825,00</b>	<b>464.817.974.826,68</b>	<b>109,52</b>
Pendapatan Pajak Daerah	271.518.594.949,00	330.898.929.358,00	121,87
Pendapatan Retribusi Daerah	38.532.266.676,00	27.510.250.500,00	71,40
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	494.842.021,00	494.842.021,00	100,00

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
Lain-lain PAD Yang Sah	113.881.860.179,00	105.913.952.947,68	93,00

Realisasi PAD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 tergolong masih relatif rendah yaitu sebesar 16,37% dari total pendapatan daerah. Dengan demikian ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat masih cukup besar. Komposisi PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LRA dan lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana yang tertera pada tabel di atas. Dari penerimaan PAD ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah dari pajak daerah yaitu sebesar Rp330.898.929.358,00. Realisasi PAD digambarkan dalam grafik berikut ini.

**Gambar 3.2 Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020**



### 3.1.1.2. Realisasi Pendapatan Transfer

**Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.219.995.211.950,00</b>	<b>1.870.003.233.375,00</b>	<b>84,23</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.254.453.607.514,00	1.201.878.322.566,00	95,81
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	560.031.813.267,00	307.243.438.867,00	54,86
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	249.157.124.580,00	213.388.584.827,00	85,64
Bantuan Keuangan	156.352.666.589,00	147.492.887.115,00	94,33

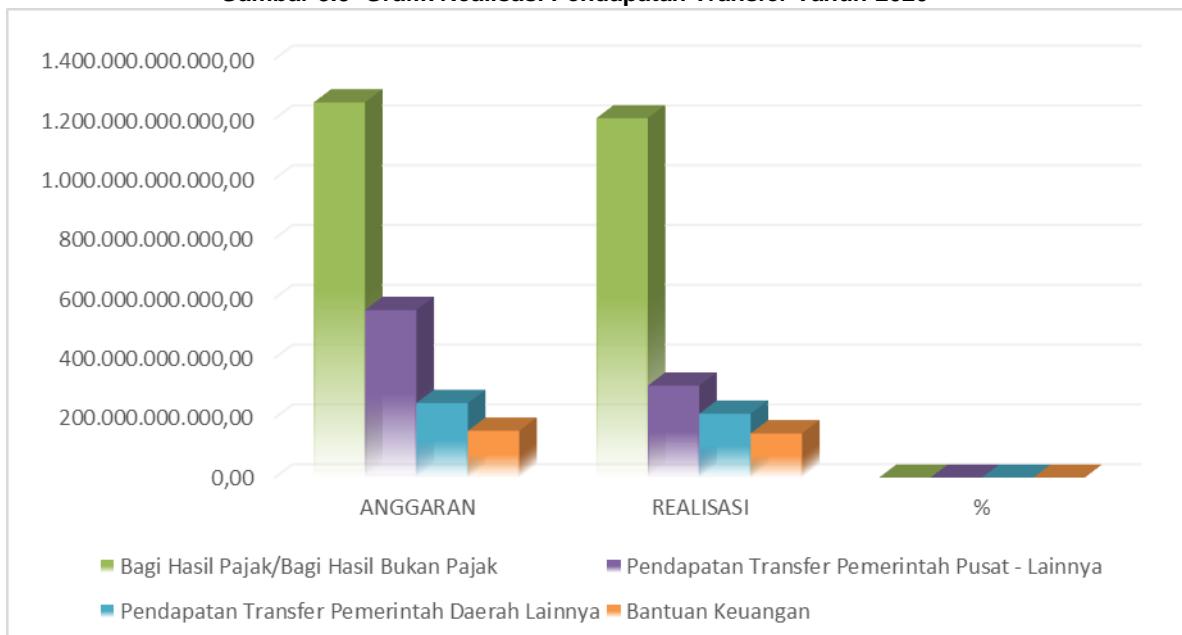
Dari realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 sebesar Rp2.206.258.579.947,00 mencapai 97,64% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.259.685.783.565,00.

Dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 sebesar 68,71% atau sebesar Rp1.126.707.364.000,00 merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2020 yang dialokasikan untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil sebesar 64,74%, Alokasi Dana Desa sebesar 10,74% dan sebesar 24,52% untuk pelayanan publik lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal disebabkan kebutuhan untuk gaji aparatur masih dominan.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan keuangan daerah dengan menyempurnakan manajemen keuangan, melakukan efisiensi dan penghematan, mempertajam prioritas dan berupaya melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Pencapaian kinerja keuangan pada realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Bandung Barat tersebut dapat digambarkan dalam grafik berikut ini.

**Gambar 3.3 Grafik Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020**



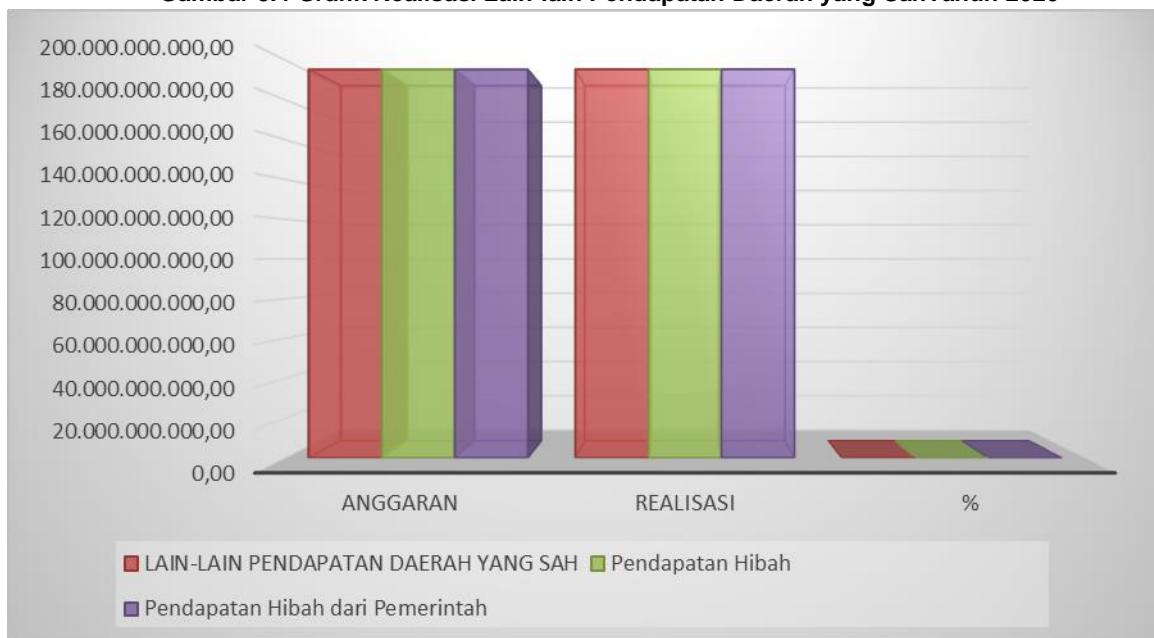
### 3.1.1.3. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020

**Tabel 3.4 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>195.274.200.000,00</b>	<b>195.347.670.000,00</b>	<b>100,04</b>
Pendapatan Hibah	195.274.200.000,00	195.347.670.000,00	100,04
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	195.274.200.000,00	195.347.670.000,00	100,04

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 merupakan Realisasi dari Pendapatan Hibah Dana Bos Tahun 2020. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 digambarkan dalam grafik berikut ini.

**Gambar 3.4 Grafik Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020**



### 3.1.2. Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2020

**Tabel 3.5 Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2020**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
BELANJA	2.933.244.820.907,25	2.474.309.181.122,93	84,35
TRANSFER	425.864.298.375,00	165.331.546.148,00	38,82
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	3.359.109.119.282,25	2.639.640.727.270,93	78,58

Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp2.639.640.727.270,93 turun sebesar 10,25%, realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2020 mencapai 78,58% dari total anggaran Belanja dan Transfer sebesar Rp3.359.109.119.282,25. Anggaran dan realisasi Belanja dan Transfer digambarkan dalam grafik berikut ini.

**Gambar 3.5 Grafik Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2020**



### 3.1.2.1. Realisasi Belanja Tahun 2020

Tabel 3.6 Realisasi Belanja Tahun 2020

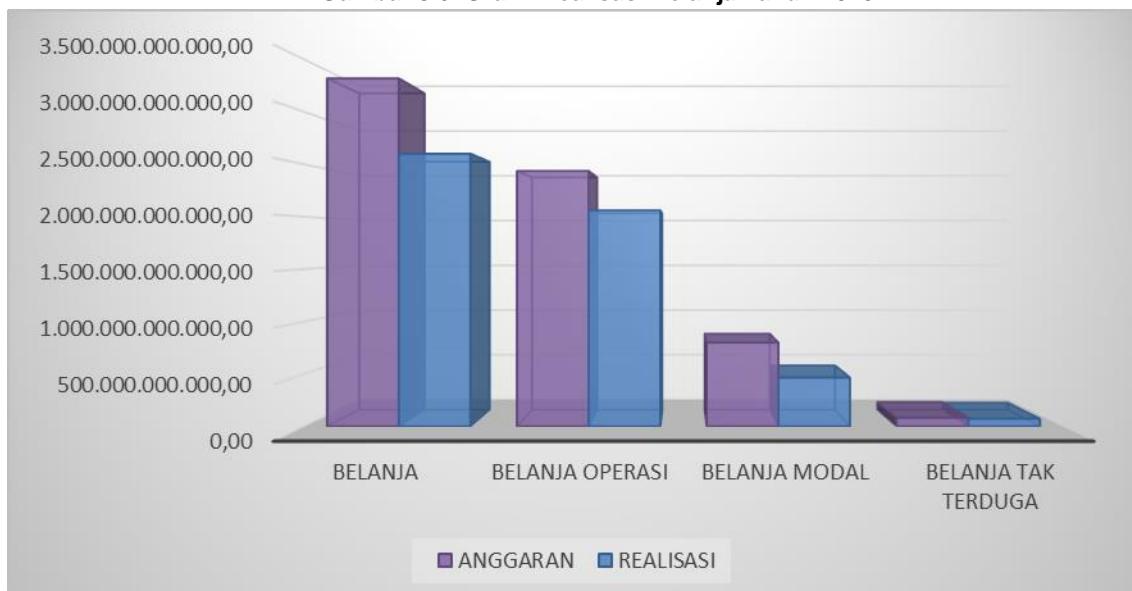
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
<b>BELANJA</b>	<b>2.933.244.820.907,25</b>	<b>2.474.309.181.122,93</b>	<b>84,35</b>
BELANJA OPERASI	2.051.401.251.251,00	1.934.668.372.008,93	94,31
BELANJA MODAL	798.841.835.075,00	465.456.844.575,00	58,27
BELANJA TAK TERDUGA	83.001.734.581,25	74.183.964.539,00	89,38

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 84,35% dari jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2020. Realisasi belanja tak terduga merupakan belanja yang terbesar dari seluruh komponen belanja yaitu sebesar 89,38% dari jumlah realisasi belanja tahun 2020. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Komposisi dari komponen Belanja Operasi adalah belanja pegawai sebesar 59,63%, belanja barang dan jasa sebesar 34,39%, belanja bunga sebesar 0,15%, belanja hibah sebesar 5,72%, dan belanja bantuan sosial sebesar 0,11%.

Belanja modal terealisasi sebesar 58,27% dari jumlah realisasi belanja Tahun 2020. Komposisi dari komponen belanja modal adalah belanja modal tanah sebesar 1,53%, belanja modal peralatan dan mesin sebesar 40,91%, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 24,36%, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar 17,83%, belanja modal aset tetap lainnya sebesar 14,18%, dan belanja modal BOS dan BLUD sebesar 1,19%. Selanjutnya Belanja Tak Terduga Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp83.001.734.581,25 dan direalisasikan sebesar Rp74.183.964.539,00 atau terealisasi 89,38%.

Pencapaian kinerja keuangan pada Realisasi Belanja Kabupaten Bandung Barat tersebut di atas digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

Gambar 3.6 Grafik Realisasi Belanja Tahun 2020



### 3.1.2.2. Realisasi Transfer Tahun 2020

Tabel 3.7 Realisasi Transfer Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
TRANSFER	425.864.298.375,00	165.331.546.148,00	38,82
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	40.045.292.595,00	38.518.706.534,00	96,19
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	385.819.005.780,00	126.812.839.614,00	32,87

Realisasi Transfer Tahun 2020 adalah sebesar Rp165.331.546.148,00 atau 38,82% dari Anggaran Transfer sebesar Rp425.864.298.375,00. Komposisi dari Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan terealisasi sebesar Rp38.518.706.534,00 atau 96,19% dari anggaran sebesar Rp40.045.292.595,00. Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp126.812.839.614,00 atau 32,87% dari anggaran sebesar Rp385.819.005.780,00. Pencapaian kinerja keuangan pada Realisasi Belanja Kabupaten Bandung Barat tersebut di atas digambarkan dalam grafik berikut ini.

Gambar 3.7 Grafik Realisasi Transfer Tahun 2020



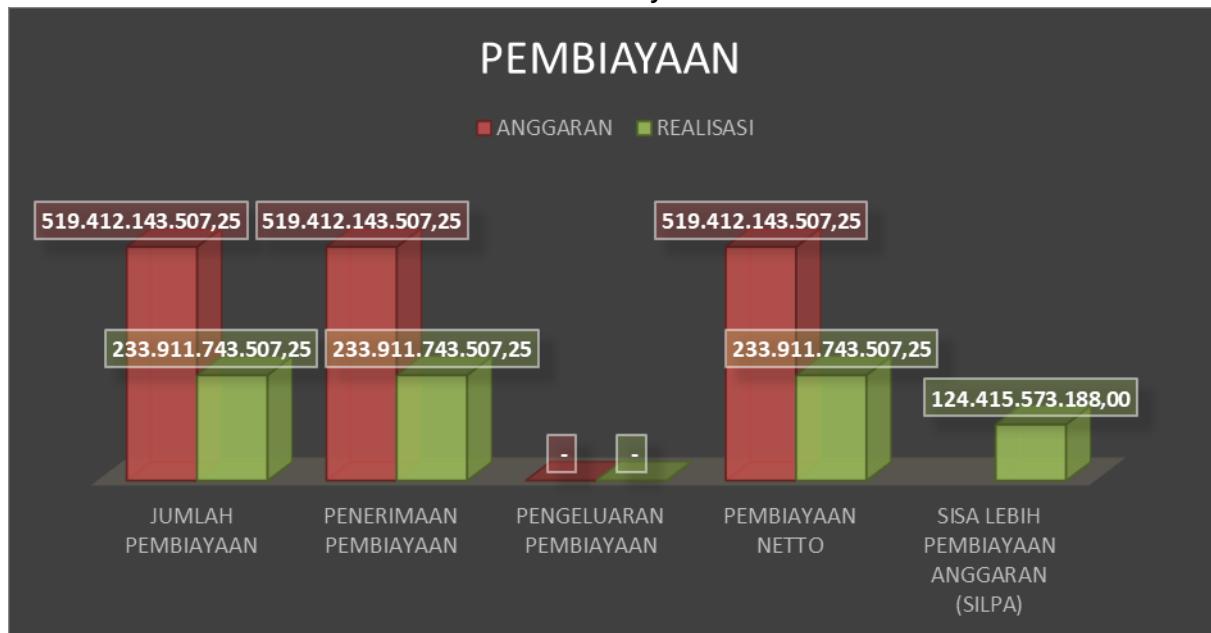
### 3.1.3. Realisasi Pembiayaan Tahun 2020

Tabel 3.8 Realisasi Pembiayaan Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
JUMLAH PEMBIAYAAN	519.412.143.507,25	233.911.743.507,25	45,03
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	519.412.143.507,25	233.911.743.507,25	45,03
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		-	-
PEMBIAYAAN NETTO	519.412.143.507,25	233.911.743.507,25	45,03
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		124.439.894.438,00	

Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bandung Barat tersebut di atas digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

**Gambar 3.8 Grafik Realisasi Pembiayaan Tahun 2020**



### 3.2. Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 (Refocusing)

#### I . Pengalokasian Ke-1

##### Dasar Hukum

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah tgl 2 April 2020

##### Alokasi Anggaran

Pada Pengalokasian ke-1 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggunakan anggaran yang tersedia:

- Dari pagu anggaran Belanja Tidak Terduga Murni sebesar Rp 10.500.669.044 setelah digunakan pada perubahan ketiga Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2020 anggaran Belanja Tidak Terduga yang tersedia sebesar Rp4.597.300.044,00 dialokasikan/ digunakan untuk covid sebesar Rp3.134.650.000
- Dari Anggaran Belanja SKPD dengan melakukan perubahan rincian alokasi pada DPA-SKPD sebesar Rp3.690.228.400 dengan rincian:
  1. Dinas Kesehatan (sumber dana DBHCHT) sebesar Rp2.794.697.000,00
  2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp226.037.500,00
  3. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp200.000.000,00
  4. Kantor SatpolPP dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp200.876.900,00
  5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp71.497.000,00

Laporan Pelaksanaan APBD TA. 2020 dan Laporan Belanja Tidak terduga dalam APBD TA. 2020 untuk penanganan Pandemi Covid-19 tersebut telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dengan Surat Bupati Bandung Barat Nomor 900/1451/BPKD tanggal 08 April 2020

## **II. Pengalokasian Ke-2 Dasar Hukum**

- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional Tanggal 9 April 2020. (terlampir)
- Surat Bupati Bandung Barat Nomor 900/940/BPKD tentang Percepatan Penyesuaian APBD TA. 2020. Tanggal 15 April 2020.

### **Alokasi Anggaran**

Pada pengalokasian ke-2 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan refocusing anggaran hampir diseluruh SKPD sesuai dengan Surat Keputusan Bersama dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah berkurang sebesar Rp208.755.000.000 semula dianggarkan sebesar Rp463.900.000.000,00 setelah refocusing menjadi sebesar Rp255.145.000.000,00
2. Dana Alokasi Umum berkurang sebesar Rp. 112.561.816.000,00 sesuai dengan PMK 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional semula dianggarkan sebesar Rp1.139.444.658.000,00 stelah refocusing menjadi sebesar Rp1.026.882.842.000,00.
3. Pendapatan bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Pusat bertambah sebesar Rp29.011.655.344,00 sesuai dengan PMK 35/PMK.07/2020
4. Dana Alokasi Khusus Berkurang sebesar Rp41.653.900,00 sesuai dengan PMK 35/PMK.07/2020
5. Dana Desa berkurang sebesar Rp1.783.742.215.656,00 sesuai dengan PMK 35/PMK.07/2020
6. Belanja Pegawai berkurang sebesar Rp127.190.317.418,00
7. Belanja Hibah berkurang sebesar Rp309.000.000,00
8. Belanja Bantuan Sosial berkurang sebesar Rp6.230.000.000,00
9. Belanja bagi Hasil Pajak dan retribusi kepada Pemerintah Desa Berkurang sebesar Rp20.875.500.000,00
10. Belanja Bantuan keuangan Kepada Pemerintah Desa berkurang sebesar Rp9.579.231.665,00
11. Belanja Tidak Terduga bertambah sebesar Rp139.230.000.000,00 semula sebesar Rp4.597.300.044,00 menjadi sebesar Rp143.827.300.044,00
12. Belanja Langsung SKPD berkurang sebesar Rp310.788.166.573

Dari hasil refocusing tersebut dialokasikan untuk Alokasi Penanganan Covid-19 sebesar Rp224.020.879.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Bidang Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan /atau penanganan COVID-19 sebesar Rp96.690.879.300,00 bersumber dari:
  - Belanja tidak terduga sebesar Rp14.815.650.000,00 di alokasikan untuk (isolasi mandiri darurat (makan dan minum), Tim gugus tugas, keamanan (dishub, polres, kodim), penyediaan peralatan kesehatan APD
  - Belanja Langsung SKPD sebesar Rp81.875.229.300,00
2. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp121.100.000.000,00 bersumber dari belanja tidak terduga
3. Penanganan Dampak ekonomi sebesar Rp6.230.000.000,00 bersumber dari belanja tidak terduga.

Laporan Hasil Penyesuaian refocusing APBD tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tanggal 23 April 2020 dengan surat Bupati Bandung Barat nomor 900/1017/BPKD

### **III. Pengalokasian Ke-3**

#### **Dasar Hukum**

- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA. 2020.
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 903./2477/BPKD tanggal 28 Mei 2020 Perihal Penyampaian Penyesuaian Rincian Dan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan TA. 2020

#### **Alokasi Anggaran**

- Pada Pengalokasian ke-3 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA. 2020 mendapatkan Pengurangan alokasi bagi hasil pajak dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 69.640.824.315,00 dan pengurangan bantuan keuangan dari provinsi sebesar Rp. 131.731.857.510,00
- Berdasarkan KepGub nomor 973/Kep.205-Bapenda/2020 tentang Kurang salur/lebih salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per31 Desember 2019n kepada pemerintah Kabupaten/Kota terdapat alokasi kurang salur sebesar Rp10.302.178.498,00. Sehingga terdapat pengurangan pendapatan sebesar Rp. 59.338.645.817,00.
- Dikarenakan adanya pengurangan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan refocusing anggaran yaitu dengan melakukaan pengurangan belanja yaitu belanja tidak terduga sebesar Rp. 59.338.645.817,00 yang semula dianggarkan sebesar Rp. 143.827.300.044 setelah refocusing menjadi sebesar Rp. 84.488.654.227,00.
- Dari Pengurangan Belanja Tidak Terduga tersebut sehingga berdampak terhadap pengalokasian anggaran untuk penanganan Covid-19 semula dianggarkan sebesar Rp224.020.879.300,00 menjadi sebesar Rp156.614.118.423,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Belanja Bidang Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan /atau penanganan COVID-19 sebesar Rp94.399.448.423,00 bersumber dari:
    - Belanja tidak terduga sebesar Rp12.524.219.123,00
    - Belanja Langsung SKPD sebesar Rp81.875.229.300,00

2. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp50.214.670.000,00 bersumber dari belanja tidak terduga
3. Penanganan Dampak ekonomi sebesar Rp 12.000.000.000,00 bersumber dari belanja tidak terduga.

Laporan Hasil Penyesuaian refocusing APBD tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat pada tanggal 9 Juni 2020 dengan nomor surat 910/225/BPKD

### **3.3 Hambatan dan Kendala yang dihadapi di dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan pada APBD Tahun 2020**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada APBD Tahun 2020, antara lain:

#### 1. Pendapatan Daerah

Kendala pencapaian target Pendapatan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

##### 1) Pajak Hotel

Pajak Hotel mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp8.177.548.001,00) atau (45,26%). Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan anggaran perubahan dan pandemi covid 19 yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

##### 2) Pajak Restoran

Pajak Restoran mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp9.378.655.900,00) atau (35,36%). Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan anggaran perubahan dan pandemi covid 19 yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

##### 3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp2.948.911.849,00) atau (68,30%). Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan anggaran perubahan dan pandemi covid 19 yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

##### 4) Pajak Reklame

Pajak Reklame mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp1.209.121.738,00) atau (23,96%). Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan anggaran perubahan.

##### 5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp56.857.935,00) atau (0,10%).

##### 6) Pajak Parkir

Pajak Parkir mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp1.173.095.453,00) atau (54,65%). Hal tersebut

disebabkan karena adanya penurunan anggaran perubahan dan pandemi covid 19 yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

7) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah merupakan salah satu pajak yang mengalami kenaikan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar Rp 3.288.534.382,00 atau 13,88%.

8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp342.205.200,00) atau (10,07%). Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan anggaran perubahan.

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp4.874.969.522,00) atau (5,16%). Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan anggaran perubahan.

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp23.325.175.682,00) atau (16,14%).

## 2. Retribusi Daerah

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Dari target yang ditetapkan pada TA.2020 sebesar Rp15.164.514.466,00 terealisasi sebesar Rp10.195.217.981,00 atau sebesar 67,23%, dan dibanding dengan Tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan sebesar (53,18%). Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 dengan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp4.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.486.154.500,00 atau sebesar 83% atau terjadi penurunan sebesar (17,02%) dibanding tahun sebelumnya.

c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp40.880.000,00 tidak terealisasi sebesar 100,00%.

d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp594.836.350,00 terealisasi sebesar Rp155.151.000,00 atau sebesar 28,08%. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi. Dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (44,06%), dikarenakan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi Covid19.

e. Retribusi Pelayanan Pasar

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp696.141.400,00 terealisasi sebesar Rp492.083.000,00 atau sebesar 70,69%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pemungutan retribusi masih belum optimal. Dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (28,31%), dikarenakan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi Covid19.

f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp3.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.916.050.000,00 atau sebesar 54,74%. Dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penaikan sebesar 25,56%.

g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp13.286.000,00 terealisasi sebesar 8.918.000,00 atau sebesar 67,12%. Dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (35,13%).

h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp104.200.000,00 atau sebesar 104,20%. Dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (41,12%).

i. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Dari target yang ditetapkan pada TA.2020 sebesar Rp157.167.800,00 terealisasi sebesar Rp65.000.000,00 atau sebesar 41,36%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (58,86%).

j. Retribusi Terminal

Dari target yang ditetapkan pada TA.2020 sebesar Rp565.202.500,00 terealisasi sebesar Rp177.823.000,00 atau sebesar 31,46%. Dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (45,15%).

k. Retribusi Rumah Potong Hewan

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp186.500.000,00 terealisasi sebesar Rp144.560.000,00 atau sebesar 61,43%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (50,82%).

l. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp107.206.000,00 atau sebesar 71,47%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (17,24%), dikarenakan kenaikan anggaran dan pandemi Covid19 dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hal ini menyebakan penurunan wisatawan ke tempat-tempat rekreasi dan olah raga.

m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Dari target yang ditetapkan pada TA 2019 sebesar Rp121.000.000,00 terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau sebesar 16,52%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan sebesar (83,47%).

n. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp10.153.562.260,00 terealisasi sebesar Rp7.105.053.549,00 atau sebesar 69,98%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (0,30%).

o. Retribusi Izin Trayek

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp119.882.600,00 terealisasi sebesar Rp40.000.000,00 atau sebesar 33,37%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (46,67%).

p. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp131.793.300,00 terealisasi sebesar Rp188.174.870 atau sebesar 142,78%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (10,24%).

q. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp2.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.161.371.600,00 atau sebesar 126,45%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 132,31%. Hal ini disebabkan banyaknya tenaga asing yang masuk dikarenakan adanya proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

r. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp137.500.000,00 terealisasi sebesar Rp173.287.000,00 atau sebesar 126,03%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 11,57%.

### 3. Belanja Daerah

Hambatan dan kendala dalam penyerapan belanja daerah sehingga prosentase capaiannya belum maksimal diantaranya adalah:

- a. Adanya beberapa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat namun pada akhir tahun tidak sempat dibayarkan karena adanya pembatasan waktu pelayanan dari perbankan.
- b. Adanya efisiensi belanja kegiatan dalam ranngka penanganan Pandemi Covid 19

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Struktur APBD TA 2019 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan kebijakan akuntansi yang berlaku untuk Entitas pelaporan yaitu Bupati sebagai Kepala Daerah yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan wewenang kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Selanjutnya kebijakan akuntansi yang berlaku untuk Entitas akuntansi yaitu OPD dan PPKD. Untuk TA 2020, entitas akuntansi di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah PPKD, OPD dan BUMD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan dan Permukiman
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Dinas Sosial
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
23. Dinas Perikanan dan Peternakan
24. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
25. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
28. Kepala dan Wakil Kepala Daerah
29. Sekretariat Daerah
30. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
31. Kecamatan Ngamprah
32. Kecamatan Cipatat
33. Kecamatan Batujajar
34. Kecamatan Padalarang
35. Kecamatan Sindangkerta
36. Kecamatan Cipongkor
37. Kecamatan Gununghalu
38. Kecamatan Rongga
39. Kecamatan Cililin
40. Kecamatan Cikalang Wetan
41. Kecamatan Cipeundeuy
42. Kecamatan Parongpong
43. Kecamatan Cisarua
44. Kecamatan Lembang
45. Kecamatan Cihampelas
46. Kecamatan Saguling
47. Inspektorat Daerah
48. Badan Perencanaan, Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah

49. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
50. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
51. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
52. BLUD

LKPD ini tidak mencakup entitas:

1. Pemerintah Pusat; dan
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan OPD Kabupaten Bandung Barat disusun berdasarkan basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
  - a. Asumsi kemandirian entitas;
  - b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
  - c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
2. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.
  - a. **Relevan**, dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
  - 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
  - 3) Tepat waktu
  - 4) Lengkap.
- b. **Andal**, di mana informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:
- 1) Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
  - 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh;
  - 3) Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- c. **Dapat dibandingkan**, di mana informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.
- d. **Dapat dipahami**, di mana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

3. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan: dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat:
- a. Basis akuntansi: basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
  - b. Prinsip nilai historis (*historical cost*): aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan SKPD A Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
  - c. Prinsip realisasi (*realization*): bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.
  - d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*): informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - e. Prinsip periodisitas (*periodicity*): Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.
  - f. Prinsip konsistensi (*consistency*): Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan

informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- g. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*): laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atau Catatan atas Laporan Keuangan.
  - h. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation*): Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.
4. Kendala informasi yang relevan dan andal: kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu:
    - a. Materialitas: walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
    - b. Pertimbangan biaya dan manfaat: manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

- c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif: keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.
- 5. Pengakuan unsur laporan keuangan: pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
  - a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
  - b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
  - c. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.
- 6. Kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi: dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.
- 7. Keandalan pengukuran: kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.
- 8. Pengakuan Aset:

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat setelah periode akuntansi berjalan.

9. Pengakuan Kewajiban:

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

10. Pengakuan Pendapatan:

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

11. Pengakuan Beban dan Belanja:

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

12. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan:

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening dalam laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan serta mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Di dalam Kebijakan Akuntansi ini memuat Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan Kebijakan Akuntansi untuk setiap akun dalam Laporan Keuangan.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran 1.01. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Kerangka tersebut di atas dapat dimaknai bahwa Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Memenuhi Ketentuan dimaksud, maka Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 memberikan gambaran ringkas pencapaian kebijakan keuangan dan target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat TA 2020. Selain itu, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disinkronkan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi satu kesatuan (*omnibus regulation*) dan pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, berikut kami ungkapkan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

## 5.1. Penjelasan Pos-PoS Laporan Realisasi APBD

### 5.1.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi APBD

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan. Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto. Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran TA 2020**

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN - LRA</b>	<b>2.839.696.975.775,00</b>	<b>2.530.168.878.201,68</b>	<b>89,10</b>	<b>2.902.841.293.218,00</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	424.427.563.825,00	464.817.974.826,68	109,52	528.087.033.271,00
PENDAPATAN TRANSFER	2.219.995.211.950,00	1.870.003.233.375,00	84,23	2.206.258.579.947,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	195.274.200.000,00	195.347.670.000,00	100,04	168.495.680.000,00
<b>BELANJA</b>	<b>2.933.244.820.907,25</b>	<b>2.474.309.181.122,93</b>	<b>84,35</b>	<b>2.464.754.796.102,93</b>
BELANJA OPERASI	2.051.401.251.251,00	1.934.668.372.008,93	94,31	2.125.276.307.709,30
BELANJA MODAL	798.841.835.075,00	465.456.844.575,00	58,27	338.001.326.883,63
BELANJA TAK TERDUGA	83.001.734.581,25	74.183.964.539,00	89,38	1.477.161.510,00
<b>TRANSFER</b>	<b>425.864.298.375,00</b>	<b>165.331.546.148,00</b>	<b>38,82</b>	<b>476.238.022.448,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT)</b>	<b>(519.412.143.507,25)</b>	<b>(109.471.849.069,25)</b>	<b>21,08</b>	<b>(38.151.525.332,93)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>519.412.143.507,25</b>	<b>233.911.743.507,25</b>	<b>45,03</b>	<b>272.063.268.840,18</b>
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	519.412.143.507,25	233.911.743.507,25	45,03	272.063.268.840,18
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>519.412.143.507,25</b>	<b>233.911.743.507,25</b>	<b>45,03</b>	<b>272.063.268.840,18</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>124.439.894.438,00</b>	<b>100,00</b>	<b>233.911.743.507,25</b>

### 5.1.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi APBD

#### 5.1.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
  - a. Hasil Pajak Daerah;
  - b. Hasil Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
  - d. Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, yaitu:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya;
  - c. Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu:
  - a. Pendapatan Hibah;
  - b. Dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020, diperoleh realisasi total Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp2.530.168.878.201,68 atau mencapai 89,10% dari anggaran Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp2.839.696.975.775,00. Total Penerimaan Pendapatan Daerah untuk periode dimaksud terdiri dari:

#### 5.1.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (Pad) - LRA

	TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp		%
	<b>424.427.563.825,00</b>	<b>464.817.974.826,68</b>	<b>109,52</b>	<b>528.087.033.271,00</b>	<b>(63.269.058.444,32)</b>	<b>(11,98)</b>	
Realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 sebesar Rp464.812.971.708,68 atau mencapai 109,52% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah pada TA 2020 yang telah ditetapkan sebesar Rp424.427.563.825,00. Penerimaan PAD TA 2020 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp63.274.061.562,00) atau 11,98% dengan rincian :							
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	271.518.594.949,00	330.898.929.358,00	121,87	379.096.936.256,00	(48.198.006.898,00)	(12,71)	
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	38.532.266.676,00	27.510.250.500,00	71,40	38.560.684.794,00	(11.050.434.294,00)	(28,66)	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	494.842.021,00	494.842.021,00	100,00	470.526.236,00	24.315.785,00	5,17	
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	113.881.860.179,00	105.913.952.947,68	93,00	109.958.885.985,00	(4.044.933.037,32)	(3,68)	
<b>Jumlah</b>	<b>424.427.563.825,00</b>	<b>464.817.974.826,68</b>	<b>386,27</b>	<b>528.087.033.271,00</b>	<b>(63.269.058.444,32)</b>	<b>(11,98)</b>	

Berdasarkan data tersebut diatas terjadi penurunan pada semua komponen PAD terkecuali Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Berdasarkan data tersebut di atas, tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena ada beberapa obyek retribusi yang realisasinya masih rendah; seperti Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan sebesar Rp38.532.266.676,00 terealisasi sebesar Rp27.510.250.500,00 atau hanya mencapai 71,40% dari target yang ditetapkan, Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan sebesar Rp113.881.860.179,00 terealisasi sebesar Rp105.913.952.947,68 atau hanya mencapai 93,00% dari target yang ditetapkan, sedangkan untuk Pajak Daerah tercapai 121,87% tetapi apabila dibandingkan dengan realisasi 2019 mengalami penurunan dikarenakan jumlah anggaran TA.2020 mengalami penurunan.

#### 5.1.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

	TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp		%
	<b>271.518.594.949,00</b>	<b>330.898.929.358,00</b>	<b>121,87</b>	<b>379.096.936.256,00</b>	<b>(48.198.006.898,00)</b>	<b>(12,71)</b>	
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA.2020 adalah sebesar Rp330.898.929.358,00 atau 121,87% dari target penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp271.518.594.949,00. Penerimaan Pajak Daerah TA 2020 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp48.198.006.898,00) atau 12,71% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp379.096.936.256,00 dengan rincian sebagai berikut:							
Pajak Hotel - LRA	7.639.630.963,00	9.892.119.987,00	129,48	18.069.667.988,00	(8.177.548.001,00)	(45,26)	
Pajak Restoran - LRA	13.942.977.034,00	17.141.314.432,00	122,94	26.519.970.332,00	(9.378.655.900,00)	(35,36)	
Pajak Hiburan - LRA	1.188.578.256,00	1.368.410.667,00	115,13	4.317.322.516,00	(2.948.911.849,00)	(68,30)	
Pajak Reklame - LRA	3.260.168.489,00	3.836.754.570,00	117,69	5.045.876.308,00	(1.209.121.738,00)	(23,96)	
Pajak Penerangan Jalan - LRA	55.819.137.924,00	56.822.008.239,00	101,80	56.878.866.174,00	(56.857.935,00)	(0,10)	
Pajak Parkir - LRA	819.108.221,00	973.436.494,00	118,84	2.146.531.947,00	(1.173.095.453,00)	(54,65)	
Pajak Air Tanah – LRA	23.676.984.522,00	26.982.728.979,00	113,96	23.694.194.597,00	3.288.534.382,00	13,88	
Pajak Mineral Bukan	2.868.569.480,00	3.055.224.479,00	106,51	3.397.429.679,00	(342.205.200,00)	(10,07)	

Logam dan Batuan –							
LRA							
Pajak Bumi dan	77.500.000.000,00	89.601.653.360,00	115,62	94.476.622.882,00	(4.874.969.522,00)	(5,16)	
Bangunan Pedesaan							
dan Perkotaan - LRA							
Bea Perolehan Hak	84.803.440.060,00	121.225.278.151,00	142,95	144.550.453.833,00	(23.325.175.682,00)	(16,14)	
Atas Tanah dan							
Bangunan (BPHTB) –							
LRA							
<b>Jumlah</b>	<b>271.518.594.949,00</b>	<b>330.898.929.358,00</b>	<b>121,87</b>	<b>379.096.936.256,00</b>	<b>(48.198.006.898,00)</b>	<b>(12,71)</b>	

Menurut Ketentuan Umum pada Bab 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan 10 obyek pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, seluruh obyek pajak tersebut mengalami penurunan penerimaan terkecuali Pajak Air Tanah dibandingkan dengan penerimaan TA.2019 terkecuali Pajak Air Tanah dengan uraian sebagai berikut:

11) Pajak Hotel

Pajak Hotel mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp8.177.548.001,00) atau (45,26%). Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan anggaran perubahan dan pandemi covid 19 yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

12) Pajak Restoran

Pajak Restoran mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp9.378.655.900,00) atau (35,36%). Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan anggaran perubahan dan pandemi covid 19 yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

13) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp2.948.911.849,00) atau (68,30%). Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan anggaran perubahan dan pandemi covid 19 yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

14) Pajak Reklame

Pajak Reklame mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp1.209.121.738,00) atau (23,96%). Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan anggaran perubahan.

15) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp56.857.935,00) atau (0,10%).

16) Pajak Parkir

Pajak Parkir mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp1.173.095.453,00) atau (54,65%). Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan anggaran perubahan dan pandemi covid 19 yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

17) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah merupakan salah satu pajak yang mengalami kenaikan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar Rp 3.288.534.382,00 atau 13,88%.

18) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp342.205.200,00) atau (10,07%). Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan anggaran perubahan.

19) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2) mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp4.874.969.522,00) atau (5,16%). Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan anggaran perubahan.

20) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami penurunan penerimaan di Tahun 2020 dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2019 sebesar (Rp23.325.175.682,00) atau (16,14%).

Seluruh penerimaan realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk periode dimaksud, merupakan tanggung jawab serta kewenangan pengelolaan Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku OPD.

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020 berasal dari penerimaan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya dan penerimaan pajak Tahun 2020, dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2015 - 2020**

Uraian	Penerimaan Piutang Pajak Daerah						Jumlah
	< 2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>							
Pajak Hotel – LRA	-	-	535.000,00	520.000,00	231.870.109,00	9.659.194.878,00	9.892.119.987,00
Pajak Restoran - LRA	-	-	904.000,00	-	210.822.753,00	16.929.587.679,00	17.141.314.432,00
Pajak Hiburan - LRA	-	-	-	-	45.150.296,00	1.323.260.371,00	1.368.410.667,00
Pajak Reklame - LRA	-	-	-	-	45.569.676,00	3.791.184.894,00	3.836.754.570,00
Pajak Penerangan Jalan - LRA	-	-	-	68.585,00	10.224,00	56.821.929.430,00	56.822.008.239,00
Pajak Parkir - LRA	225.000,00	-	-	-	51.749.401,00	921.462.093,00	973.436.494,00
Pajak Air Tanah - LRA	120.625.176,00	-	347.726.333,00	17.233.113,00	942.757.137,00	25.554.387.220,00	26.982.728.979,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	-	-	-	-	115.902.278,00	2.939.322.201,00	3.055.224.479,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	4.258.616.345,00	919.732.459,00	1.173.441.392,00	1.419.116.070,00	5.961.657.397,00	75.869.089.697,00	89.601.653.360,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	-	-	-	-	-	121.225.278.151,00	121.225.278.151,00
<b>J U M L A H</b>	<b>4.379.466.521,00</b>	<b>919.732.459,00</b>	<b>1.522.606.725,00</b>	<b>1.436.937.768,00</b>	<b>7.605.489.271,00</b>	<b>315.034.696.614,00</b>	<b>330.898.929.358,00</b>

Informasi lebih lanjut mengenai rincian pendapatan Pajak Daerah per rincian objek TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam **Lampiran 1** sebagai bagian dari CaLK.

#### 5.1.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

	TA 2020			TA 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%	
	271.518.594.949,00	330.898.929.358,00	121,87	379.096.936.256,00	(48.198.006.898,00)	(12,71)	
<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LRA</b>	<b>38.532.266.676,00</b>	<b>27.510.250.500,00</b>	<b>71,40</b>	<b>38.560.684.794,00</b>	<b>(11.050.434.294,00)</b>	<b>(28,66)</b>	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.164.514.466,00	10.195.217.981,00	67,23	21.776.946.831,00	(11.581.728.850,00)	(53,18)	
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.200.000.000,00	3.486.154.500,00	83,00	4.201.228.100,00	(715.073.600,00)	(17,02)	
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	40.880.000,00	-	-	9.050.000,00	(9.050.000,00)	(100,00)	
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	594.836.350,00	155.151.000,00	26,08	277.332.000,00	(122.181.000,00)	(44,06)	
Retribusi Pelayanan Pasar	696.141.400,00	492.083.000,00	70,69	686.391.000,00	(194.308.000,00)	(28,31)	
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.500.000.000,00	1.916.050.000,00	54,74	1.526.040.000,00	390.010.000,00	25,56	
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	13.286.000,00	8.918.000,00	67,12	13.746.500,00	(4.828.500,00)	(35,13)	
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	104.200.000,00	104,20	176.979.100,00	(72.779.100,00)	(41,12)	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	157.167.800,00	65.000.000,00	41,36	158.000.000,00	(93.000.000,00)	(58,86)	
Retribusi Terminal	565.202.500,00	177.823.000,00	31,46	324.173.000,00	(146.350.000,00)	(45,15)	
Retribusi Rumah Potong Hewan	186.500.000,00	114.560.000,00	61,43	232.926.200,00	(118.366.200,00)	(50,82)	
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	150.000.000,00	107.206.000,00	71,47	129.537.000,00	(22.331.000,00)	(17,24)	
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	121.000.000,00	20.000.000,00	16,53	121.000.000,00	(101.000.000,00)	(83,47)	
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.153.562.260,00	7.105.053.549,00	69,98	7.126.552.665,00	(21.499.116,00)	(0,30)	
Retribusi Izin Trayek	119.882.600,00	40.000.000,00	33,37	75.000.000,00	(35.000.000,00)	(46,67)	
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	131.793.300,00	188.174.870,00	142,78	209.643.398,00	(21.468.528,00)	(10,24)	
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2.500.000.000,00	3.161.371.600,00	126,45	1.360.821.000,00	1.800.550.600,00	132,31	
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan	137.500.000,00	173.287.000,00	126,03	155.318.000,00	17.969.000,00	11,57	
<b>Jumlah</b>	<b>38.532.266.676,00</b>	<b>27.510.250.500,00</b>	<b>121,87</b>	<b>38.560.684.794,00</b>	<b>(11.050.434.294,00)</b>	<b>(12,71)</b>	

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Bandung Barat TA.2020, terdapat delapan belas obyek retribusi daerah. Dari delapan belas obyek tersebut, lima belas obyek retribusi mengalami

penurunan penerimaan dan tiga obyek retribusi mengalami penaikan dibandingkan dengan TA.2019, dengan uraian sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Dari target yang ditetapkan pada TA.2020 sebesar Rp15.164.514.466,00 terealisasi sebesar Rp10.195.217.981,00 atau sebesar 67,23%, dan dibanding dengan Tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan sebesar (53,18%). Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 dengan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp4.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.486.154.500,00 atau sebesar 83% atau terjadi penurunan sebesar (17,02%) dibanding tahun sebelumnya.

3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp40.880.000,00 tidak terealisasi sebesar 100,00%.

4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp594.836.350,00 terealisasi sebesar Rp155.151.000,00 atau sebesar 28,08%. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi. Dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (44,06%), dikarenakan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi Covid19.

5) Retribusi Pelayanan Pasar

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp696.141.400,00 terealisasi sebesar Rp492.083.000,00 atau sebesar 70,69%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pemungutan retribusi masih belum optimal. Dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (28,31%), dikarenakan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi Covid19.

6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp3.5000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.916.050.000,00 atau sebesar 54,74%. Dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penaikan sebesar 25,56%.

7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp13.286.000,00 terealisasi sebesar 8.918.000,00 atau sebesar 67,12%. Dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (35,13%).

8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp104.200.000,00 atau sebesar 104,20%. Dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (41,12%).

- 9) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  
Dari target yang ditetapkan pada TA.2020 sebesar Rp157.167.800,00 terealisasi sebesar Rp65.000.000,00 atau sebesar 41,36%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (58,86%).
- 10) Retribusi Terminal  
Dari target yang ditetapkan pada TA.2020 sebesar Rp565.202.500,00 terealisasi sebesar Rp177.823.000,00 atau sebesar 31,46%. Dibandingkan dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (45,15%).
- 11) Retribusi Rumah Potong Hewan  
Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp186.500.000,00 terealisasi sebesar Rp144.560.000,00 atau sebesar 61,43%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (50,82%).
- 12) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga  
Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp107.206.000,00 atau sebesar 71,47%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (17,24%), dikarenakan kenaikan anggaran dan pandemi Covid19 dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hal ini menyebakan penurunan wisatawan ke tempat-tempat rekreasi dan olah raga.
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah  
Dari target yang ditetapkan pada TA 2019 sebesar Rp121.000.000,00 terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau sebesar 16,52%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan sebesar (83,47%).
- 14) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  
Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp10.153.562.260,00 terealisasi sebesar Rp7.105.053.549,00 atau sebesar 69,98%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (0,30%).
- 15) Retribusi Izin Trayek  
Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp119.882.600,00 terealisasi sebesar Rp40.000.000,00 atau sebesar 33,37%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (46,67%).
- 16) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas  
Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp131.793.300,00 terealisasi sebesar Rp188.174.870 atau sebesar 142,78%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar (10,24%).
- 17) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)  
Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp2.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.161.371.600,00 atau sebesar 126,45%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 132,31%. Hal ini disebabkan banyaknya tenaga asing yang masuk dikarenakan adanya proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

- 18) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan

Dari target yang ditetapkan pada TA 2020 sebesar Rp137.500.000,00 terealisasi sebesar Rp173.287.000,00 atau sebesar 126,03%. Dibanding dengan Tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 11,57%.

OPD yang memiliki kewenangan atas pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap Retribusi Daerah TA 2020, sebagai berikut:

**Tabel 5.3 Pendapatan Retribusi Per OPD Tahun 2020**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	SKPD Pengelola
1	2	3	4	5
4.1.2.	<b>Pendapatan Retribusi Daerah – LRA</b>	<b>38.532.266.676,00</b>	<b>27.510.250.500,00</b>	
4.1.2.01.	<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA</b>	<b>15.164.514.466,00</b>	<b>10.195.217.981,00</b>	Dinas Kesehatan
4.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas – LRA	2.800.000.000,00	956.244.000,00	
4.1.2.01.05.	Rumah Sakit Umum Daerah – LRA	8.164.514.466,00	7.941.438.808,00	
4.1.2.01.06.	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda – LRA	4.200.000.000,00	1.297.535.173,00	
4.1.2.02.	<b>Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LRA</b>	<b>4.200.000.000,00</b>	<b>3.486.154.500,00</b>	DLH
4.1.2.02.01.	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara – LRA	4.200.000.000,00	3.486.154.500,00	
4.1.2.04.	<b>Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LRA</b>	<b>40.880.000,00</b>	<b>-</b>	Disperkim
4.1.2.04.01.	Pelayanan Penguburan/Pemakaman – LRA	40.880.000,00	<b>-</b>	
4.1.2.05.	<b>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA</b>	<b>594.836.350,00</b>	<b>155.151.000,00</b>	Dishub
4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	594.836.350,00	155.151.000,00	
4.1.2.06.	<b>Retribusi Pelayanan Pasar – LRA</b>	<b>696.141.400,00</b>	<b>492.083.000,00</b>	Disperindag
4.1.2.06.02.	Los – LRA	279.538.800,00	199.406.000,00	
4.1.2.06.03.	Kios – LRA	416.602.600,00	292.677.000,00	
4.1.2.07.	<b>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>1.916.050.000,00</b>	Dishub
4.1.2.07.08.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck – LRA	3.500.000.000,00	1.916.050.000,00	
4.1.2.08.	<b>Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LRA</b>	<b>13.286.000,00</b>	<b>8.918.000,00</b>	Disperkim
4.1.2.08.01.	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran – LRA	13.286.000,00	8.918.000,00	
4.1.2.12.	<b>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LRA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	Disperindag
4.1.2.12.03.	Retribusi Tera/ Tera Ulang	100.000.000,00	104.200.000,00	
4.1.2.15.	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA</b>	<b>157.167.800,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	Dinas PUPR
4.1.2.15.05.	Alat Berat/Alat Besar dan Peralatan Bengkel – LRA	157.167.800,00	65.000.000,00	
4.1.2.18.	<b>Retribusi Terminal – LRA</b>	<b>565.202.500,00</b>	<b>177.823.000,00</b>	Dishub
4.1.2.18.03.	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal – LRA	565.202.500,00	177.823.000,00	
4.1.2.21.	<b>Retribusi Rumah Potong Hewan – LRA</b>	<b>186.500.000,00</b>	<b>114.560.000,00</b>	Dinas Pernakan
4.1.2.21.01.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong – LRA	186.500.000,00	114.560.000,00	
4.1.2.23.	<b>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>107.206.000,00</b>	Disparbud
4.1.2.23.01.	Pelayanan Tempat Rekreasi – LRA	150.000.000,00	107.206.000,00	
4.1.2.25.	<b>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA</b>	<b>121.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	Dinas Pernakan
4.1.2.25.01.	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah – LRA	121.000.000,00	20.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	SKPD Pengelola
1	2	3	4	5
4.1.2.26.	<b>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA</b>	<b>10.153.562.260,00</b>	<b>7.105.053.549,00</b>	Dinas PUPR & 13 Kec.
4.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan – LRA	10.153.562.260,00	7.105.053.549,00	
4.1.2.29.	<b>Retribusi Izin Trayek – LRA</b>	<b>119.882.600,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	Dishub
4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi – LRA	119.882.600,00	40.000.000,00	
4.1.2.31.	<b>Retribusi Pengendalian Lalu Lintas – LRA</b>	<b>131.793.300,00</b>	<b>188.174.870,00</b>	Dishub
4.1.2.31.02.	Penggunaan koridor tertentu –LRA	131.793.300,00	188.174.870,00	
4.1.2.32.	<b>Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LRA</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>3.161.371.600,00</b>	Disnaker
4.1.2.32.01.	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing – LRA	2.500.000.000,00	3.161.371.600,00	
4.1.2.33.	<b>Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan</b>	<b>137.500.000,00</b>	<b>173.287.000,00</b>	Dinas Pernakan
4.1.2.33.01.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan	137.500.000,00	173.287.000,00	

#### 5.1.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	TA. 2020			TA 2019			Kenaikan/ (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	Rp	%		
	494.842.021,00	494.842.021,00	100,00	470.526.236,00	24.315.785,00	5,17		
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 adalah sebesar Rp494.8420.21,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp494.8420.21,00.								
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyerahan modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA	494.842.021,00	494.842.021,00	100,00	470.526.236,00	24.315.785,00	5,17		
<b>Jumlah</b>	<b>494.842.021,00</b>	<b>494.842.021,00</b>	<b>100,00</b>	<b>470.526.236,00</b>	<b>24.315.785,00</b>	<b>5,17</b>		

Nilai tersebut merupakan pendapatan dari pembagian dividen saham atas keuntungan Bank BJB (sesuai dengan Surat Direksi Bank BJB Nomor 265/DIR-CSE/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019).

Berdasarkan hasil RUPS, penggunaan Laba Bersih Tahun 2019 untuk pembayaran dividen tunai adalah sebesar Rp925.042.768.877,00 (setelah pembulatan) atau 60,00% dari total Laba Bersih sebesar Rp1.541.853.722.752,00. Dengan dividen sebesar Rp925.042.768.877,00 dan jumlah saham Bank BJB (saham seri A dan saham seri B) yang telah dikeluarkan sebanyak 9.838.787.161 lembar saham maka besarnya dividen per lembar saham adalah sebesar Rp94,20. Jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebanyak 5.263.157 lembar saham, sehingga dividen tunai yang diterima adalah sebesar Rp494.842.021,00. Bank BJB telah mentransfer pembayaran dividen tunai sebesar Rp494.842.021,00 ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 20 Mei 2020.

#### 5.1.2.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah – LRA

	TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp		
	113.881.860.179,00	105.913.952.947,68	93,00	109.958.885.985,00	(4.044.933.037,32)		(3,68)

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 adalah sebesar Rp105.913.952.947,68 atau mencapai 93,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp113.881.860.179,00.

Dibandingkan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019, mengalami penurunan sebesar (Rp4.044.933.037,32) atau (3,68%) dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	217.460.000,00	100,00	6.934.945,00	210.525.055,00	3.035,71
Penerimaan Jasa Giro	11.000.000.000,00	5.374.009.051,00	48,85	7.777.071.478,00	(2.403.062.427,00)	(30,90)
Pendapatan Bunga	13.701.978.365,00	8.512.158.468,00	62,12	17.002.114.479,00	(8.489.956.011,00)	(49,93)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	25.000.000,00	100,00	31.500.000,00	(6.500.000,00)	(20,63)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	219.219.068,00	100,00	218.089.435,00	1.129.633,00	0,52
Pendapatan Denda Pajak	-	2.191.046.836,00	100,00	3.998.227.589,00	(1.807.180.753,00)	(45,20)
Pendapatan Denda Retribusi	-	11.839.750,00	100,00	8.262.000,00	3.577.750,00	43,30
Pendapatan dari Pengembalian	-	1.457.485.958,00	100,00	2.972.066.789,00	(1.514.580.831,00)	(50,96)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	142.032.500,00	100,00	142.032.500,00	-	-
Pendapatan BLUD	49.772.270.698,00	46.504.529.249,00	93,43	34.938.725.787,00	11.565.803.462,00	33,10
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	73.647.976,68	100,00	19.640.241,00	54.007.735,68	274,99
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	37.490.909.400,00	38.918.822.375,00	103,81	41.020.741.839,00	(2.101.919.464,00)	(5,12)
Pemanfaatan Aset Daerah	1.916.701.716,00	2.266.701.716,00	118,26	1.823.478.903,00	443.222.813,00	24,31
<b>Jumlah</b>	<b>113.881.860.179,00</b>	<b>105.913.952.947,68</b>	<b>93,00</b>	<b>109.958.885.985,00</b>	<b>(4.044.933.037,32)</b>	<b>(3,68)</b>

Adapun OPD yang memiliki kewenangan atas pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4 Lain-lain PAD yang Sah - LRA Per OPD Tahun 2020**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	SKPD Pengelola
1	2	3	4	5
<b>4.1.4.</b>	<b>Lain-lain PAD Yang Sah – LRA</b>	<b>113.881.860.179,00</b>	<b>105.908.949.829,68</b>	
<b>4.1.4.01.</b>	<b>Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA</b>		<b>- 217.460.000,00</b>	
<b>4.1.4.01.02.</b>	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin – LRA		<b>- 217.460.000,00</b>	BPKD
<b>4.1.4.03.</b>	<b>Penerimaan Jasa Giro – LRA</b>	<b>11.000.000.000,00</b>	<b>5.374.009.051,00</b>	
<b>4.1.4.03.01.</b>	Jasa Giro Kas Daerah (Bank Jabar) – LRA	11.000.000.000,00	4.728.259.725,00	BPKD
<b>4.1.4.03.02.</b>	Jasa Giro Bendahara – LRA		<b>- 645.749.326,00</b>	BPKD
<b>4.1.4.03.15.</b>	Jasa Giro Simpanan Dana BOS SD dan SMP		<b>- -</b>	BPKD
<b>4.1.4.04.</b>	<b>Pendapatan Bunga – LRA</b>	<b>13.701.978.365,00</b>	<b>8.512.158.468,00</b>	
<b>4.1.4.04.01.</b>	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Jabar – LRA	13.701.978.365,00	8.512.158.468,00	BPKD
<b>4.1.4.04.03.</b>	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank BRI – LRA		<b>- -</b>	BPKD
<b>4.1.4.05.</b>	<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LRA</b>		<b>- 25.000.000,00</b>	
<b>4.1.4.05.02.</b>	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Barang – LRA		<b>- 25.000.000,00</b>	BPKD
<b>4.1.4.07.</b>	<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA</b>		<b>- 219.219.068,00</b>	
<b>4.1.4.07.01.</b>	Bidang Pendidikan – LRA		<b>- 76.681.150,00</b>	BPKD
<b>4.1.4.07.02.</b>	Bidang Kesehatan – LRA		<b>- 27.638.271,00</b>	BPKD
<b>4.1.4.07.03.</b>	Bidang Pekerjaan Umum – LRA		<b>- 86.524.732,00</b>	BPKD
<b>4.1.4.07.05.</b>	Bidang Penataan Ruang – LRA		<b>- -</b>	BPKD
<b>4.1.4.07.13.</b>	Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan – LRA		<b>- 6.688.695,00</b>	BPKD
<b>4.1.4.07.14.</b>	Bidang Kearsipan dan Perpustakaan – LRA		<b>- 21.686.220,00</b>	BPKD
<b>4.1.4.08.</b>	<b>Pendapatan Denda Pajak – LRA</b>		<b>- 2.191.046.836,00</b>	
<b>4.1.4.08.06.</b>	Pendapatan Denda Pajak Hotel – LRA		<b>- 22.570.639,00</b>	BPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	SKPD Pengelola
1	2	3	4	5
4.1.4.08.07.	Pendapatan Denda Pajak Restoran – LRA	-	40.746.755,00	BPKD
4.1.4.08.08.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan – LRA	-	5.653.483,00	BPKD
4.1.4.08.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame – LRA	-	5.999.854,00	BPKD
4.1.4.08.10.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan – LRA	-	73.834,00	BPKD
4.1.4.08.11.	Pendapatan Denda Pajak Parkir – LRA	-	6.886.747,00	BPKD
4.1.4.08.12.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah – LRA	-	25.391.506,00	BPKD
4.1.4.08.14.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	-	9.116.011,00	BPKD
4.1.4.08.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	-	2.074.608.007,00	BPKD
<b>4.1.4.09.</b>	<b>Pendapatan Denda Retribusi – LRA</b>	<b>-</b>	<b>11.839.750,00</b>	
4.1.4.09.26.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	-	11.839.750,00	BPKD
<b>4.1.4.13.</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>-</b>	<b>1.457.485.958,00</b>	
4.1.4.13.03.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan – LRA	-	96.446.630,00	BPKD
4.1.4.13.04.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas – LRA	-	-	BPKD
4.1.4.13.05.	Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka - LRA	-	907.650,00	BPKD
4.1.4.13.06.	Pendapatan dari Pengembalian Belanja – LRA	-	1.243.974.438,00	BPKD
4.1.4.13.07.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran TASPEN – LRA	-	116.157.240,00	BPKD
<b>4.1.4.16.</b>	<b>Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LRA</b>	<b>-</b>	<b>142.032.500,00</b>	
4.1.4.16.01.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA	-	142.032.500,00	BPKD
<b>4.1.4.18.</b>	<b>Pendapatan BLUD – LRA</b>	<b>49.772.270.698,00</b>	<b>46.504.529.249,00</b>	
4.1.4.18.01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD – LRA	49.457.888.698,00	46.318.977.308,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.18.04.	Pendapatan Laen-laen BLUD	314.382.000,00	185.551.941,00	Dinas Kesehatan
<b>4.1.4.19.</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA</b>	<b>-</b>	<b>73.647.976,68</b>	
4.1.4.19.01.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	-	73.647.976,68	BPKD
<b>4.1.4.21.</b>	<b>Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LRA</b>	<b>37.490.909.400,00</b>	<b>38.918.822.375,00</b>	
4.1.4.21.02.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Cihampelas	3.159.100.300,00	2.847.976.200,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.03.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Mukapayung	1.632.584.100,00	1.570.352.400,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.04.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Pataruman	1.858.248.300,00	1.794.682.500,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.05.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Sindangkerta	1.343.982.200,00	1.048.302.800,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.06.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Cicangkangirang	1.313.374.250,00	1.343.746.200,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.08.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Rongga	2.078.224.750,00	2.017.104.350,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.09.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Cipatat	1.477.893.400,00	1.765.252.200,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.11.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Sumur Bandung	871.312.000,00	1.033.154.725,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.12.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Padalarang	1.919.148.200,00	1.827.604.200,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.13.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Tagogapu	790.107.100,00	764.377.500,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.14.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Jayamekar	1.026.355.750,00	1.370.262.000,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.15.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Cipeundeuy	1.589.593.650,00	1.862.340.000,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.16.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Cirata	763.539.200,00	742.172.900,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.18.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Rende	860.560.500,00	1.062.134.400,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.19.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Cisarua	1.225.305.600,00	1.335.631.800,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.20.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Pasirlangu	678.478.250,00	654.220.300,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.21.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Lembang	1.756.931.950,00	1.953.008.400,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.22.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Cikole	835.218.450,00	837.009.600,00	Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	SKPD Pengelola
1	2	3	4	5
4.1.4.21.24.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Cibodas	831.147.000,00	793.904.700,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.25.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Batujajar	2.499.985.750,00	2.704.202.400,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.27.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Ngamprah	1.530.158.700,00	1.803.991.600,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.28.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Cimareme	2.008.960.100,00	1.844.833.200,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.29.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Cipongkor	1.907.718.850,00	2.529.807.300,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.30.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Citalem	1.840.791.950,00	1.714.665.800,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.31.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Parongpong	877.974.900,00	971.700.900,00	Dinas Kesehatan
4.1.4.21.32.	Dana Kapitasi Kepada FKTP Ciwaruga	814.214.200,00	726.384.000,00	Dinas Kesehatan
<b>4.1.4.22.</b>	<b>Pemanfaatan Aset Daerah</b>	<b>1.916.701.716,00</b>	<b>2.266.701.716,00</b>	
4.1.4.22.01.	Kontribusi Pemanfaatan aset Daerah	1.916.701.716,00	2.266.701.716,00	Diparbud & Indag

### 5.1.2.1.2. Pendapatan Transfer - LRA

	TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp	%	
	<b>2.219.995.211.950,00</b>	<b>1.870.003.233.375,00</b>	<b>84,23</b>	<b>2.206.258.579.947,00</b>	<b>(336.255.346.572,00)</b>	<b>(15,24)</b>	
Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 adalah sebesar Rp1.870.003.233.375,00 atau 84,23% dari anggaran Pendapatan Transfer yang telah ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp2.219.995.211.950,00. Penerimaan tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Transfer TA.2019 sebesar (Rp336.255.346.572,00) atau (15,24%), dari realisasi penerimaan Pendapatan Transfer TA 2019 sebesar Rp2.206.258.579.947,00.							
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.254.453.607.514,00	1.201.878.322.566,00	95,81	1.639.819.402.415,00	(437.941.079.849,00)	(26,71)	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	560.031.813.267,00	307.243.438.867,00	54,86	241.510.582.000,00	65.732.856.867,00	27,22	
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	249.157.124.580,00	213.388.584.827,00	85,64	243.264.633.170,00	(29.876.048.343,00)	(12,28)	
Bantuan Keuangan	156.352.666.589,00	147.492.887.115,00	94,33	81.663.962.362,00	65.828.924.753,00	80,61	
<b>Jumlah</b>	<b>2.219.995.211.950,00</b>	<b>1.870.003.233.375,00</b>	<b>84,23</b>	<b>2.206.258.579.947,00</b>	<b>(336.255.346.572,00)</b>	<b>(15,24)</b>	

#### 5.1.2.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

	TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp	%	
	<b>1.254.453.607.514,00</b>	<b>1.201.878.322.566,00</b>	<b>95,81</b>	<b>1.639.819.402.415,00</b>	<b>(437.941.079.849,00)</b>	<b>(26,71)</b>	
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA.2020 terealisasi sebesar Rp1.201.878.322.566,00 atau 95,81% dari anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA.2020 yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.254.453.607.514,00. Penerimaan tersebut mengalami penurunan dibandingkan penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2019 sebesar (Rp437.941.079.849,00) atau (26,71%)							
Bagi Hasil Pajak	71.044.485.185,00	61.799.849.307,00	86,99	45.663.147.769,00	16.136.701.538,00	35,34	
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	42.158.954.329,00	23.534.111.502,00	55,82	39.497.544.235,00	(15.963.432.733,00)	(40,42)	

Dana Alokasi Umum (DAU)	1.026.882.842.000,00	1.022.493.222.000,00	99,57	1.126.707.364.000,00	(104.214.142.000,00)	(9,25)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	114.367.326.000,00	94.051.139.757,00	82,24	136.609.549.298,00	(42.558.409.541,00)	(31,15)
Dana Penyesuaian	-	-	-	291.341.797.113,00	(291.341.797.113,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.254.453.607.514,00</b>	<b>1.201.878.322.566,00</b>	<b>95,81</b>	<b>1.639.819.402.415,00</b>	<b>(437.941.079.849,00)</b>	<b>(26,71)</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak adalah sebesar Rp61.799.849.307,00 atau 86,99% dari anggaran TA 2020 sebesar Rp71.044.485.185,00. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan penerimaan TA 2019 sebesar Rp16.136.701.538,00 atau 35,34% dari Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak TA 2019 sebesar Rp45.663.147.769,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.5 Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak TA 2020 dan TA 2019**

No.	Uraian	2020	2019	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
<b>1</b>	<b>Bagi Hasil dari PBB sektor Pertambangan</b>	<b>2.409.414.308,00</b>	<b>3.148.615.167,00</b>	<b>(739.200.859,00)</b>	<b>(23,48)</b>
	1.1. Migas	2.207.431.200,00	2.863.831.674,00	(656.400.474,00)	(22,92)
	1.2. Non Migas Lainnya	103.282.063,00	227.433.317,00	(124.151.254,00)	(54,59)
	1.3. Panas Bumi	49.882.147,00	29.241.100,00	20.641.047,00	70,59
	1.4. DBH Sektor Lainnya	48.818.898,00	28.109.076,00	20.709.822,00	73,68
<b>2</b>	<b>Bagi Hasil dari PBB sektor Perkebunan</b>	<b>448.541.200,00</b>	<b>2.700.792.731,00</b>	<b>(2.252.251.531,00)</b>	<b>(83,39)</b>
<b>3</b>	<b>Bagi Hasil dari PBB sektor Perhutanan</b>	<b>1.052.666.436,00</b>	<b>742.953.502,00</b>	<b>309.712.934,00</b>	<b>41,69</b>
<b>4</b>	<b>Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 &amp; Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21</b>	<b>49.954.621.396,00</b>	<b>30.330.337.064,00</b>	<b>19.624.284.332,00</b>	<b>64,70</b>
	4.1. DBH PPh Pasal 21 Kab Bandung Barat	44.877.219.837,00	28.292.429.264,00	16.584.790.573,00	58,62
	4.2. DBH PPh Pasal 25/29 OP Kab/Kota	5.077.401.559,00	2.037.907.800,00	3.039.493.759,00	149,15
<b>5</b>	<b>Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau</b>	<b>5.055.350.133,00</b>	<b>5.194.133.978,00</b>	<b>(138.783.845,00)</b>	<b>(2,67)</b>
<b>6</b>	<b>DBH PBB Bag Pemerintah Pusat Bagi Rata"</b>	<b>2.711.491.934,00</b>	<b>3.244.830.633,00</b>	<b>(533.338.699,00)</b>	<b>(16,44)</b>
<b>7</b>	<b>DBH PBB Biaya Pemungutan</b>	<b>167.763.900,00</b>	<b>301.484.694,00</b>	<b>(133.720.794,00)</b>	<b>(44,35)</b>
	7.1. Sektor Perkebunan	23.670.000,00	142.541.848,00	(118.871.848,00)	(83,39)
	7.2. Sektor Perhutanan	12.249.200,00	34.310.014,00	(22.060.814,00)	(64,30)
	7.3. Sektor Pertambangan	-	-	-	-
	7.3.1. Migas	87.489.600,00	72.994.171,00	14.495.429,00	19,86
	7.3.2. Non Migas Lainnya	1.710.000,00	1.157.800,00	552.200,00	47,69
	7.3.3. Panas Bumi	40.712.801,00	49.368.237,00	(8.655.436,00)	(17,53)
	7.3.4. Sektor Lainnya	1.932.299,00	1.112.624,00	819.675,00	73,67
<b>Total Bagi Hasil Pajak-LRA</b>		<b>61.799.849.307,00</b>	<b>45.663.147.769,00</b>	<b>16.136.701.538,00</b>	<b>35,34</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam adalah sebesar Rp23.534.111.502,00 atau 55,82% dari anggaran TA 2020 sebesar Rp42.158.954.329,00. Penerimaan tersebut mengalami penurunan dibandingkan penerimaan TA 2019 sebesar (Rp15.963.432.733,00) atau (40,42%) dari Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak-LRA TA 2019 sebesar Rp39.497.544.235,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.6 Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA TA 2020 & TA 2019**

No.	Uraian	2020	2019	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	<b>BH dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan</b>	-	-	-	-
2	<b>BH dari Provisi Sumber Daya Hutan</b>	<b>83.336.875,00</b>	<b>66.196.200,00</b>	<b>17.140.675,00</b>	<b>25,89</b>
3	<b>BH dari Dana Reboisasi</b>	-	-	-	-
4	<b>BH dari Iuran Tetap (Land Rent)</b>	-	-	-	-
5	<b>BH dari Iuran Eksplorasi &amp; Eksplorasi (Royalti)</b>	<b>519.106.048,00</b>	<b>280.995.400,00</b>	<b>238.110.648,00</b>	<b>84,74</b>
6	<b>BH dari Pungutan Pengusahaan Perikanan</b>	<b>788.276.289,00</b>	<b>590.155.800,00</b>	<b>198.120.489,00</b>	<b>33,57</b>
7	<b>BH dari Pungutan Hasil Perikanan</b>	-	-	-	-
8	<b>BH dari Pertambangan Minyak Bumi</b>	<b>5.198.363.984,00</b>	<b>4.797.020.800,00</b>	<b>401.343.184,00</b>	<b>8,37</b>
	8.1 minyak bumi 0,5 %	110.271.800,00	153.497.850,00	(43.226.050,00)	(28,16)
	8.2 minyak bumi 15 %	3.337.748.400,00	4.643.522.950,00	(1.305.774.550,00)	(28,12)
	KB DBH SDA Minyak Bumi s.d Tahun 2018 yang dialokasikan pada, TA 2020	1.601.476.493,00	-	<b>1.601.476.493,00</b>	-
	KB DBH SDA Minyak Bumi s.d Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA 2020	148.867.291,00	-	<b>148.867.291,00</b>	-
9	<b>BH dari Pertambangan Gas Bumi</b>	<b>4.779.508.956,00</b>	<b>6.116.790.610,00</b>	<b>(1.337.281.654,00)</b>	<b>(21,86)</b>
	9.1 Gas bumi 0,5 %	37.751.200,00	96.678.000,00	(58.926.800,00)	(60,95)
	9.2 Gas bumi 30 %	2.275.482.600,00	5.843.828.629,00	(3.568.346.029,00)	(61,06)
	KB DBH SDA Gas Bumi s.d Tahun 2018 yang dialokasikan pada, TA 2020	179.640.602,00	2.842.102,00	<b>176.798.500,00</b>	<b>6.220,70</b>
	KB DBH SDA Gas Bumi s.d Tahun 2019 yang Dialokasikan pada TA 2020	2.286.634.554,00	173.441.879,00	<b>2.113.192.675,00</b>	<b>1.218,39</b>
10	<b>BH dari Pertambangan Panas Bumi</b>	<b>12.165.519.350,00</b>	<b>27.646.385.425,00</b>	<b>(15.480.866.075,00)</b>	<b>(56,00)</b>
	10.1 DBH SDA Panas Bumi Bagian Pemerintah	12.044.923.500,00	27.437.000.975,00	(15.392.077.475,00)	(56,10)
	10.2 DBH SDA Panas Bumi Iuran Tetap	120.595.850,00	209.384.450,00	(88.788.600,00)	(42,40)
<b>Total BHNP</b>		<b>23.534.111.502,00</b>	<b>39.497.544.235,00</b>	<b>(15.963.432.733,00)</b>	<b>(40,42)</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar Rp1.022.493.222.000,00 atau 99,57% dari anggaran TA 2020. Penerimaan tersebut mengalami penurunan dibandingkan TA 2019 sebesar (Rp104.214.142.000,00) atau (9,25%).

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar Rp94.051.139.757,00 atau 82,24% dari anggaran TA 2020 sebesar Rp114.367.326.000,00. Penerimaan tersebut mengalami penurunan (Rp333.900.206.654,00) atau (78,02%) dibandingkan dengan DAK TA 2019 sebesar Rp427.951.346.411,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer DAK per Bidang adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.7 Rincian Realisasi Penerimaan DAK Per Bidang TA 2020**

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	Kenaikan / (Penurunan)	
						Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>114.367.326.000,00</b>	<b>94.051.139.757,00</b>	<b>82,24</b>	<b>427.951.346.411,00</b>	<b>(333.900.206.654,00)</b>	<b>(78,02)</b>
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	104.769.289.000,00	79.929.712.027,00	76,29	120.186.425.604,00	(40.256.713.577,00)	(33,50)
.2	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan	9.598.037.000,00	14.121.427.730,00	147,13	16.423.123.694,00	(2.301.695.964,00)	(14,01)
3	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-	291.341.797.113,00	(291.341.797.113,00)	(100,00)

### 5.1.2.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

	TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp		%
	<b>560.031.813.267,00</b>	<b>307.243.438.867,00</b>	<b>54,86</b>	<b>241.510.582.000,00</b>	<b>65.732.856.867,00</b>	<b>27,22</b>	
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2020 adalah sebesar Rp307.243.438.867,00 atau 54,86% dari anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2020 sebesar Rp560.031.813.267,00. Penerimaan tersebut naik sebesar Rp65.732.856.867,00 atau sebesar 27,22% dari realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2019							
Dana Penyesuaian	308.827.137.267,00	307.243.438.867,00	99,49		307.243.438.867,00		100,00
Dana Desa	251.204.676.000,00		-	241.510.582.000,00	(241.510.582.000,00)	(100,00)	
<b>Jumlah</b>	<b>560.031.813.267,00</b>	<b>307.243.438.867,00</b>	<b>54,86</b>	<b>241.510.582.000,00</b>	<b>65.732.856.867,00</b>	<b>27,22</b>	

### 5.1.2.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

	TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp		%
	<b>405.509.791.169,00</b>	<b>360.881.471.942,00</b>	<b>88,99</b>	<b>324.928.595.532,00</b>	<b>35.952.876.410,00</b>	<b>11,06</b>	
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2020 adalah sebesar Rp213.388.584.827,00 atau 85,64% dari anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2020 sebesar Rp249.157.124.580,00. Penerimaan tersebut turun dibandingkan penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2019 sebesar (Rp29.876.048.343) atau 12,28%.dengan rincian :							
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>249.157.124.580,00</b>	<b>213.388.584.827,00</b>	<b>85,64</b>	<b>243.264.633.170,00</b>	<b>(29.876.048.343,00)</b>	<b>(12,28)</b>	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	249.157.124.580,00	213.388.584.827,00	85,64	243.264.633.170,00	(29.876.048.343,00)	(12,28)	
<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>156.352.666.589,00</b>	<b>147.492.887.115,00</b>	<b>94,33</b>	<b>81.663.962.362,00</b>	<b>65.828.924.753,00</b>	<b>80,61</b>	
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	146.346.427.402,00	137.326.835.600,00	93,84	74.709.167.557,00	62.617.668.043,00	83,82	
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	834.826.600,00	965.006.895,00	115,59	881.032.995,00	83.973.900,00	9,53	
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	9.171.412.587,00	9.201.044.620,00	100,32	6.073.761.810,00	3.127.282.810,00	51,49	
<b>Jumlah</b>	<b>405.509.791.169,00</b>	<b>360.881.471.942,00</b>	<b>88,99</b>	<b>324.928.595.532,00</b>	<b>35.952.876.410,00</b>	<b>11,06</b>	

### 5.1.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

	TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp		%
	<b>195.274.200.000,00</b>	<b>195.347.670.000,00</b>	<b>100,04</b>	<b>168.495.680.000,00</b>	<b>26.851.990.000,00</b>	<b>15,94</b>	
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 adalah sebesar Rp195.347.670.000,00 atau 100,04% dari anggarannya sebesar Rp195.274.200.000,00. Realisasi penerimaan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2019 sebesar Rp26.851.990.000,00 atau 15,94%, dengan rincian:							
<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>195.274.200.000,00</b>	<b>195.347.670.000,00</b>	<b>100,04</b>	<b>168.495.680.000,00</b>	<b>26.851.990.000,00</b>	<b>15,94</b>	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	195.274.200.000,00	195.347.670.000,00	100,04	168.495.680.000,00	26.851.990.000,00	15,94	
<b>Jumlah</b>	<b>195.274.200.000,00</b>	<b>195.347.670.000,00</b>	<b>100,04</b>	<b>168.495.680.000,00</b>	<b>26.851.990.000,00</b>	<b>15,94</b>	

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2020 seluruhnya merupakan penerimaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2020 untuk Kegiatan Penyediaan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang penyalurannya langsung diterima di rekening masing-masing sekolah. Penyaluran Bantuan BOS tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Hibah BOS dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8 Rincian Nomor dan Tanggal Perjanjian Hibah BOS**

No.	Uraian Perjanjian Hibah (NPH)	Nomor	Tanggal
1.	NPH BOS Reguler Tahun 2020	978.3/4023-SET.DISDIK 900/1314-DISDIK/2020	07 April 2020
2.	NPH BOS Reguler Tahun 2020 – Addendum I	978.3/18758-SET.DISDIK 900/3885-DISDIK/2020	08 Desember 2020
3.	BOS Kinerja & Afirmasi Tahun 2020	Kepmendikbud No.746/P/2020	07 Agustus 2020

Total penerimaan Dana BOS TA 2020 untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Bandung Barat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.9 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -  
BOS SDN dan BOS SMPN Tahun 2020**

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1	2	3	4
1	Bos Reguler Sekolah Dasar Negeri	132.464.340.000,00	117.876.480.000,00
2	Bos Reguler Sekolah Menengah Pertama Negeri	43.263.330.000,00	39.439.200.000,00
3	Bos Afirmasi SDN	10.680.000.000,00	6.264.000.000,00
4	Bos Kinerja SDN	7.260.000.000,00	1.530.000.000,00
5	Bos Afirmasi SMPN	480.000.000,00	1.618.000.000,00
6	Bos Kinerja SMPN	1.200.000.000,00	1.768.000.000,00
	<b>Total</b>	<b>195.347.670.000,00</b>	<b>168.495.680.000,00</b>

### 5.1.2.2. Belanja Daerah dan Transfer

Belanja dan Transfer Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengeluaran Belanja Daerah diklasifikasikan berdasarkan Jenis Belanja sebagai berikut:

1. Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang;
  - c. Hibah; dan
  - d. Bantuan Sosial.

2. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain:
  - a. Belanja Modal Pengadaan Tanah;
  - b. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - e. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud).
3. Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
4. Transfer, yaitu penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk TA. 2020, total realisasi Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar Rp2.639.640.727.270,93 atau mencapai 78,58% dari total anggaran Belanja dan Transfer yang telah ditetapkan setelah APBD Perubahan sebesar Rp3.359.109.119.282,25. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp301.327.770.030,00) atau (10,25%) dibandingkan total realisasi anggaran Belanja Daerah TA 2019. Ikhtisar anggaran dan realisasi Belanja dan Transfer dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.10 Ikhtisar Belanja dan Transfer Tahun 2020**

Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2.933.244.820.907,25</b>	<b>2.474.309.181.122,93</b>	<b>84,35</b>	<b>2.901.968.390.706,93</b>
5.1.	BELANJA OPERASI	2.051.401.251.251,00	1.934.668.372.008,93	94,31	2.562.489.902.313,30
5.2.	BELANJA MODAL	798.841.835.075,00	465.456.844.575,00	58,27	338.001.326.883,63
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA	83.001.734.581,25	74.183.964.539,00	89,38	1.477.161.510,00
<b>6.</b>	<b>TRANSFER</b>	<b>425.864.298.375,00</b>	<b>165.331.546.148,00</b>	<b>38,82</b>	<b>39.024.427.844,00</b>
6.1.	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	40.045.292.595,00	38.518.706.534,00	96,19	37.774.335.344,00
6.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	385.819.005.780,00	126.812.839.614,00	32,87	1.250.092.500,00
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>3.359.109.119.282,25</b>	<b>2.639.640.727.270,93</b>	<b>78,58</b>	<b>2.940.992.818.550,93</b>

#### **5.1.2.2.1. Belanja Operasi**

TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp	%	
<b>2.051.401.251.251,00</b>	<b>1.934.668.372.008,93</b>	<b>94,31</b>	<b>2.125.276.307.709,30</b>	<b>(190.583.614.450,37)</b>	<b>(8,97)</b>	

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 adalah sebesar Rp1.934.692.693.258,93 atau

mencapai 94,31% dari total anggaran Belanja Operasi yang telah ditetapkan sebesar Rp2.051.401.251.251,00. Realisasi Belanja Operasi TA 2020 tersebut mengalami penurunan dari realisasi TA 2019 sebesar (Rp190.583.614.450,37) atau (8,97%) dengan rincian:

Belanja Pegawai	1.210.558.114.510,00	1.153.720.854.748,00	95,30	1.337.528.136.824,00	(183.807.282.076,00)	(13,74)
Belanja Barang dan Jasa	714.069.602.996,00	665.332.491.206,93	93,17	599.173.041.572,30	66.159.449.634,63	11,04
Belanja Bunga	2.855.004.000,00	2.855.004.000,00	100,00	-	2.855.004.000,00	100,00
Belanja Hibah	117.525.397.245,00	110.656.193.554,00	94,16	175.289.674.878,00	(64.633.481.324,00)	(36,87)
Belanja Bantuan Sosial	6.393.132.500,00	2.103.828.500,00	32,91	13.285.454.435,00	(11.181.625.935,00)	(84,16)
<b>Jumlah</b>	<b>2.051.401.251.251,00</b>	<b>1.934.668.372.008,93</b>	<b>94,31</b>	<b>2.125.276.307.709,30</b>	<b>(190.583.614.450,37)</b>	<b>(8,97)</b>

Belanja Operasi adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Penurunan Belanja Operasi tersebut disebabkan adanya penurunan yang berasal dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.1.2.2.2. Belanja Pegawai

	TA. 2020		%	TA. 2019	Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp	%
	<b>1.210.558.114.510,00</b>	<b>1.153.720.854.748,00</b>	<b>95,30</b>	<b>1.337.528.136.824,00</b>	<b>(183.807.282.076,00)</b>	<b>(13,74)</b>
Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 adalah sebesar Rp1.153.720.854.748,00 atau mencapai 95,30% dari total anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp1.210.558.114.510,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar (Rp183.807.282.076,00) atau (13,74%), dengan rincian sebagai berikut:						
Belanja Gaji dan Tunjangan	817.970.263.959,00	778.326.285.483,00	95,15	825.221.480.660,00	(46.895.195.177,00)	(5,68)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	269.060.710.650,00	252.205.984.014,00	93,74	285.818.248.056,00	(33.612.264.042,00)	(11,76)
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.741.421.380,00	9.741.421.380,00	100,00	9.691.409.471,00	50.011.909,00	0,52
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	14.415.678.572,00	13.117.118.677,00	90,99	14.737.196.746,00	(1.620.078.069,00)	(10,99)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.435.739.276,00	441.387.493,00	18,12	505.956.013,00	(64.568.520,00)	(12,76)
Uang Lembur	1.046.718.000,00	971.090.000,00	92,77	698.390.000,00	272.700.000,00	39,05
Honorarium PNS	2.587.717.150,00	2.288.876.150,00	88,45	2.657.666.083,00	(368.789.933,00)	(13,88)
Honorarium Non PNS	33.873.930.900,00	32.649.120.000,00	96,38	176.571.200.000,00	(143.922.080.000,00)	(81,51)
Belanja Pegawai BLUD	7.192.710.000,00	7.367.110.000,00	102,42	999.325.000,00	6.367.785.000,00	637,21
Honorarium Pengelola Dana Bos	52.233.224.623,00	56.612.461.551,00	108,38	20.627.264.795,00	35.985.196.756,00	174,45
<b>Jumlah</b>	<b>1.210.558.114.510,00</b>	<b>1.153.720.854.748,00</b>	<b>95,30</b>	<b>1.337.528.136.824,00</b>	<b>(183.807.282.076,00)</b>	<b>(13,74)</b>

Informasi lebih lanjut mengenai rincian saldo Belanja Pegawai per rincian objek TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam **Lampiran 2**.

### 5.1.2.2.3. Belanja Barang dan Jasa

	TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp		
	714.069.602.996,00	665.356.812.456,93	93,18	599.173.041.572,30	66.183.770.884,63	11,05	
Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 adalah sebesar Rp562.047.831.558,93 atau mencapai 92,82% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp605.539.269.646,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 tersebut mengalami kenaikan dari realisasi TA 2019 sebesar Rp72.046.653.468,63 atau 14,70%.							
Belanja Bahan Pakai Habis	53.654.644.000,00	47.186.461.035,00	87,94	19.511.905.310,00	27.674.555.725,00	141,83	
Belanja Bahan/Material	22.773.490.039,00	18.347.745.160,00	80,57	23.620.565.654,00	(5.272.820.494,00)	(22,32)	
Belanja Jasa Kantor	104.716.585.125,00	97.881.196.917,00	93,47	92.657.704.699,00	5.223.492.218,00	5,64	
Belanja Premi Asuransi	25.861.532.449,00	24.070.931.268,00	93,08	16.035.360.835,00	8.035.570.433,00	50,11	
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.170.395.035,00	10.636.780.522,00	87,40	8.672.158.165,00	1.964.622.357,00	22,65	
Belanja Cetak dan Penggandaan	15.663.470.508,00	14.375.038.610,00	91,77	19.329.855.103,00	(4.954.816.493,00)	(25,63)	
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.271.281.200,00	2.850.730.012,00	87,14	5.024.730.724,00	(2.174.000.712,00)	(43,27)	
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	386.932.500,00	286.689.500,00	74,09	1.329.453.000,00	(1.042.763.500,00)	(78,44)	
Belanja Sewa Alat Berat	29.600.000,00	29.600.000,00	100,00	39.200.000,00	(9.600.000,00)	(24,49)	
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.094.771.014,00	2.060.769.750,00	98,38	2.762.975.000,00	(702.205.250,00)	(25,41)	
Belanja Makanan dan Minuman	23.952.603.200,00	21.379.747.681,00	89,26	31.423.903.663,00	(10.044.155.982,00)	(31,96)	
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	698.330.000,00	675.479.750,00	96,73	2.684.494.760,00	(2.009.015.010,00)	(74,84)	
Belanja Pakaian Kerja	1.851.446.800,00	1.810.273.125,00	97,78	1.323.056.610,00	487.216.515,00	36,83	
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.833.538.200,00	1.659.434.750,00	90,50	4.038.323.440,00	(2.378.888.690,00)	(58,91)	
Belanja Perjalanan Dinas	40.264.438.025,00	36.095.622.879,00	89,65	52.361.288.056,00	(16.265.665.177,00)	(31,06)	
Belanja Pemeliharaan	27.371.794.141,00	26.111.718.035,00	95,40	25.046.722.566,00	1.064.995.469,00	4,25	
Belanja Jasa Konsultansi	17.457.210.788,00	16.386.141.967,00	93,86	36.632.098.661,00	(20.245.956.694,00)	(55,27)	
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.578.250.530,00	24.294.997.499,93	91,41	33.391.188.130,30	(9.096.190.630,37)	(27,24)	
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	17.961.654.696,00	16.235.138.588,00	90,39	30.784.698.288,00	(14.549.559.700,00)	(47,26)	
Belanja Honorarium Non Pegawai	12.314.908.026,00	11.012.747.026,00	89,43	24.349.964.400,00	(13.337.217.374,00)	(54,77)	
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	244.000.000,00	244.000.000,00	100,00	12.240.134.016,00	(11.996.134.016,00)	(98,01)	
Belanja Penghargaan dan Hadiah	261.550.000,00	238.622.000,00	91,23	635.679.150,00	(397.057.150,00)	(62,46)	
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis NON PNS	10.429.948.672,00	9.835.281.171,00	94,30	16.192.722.450,00	(6.357.441.279,00)	(39,26)	
Belanja Barang dan Jasa BLUD	39.050.494.698,00	35.297.459.313,00	90,39	29.892.995.410,00	5.404.463.903,00	18,08	
Belanja Barang Dana BOS	108.530.333.350,00	103.308.980.898,00	95,19	109.171.863.482,00	(5.862.882.584,00)	(5,37)	
Belanja Jasa NonPNS	144.646.400.000,00	143.045.225.000,00	98,89	-	143.045.225.000,00	100,00	
<b>Jumlah</b>	<b>714.069.602.996,00</b>	<b>665.356.812.456,93</b>	<b>93,18</b>	<b>599.173.041.572,30</b>	<b>66.183.770.884,63</b>	<b>11,05</b>	

Informasi lebih lanjut mengenai rincian saldo Belanja Barang dan Jasa per rincian obyek TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam **Lampiran 3**.

#### 5.1.2.2.4. Belanja Bunga

	TA. 2020		%	TA. 2019	Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp	%
	2.855.004.000,00	2.855.004.000,00		100,00	-	2.855.004.000,00
Realisasi Belanja Bunga pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 adalah sebesar Rp2.855.004.000,00 atau mencapai 100,00% dari total anggaran Belanja Hibah sebesar Rp2.855.004.000,00						
Bunga Utang Pinjaman	2.855.004.000,00	2.855.004.000,00	100,00	-	2.855.004.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.855.004.000,00</b>	<b>2.855.004.000,00</b>	<b>100,00</b>	-	<b>2.855.004.000,00</b>	<b>100,00</b>

Belanja Bunga Tahun 2020 menunjuk pada Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 2 tanggal 28 Februari 2020 antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT.SMI”) dan Pemkab Bandung Barat (“Perjanjian”) Pasal 5 ayat 6, Pemkab Bandung Barat wajib membayar kepada PT SMI biaya pinjaman sebagai pemenuhan syarat efektif Perjanjian Pembiayaan sebesar Rp2.855.004.000,00 (Dua miliar delapan ratus lima puluh lima ratus empat ribu rupiah).

#### 5.1.2.2.5 Belanja Hibah

	TA. 2020		%	TA. 2019	Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp	%
	117.525.397.245,00	110.656.193.554,00		94,16	175.289.674.878,00	(64.633.481.324,00)
Realisasi Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 adalah sebesar Rp214.058.160.289,00 atau mencapai 94,69% dari total anggaran Belanja Hibah sebesar Rp226.055.730.595,00.						
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	62.834.897.245,00	59.043.393.554,00	93,97	100.437.070.233,00	(41.393.676.679,00)	(41,21)
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	54.690.500.000,00	51.612.800.000,00	94,37	74.852.604.645,00	(23.239.804.645,00)	(31,05)
<b>Jumlah</b>	<b>117.525.397.245,00</b>	<b>110.656.193.554,00</b>	<b>94,16</b>	<b>175.289.674.878,00</b>	<b>(64.633.481.324,00)</b>	<b>(36,87)</b>

Adapun rincian penerima hibah TA 2020 disajikan dalam **Lampiran 4**.

#### 5.1.2.2.6. Belanja Bantuan Sosial

	TA. 2020		%	TA. 2019	Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp	%
	6.393.132.500,00	2.103.828.500,00		13.285.454.435,00	(11.181.625.935,00)	(84,16)
Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA. 2020 adalah sebesar Rp2.103.828.500,00 atau mencapai 32,91% dari total anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp6.393.132.500,00.						
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.393.132.500,00	2.103.828.500,00	32,91	13.285.454.435,00	(11.181.625.935,00)	(84,16)
<b>Jumlah</b>	<b>6.393.132.500,00</b>	<b>2.103.828.500,00</b>	<b>32,91</b>	<b>13.285.454.435,00</b>	<b>(11.181.625.935,00)</b>	<b>(84,16)</b>

Adapun rincian penerima Bantuan Sosial TA 2020 disajikan dalam **Lampiran 5**.

#### 5.1.2.3. Belanja Modal

	TA. 2020		%	TA. 2019	Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp	%
	798.841.835.075,00	465.456.844.575,00		338.001.326.883,63	127.455.517.691,37	37,71
Realisasi Belanja Modal TA 2020 adalah sebesar Rp465.456.844.575,00 atau mencapai 58,27% dari total anggaran sebesar Rp798.841.835.075,00. Realisasi Belanja Modal tersebut mengalami penaikan dari realisasi TA 2019 sebesar Rp127.455.517.691,37 atau 37,71%.						
Belanja Modal Tanah	7.208.768.100,00	7.133.690.500,00	98,96	20.388.039.964,00	(13.254.349.464,00)	(65,01)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.257.372.258,00	190.396.585.609,00	92,76	111.695.339.176,00	78.701.246.433,00	70,46

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	130.801.574.512,00	113.378.948.383,00	86,68	51.922.752.065,50	61.456.196.317,50	118,36
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	380.404.952.402,00	82.998.056.756,00	21,82	77.081.366.659,13	5.916.690.096,87	7,68
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	69.285.551.758,00	66.000.836.058,00	95,26	75.811.243.519,00	(9.810.407.461,00)	(12,94)
Belanja Modal Aset Lainnya	5.883.616.045,00	5.548.727.269,00	94,31	1.102.585.500,00	4.446.141.769,00	403,25
<b>Jumlah</b>	<b>798.841.835.075,00</b>	<b>465.456.844.575,00</b>	<b>58,27</b>	<b>338.001.326.883,63</b>	<b>127.455.517.691,37</b>	<b>37,71</b>

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan; seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya.

#### 5.1.2.3.1. Belanja Modal Tanah

	TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp		
	7.208.768.100,00	7.133.690.500,00	98,96	20.388.039.964,00	(13.254.349.464,00)	(65,01)	
Realisasi Belanja Modal Tanah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 adalah sebesar Rp7.133.690.500,00 atau mencapai 98,96% dari total anggaran sebesar Rp7.208.768.100,00.							
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	7.208.768.100,00	7.133.690.500,00	98,96	20.388.039.964,00	(13.254.349.464,00)	(65,01)	
<b>Jumlah</b>	<b>7.208.768.100,00</b>	<b>7.133.690.500,00</b>	<b>98,96</b>	<b>20.388.039.964,00</b>	<b>(13.254.349.464,00)</b>	<b>(65,01)</b>	

Belanja Modal Tanah TA 2020 terdapat pada beberapa OPD yaitu: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Perumahan dan Pemukiman.

#### 5.1.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

	TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp		
	205.257.372.258,00	190.396.585.609,00	92,76	111.695.339.176,00	78.701.246.433,00	70,46	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 adalah sebesar Rp190.396.585.609,00 atau mencapai 92,76% dari total anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp205.257.372.258,00.							
Realisasi belanja TA 2020 tersebut mengalami peningkatan dari realisasi belanja TA 2019 sebesar Rp78.701.246.433,00 atau 70,46%							
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	-	-	-	1.771.999.900,00	(1.771.999.900,00)	(100,00)	
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	238.977.940,00	227.513.000,00	95,20	607.928.980,00	(380.415.980,00)	(62,58)	
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.067.700.200,00	6.493.573.536,00	91,88	10.536.903.841,00	(4.043.330.305,00)	(38,37)	
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	79.530.000,00	(79.530.000,00)	(100,00)	
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bemesin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	172.218.000,00	(162.218.000,00)	(94,19)	
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bemesin	1.413.206.999,00	920.250.000,00	65,12	1.651.088.680,00	(730.838.680,00)	(44,26)	
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	114.200.000,00	102.671.250,00	89,90	7.634.986.366,00	(7.532.315.116,00)	(98,66)	

Pengadaan Alat Pengolahan	252.190.000,00	239.870.000,00	95,11	191.760.000,00	48.110.000,00	25,09	
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.614.972.094,00	1.477.217.730,00	91,47	2.638.534.933,00	(1.161.317.203,00)	(44,01)	
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	42.975.999.461,00	42.625.875.664,00	99,19	11.585.161.955,00	31.040.713.709,00	267,94	
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.071.489.939,00	6.726.570.701,00	83,34	7.319.944.622,00	(593.373.921,00)	(8,11)	
Belanja modal Pengadaan Komputer	550.949.300,00	549.087.875,00	99,66	1.415.896.960,00	(866.809.085,00)	(61,22)	
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	55.974.551.094,00	55.750.011.314,00	99,60	365.139.673,00	55.384.871.641,00	15.168,13	
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	253.868.200,00	251.387.100,00	99,02	841.941.408,00	(590.554.308,00)	(70,14)	
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	50.187.342.067,00	42.060.006.561,00	83,81	9.987.992.694,00	32.072.013.867,00	321,11	
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	24.379.296.836,00	23.083.243.743,00	94,68	10.643.389.834,00	12.439.853.909,00	116,88	
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	4.809.429.928,00	2.629.290.165,00	54,67	6.948.047.668,00	(4.318.757.503,00)	(62,16)	
Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	7.004.646.200,00	6.923.937.170,00	98,85	26.356.646.012,00	(19.432.708.842,00)	(73,73)	
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	-	-	-	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	-	45.000.000,00	100,00	
Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	15.700.000,00	15.587.600,00	99,28	50.618.700,00	(35.031.100,00)	(69,21)	
Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	277.852.000,00	265.492.200,00	95,55	43.980.000,00	221.512.200,00	503,67	
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan			-	6.081.078.950,00	(6.081.078.950,00)	(100,00)	
Belanja Modal Dana BOS	<b>Jumlah</b>	<b>205.257.372.258,00</b>	<b>190.396.585.609,00</b>	<b>92,76</b>	<b>111.695.339.176,00</b>	<b>78.701.246.433,00</b>	<b>70,46</b>

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing OPD TA 2020 terdapat pada **Lampiran 6**.

### 5.1.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp		%
	<b>130.801.574.512,00</b>	<b>113.378.948.383,00</b>	<b>86,68</b>	<b>51.922.752.065,50</b>	<b>61.456.196.317,50</b>	<b>61.456.196.317,50</b>	<b>118,36</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 adalah sebesar Rp113.378.948.383,00 atau mencapai 86,68% dari total anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp130.801.574.512,00. Realisasi Belanja TA 2020 tersebut mengalami penaikan dari realisasi belanja TA 2019 sebesar Rp61.456.196.317,50 atau (118,36%)

Belanja modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Tempat

Kerja							
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	14.390.000,00		-	-	-	-	-
Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	101.680.000,00	98.996.000,00	97,36	-	98.996.000,00	100,00	
Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	-	-	-	387.678.100,00	(387.678.100,00)	(100,00)	
Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	504.220.000,00	476.372.238,00	94,48	391.893.200,00	84.479.038,00	21,56	
<b>Jumlah</b>	<b>130.801.574.512,00</b>	<b>113.378.948.383,00</b>	<b>86,68</b>	<b>51.922.752.065,50</b>	<b>61.456.196.317,50</b>	<b>118,36</b>	

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing OPD TA 2020 terdapat pada **Lampiran 7**.

#### 5.1.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp	%	
	<b>380.404.952.402,00</b>	<b>82.998.056.756,00</b>	<b>21,82</b>	<b>77.081.366.659,13</b>	<b>5.916.690.096,87</b>	<b>7,68</b>	
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 adalah sebesar Rp82.998.056.756,00 atau mencapai 21,82% dari total anggaran Belanja Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp380.404.952.402,00. Realisasi belanja TA 2020 tersebut mengalami peningkatan dari realisasi TA 2019 sebesar Rp5.916.690.096,87 atau 7,68%.							
Belanja modal Pengadaan Jalan	364.090.457.808,00	68.799.842.360,00	18,90	52.987.013.779,13	15.812.828.580,87	29,84	
Belanja modal Pengadaan Jembatan	2.138.861.500,00	2.096.995.500,00	98,04	2.351.609.500,00	(254.614.000,00)	(10,83)	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	9.415.275.444,00	7.763.303.441,00	82,45	14.292.029.327,00	(6.528.725.886,00)	(45,68)	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	564.890.000,00	557.454.000,00	98,68	844.324.662,00	(286.870.662,00)	(33,98)	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	-	-	-	425.087.000,00	(425.087.000,00)	(100,00)	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	275.924.000,00	275.120.200,00	99,71	-	275.120.200,00	100,00	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	-	-	-	202.724.000,00	(202.724.000,00)	(100,00)	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	267.430.000,00	266.618.850,00	99,70	162.696.200,00	103.922.650,00	63,88	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.428.853.650,00	2.101.966.888,00	86,54	53.494.560,00	2.048.472.328,00	3.829,31	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	33.600.000,00	4.144.594,00	12,34	1.853.350,00	2.291.244,00	123,63	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman	280.000.000,00	276.000.000,00	98,57	18.000.000,00	258.000.000,00	1.433,33	
Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	909.660.000,00	856.610.923,00	94,17	5.742.534.281,00	(4.885.923.358,00)	(85,08)	
<b>Jumlah</b>	<b>380.404.952.402,00</b>	<b>82.998.056.756,00</b>	<b>21,82</b>	<b>77.081.366.659,13</b>	<b>5.916.690.096,87</b>	<b>7,68</b>	

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing OPD TA 2020 terdapat pada **Lampiran 8**.

#### 5.1.2.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

	TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp	%	
	<b>69.285.551.758,00</b>	<b>66.000.836.058,00</b>	<b>95,26</b>	<b>75.811.243.519,00</b>	<b>(9.810.407.461,00)</b>	<b>(12,94)</b>	
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 adalah sebesar							

Rp66.000.836.058,00 atau mencapai 95,26% dari total anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp69.285.551.758,00 Realisasi Belanja TA 2020 tersebut mengalami penurunan dari realisasi TA 2019 sebesar (Rp9.810.407.461,00) atau (12,94%),

Belanja modal Pengadaan Buku	1.434.506.000,00	1.424.398.050,00	99,30	347.852.807,00	1.076.545.243,00	309,48
Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	198.000.000,00	(198.000.000,00)	(100,00)
Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	-	-	-	198.792.000,00	(198.792.000,00)	(100,00)
Belanja modal Pengadaan Tanaman	-	-	-	190.693.000,00	(190.693.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Aset Tetap Renov	15.898.198.900,00	15.326.561.543,00	96,40	52.195.461.216,00	(36.868.899.673,00)	(70,64)
Belanja Modal Dana BOS	48.423.780.858,00	46.790.703.218,00	96,63	22.680.444.496,00	24.110.258.722,00	106,30
Belanja Modal BLUD	3.529.066.000,00	2.459.173.247,00	69,68	-	2.459.173.247,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>69.285.551.758,00</b>	<b>66.000.836.058,00</b>	<b>95,26</b>	<b>75.811.243.519,00</b>	<b>(9.810.407.461,00)</b>	<b>(12,94)</b>

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada masing-masing OPD TA 2020 terdapat pada **Lampiran 9**.

#### 5.1.2.3.6. Belanja Modal Aset Lainnya

	TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Rp	%		
	5.883.616.045,00	5.548.727.269,00	94,31	1.102.585.500,00	4.446.141.769,00	403,25	
Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 adalah sebesar Rp54.798.603.734,00 atau mencapai 94,75% dari total anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp57.836.462.903,00. Realisasi belanja TA 2020 tersebut mengalami peningkatan dari realisasi TA 2019 sebesar Rp24.934.494.788,0	Belanja Modal Jasa Konsultansi	4.651.257.500,00	4.361.693.500,00	93,77	48.565.000,00	4.313.128.500,00	8.881,15
Belanja Modal Pemeliharaan	1.232.358.545,00	1.187.033.769,00	96,32	1.054.020.500,00	133.013.269,00	12,62	
<b>Jumlah</b>	<b>5.883.616.045,00</b>	<b>5.548.727.269,00</b>	<b>94,31</b>	<b>1.102.585.500,00</b>	<b>4.446.141.769,00</b>	<b>403,25</b>	

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya pada masing-masing OPD TA 2020 terdapat pada **Lampiran 10**.

#### 5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

	TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Rp	%		
	83.001.734.581,25	74.183.964.539,00	89,38	1.477.161.510,00	72.706.803.029,00	4.922,06	
Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2020 adalah sebesar Rp74.183.964.539,00 atau mencapai 89,38% dari total anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp83.001.734.581,25. Realisasi Belanja Tak Terduga Anggaran 2020 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp72.706.803.029,00 atau 4.922,06% dari realisasi TA 2019.	Belanja Tak Terduga	83.001.734.581,25	74.183.964.539,00	89,38	1.477.161.510,00	72.706.803.029,00	4.922,06
Belanja Tak Terduga	83.001.734.581,25	74.183.964.539,00	89,38	1.477.161.510,00	72.706.803.029,00	4.922,06	
<b>Jumlah</b>	<b>83.001.734.581,25</b>	<b>74.183.964.539,00</b>	<b>89,38</b>	<b>1.477.161.510,00</b>	<b>72.706.803.029,00</b>	<b>4.922,06</b>	

Belanja Tak Terduga TA 2020 direalisasikan dalam bentuk biaya penanggulangan bencana alam dan santunan korban bencana alam serta penanganan Covid19.

#### 5.1.2.4. Transfer

	TA. 2020		%	TA. 2019		Kenaikan / (Penurunan)	
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	Rp		
	425.864.298.375,00	165.331.546.148,00	38,82	476.238.022.448,00	(310.906.476.300,00)	(65,28)	
Belanja Transfer TA 2020 berupa Transfer Bagi Hasil Pendapatan Daerah, Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. Realisasi Belanja Transfer TA 2020 adalah sebesar Rp39.825.040.034,00 atau 96,31% dari anggaran Belanja Transfer sebesar Rp41.351.626.095,00. Realisasi Belanja Transfer TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp800.612.190,00 atau 2,05% dari realisasi TA 2019.							
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>40.045.292.595,00</b>	<b>38.518.706.534,00</b>	<b>96,19</b>	<b>37.774.335.344,00</b>	<b>744.371.190,00</b>	<b>1,97</b>	
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	40.045.292.595,00	38.518.706.534,00	96,19	37.774.335.344,00	744.371.190,00	1,97	
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	35.507.863.220,00	35.507.863.220,00	100,00	34.236.302.724,00	1.271.560.496,00	3,71	
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	4.537.429.375,00	3.010.843.314,00	66,36	3.538.032.620,00	(527.189.306,00)	(14,90)	
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>385.819.005.780,00</b>	<b>126.812.839.614,00</b>	<b>32,87</b>	<b>438.463.687.104,00</b>	<b>(311.650.847.490,00)</b>	<b>(71,08)</b>	
Transfer Bantuan Keuangan	384.512.672.280,00	125.506.506.114,00	32,64	437.213.594.604,00	(311.707.088.490,00)	(71,29)	
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	384.512.672.280,00	125.506.506.114,00	32,64	437.213.594.604,00	(311.707.088.490,00)	(71,29)	
<b>Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</b>	<b>1.306.333.500,00</b>	<b>1.306.333.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.250.092.500,00</b>	<b>56.241.000,00</b>	<b>4,50</b>	
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.306.333.500,00	1.306.333.500,00	100,00	1.250.092.500,00	56.241.000,00	4,50	
<b>Jumlah</b>	<b>425.864.298.375,00</b>	<b>165.331.546.148,00</b>	<b>38,82</b>	<b>476.238.022.448,00</b>	<b>(310.906.476.300,00)</b>	<b>(65,28)</b>	

Belanja Transfer TA 2020 berupa Transfer Bagi Hasil Pendapatan Daerah, Transfer yang terdiri dari :

##### a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2020 berupa Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah sebesar Rp38.518.706.534,00 atau 96,19% dari anggaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp 40.045.292.595,00. Realisasi transfer tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp744.371.190,00 atau 1,97% dari realisasi TA 2019.

Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi.

##### b. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2020 adalah sebesar Rp1.306.333.500,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp1.306.333.500,00. Realisasi transfer tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp56.241.000,00 atau 4,50% dari realisasi TA 2019. Transfer Bantuan Keuangan TA 2020 terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa dan Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2020 terdapat pada **Lampiran 11**.

### 5.1.3. Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisit) adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan, Belanja dan Transfer dalam satu Tahun Anggaran. Pada TA.2020, defisit dianggarkan sebesar (Rp519.412.143.507,25) dan direalisasikan sebesar (Rp109.471.849.069,25).

### 5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meliputi semua penerimaan kas yang antara lain berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan dicatat berdasarkan azas bruto. Pembiayaan *netto* adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi Pembiayaan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp 233.911.743.507,25. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama TA 2020 adalah sebesar Rp 0,00; sehingga realisasi pembiayaan *netto* TA 2020 adalah sebesar Rp 233.911.743.507,25.

### 5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama TA 2020 adalah sebesar Rp124.439.894.438,00.

## 5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.11 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2020 dan TA 2019**

NO	URAIAN	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	233.911.743.507,25	272.063.268.840,18
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	233.911.743.507,25	272.063.268.840,18
3	Subtotal ( 1-2 )	-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	124.439.894.438,00	233.911.743.507,25
5	Subtotal ( 3+4 )	124.439.894.438,00	233.911.743.507,25
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
7	Lain-lain	-	-
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)</b>	<b>124.439.894.438,00</b>	<b>233.911.743.507,25</b>

## 1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun

Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2020 adalah sebesar Rp272.063.268.840,18 merupakan akumulasi SiLPA TA 2019. Perhitungan Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.12 Perhitungan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun**

No.	URAIAN	Realisasi TA 2019 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH - LRA	2.902.841.293.218,00
2	BELANJA DAERAH – LRA	(2.901.968.390.706,93)
3	TRANSFER	(39.024.427.844,00)
4	SURPLUS/DEFISIT -LRA (1+2+3)	(38.151.525.332,93)
5	PEMBIAYAAN NETO	272.063.268.840,18
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) (4+5)</b>		<b>233.911.743.507,25</b>

## 2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA akhir periode TA 2019 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan TA 2020 sebesar Rp233.911.743.507,25.

## 3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) TA 2020 adalah sebesar Rp124.439.894.438,00.

## 4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, baik koreksi yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) maupun yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2020.

## 5. Lain-lain

Tidak terdapat transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada TA 2020.

## 6. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir TA 2020 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan SiLPA tahun berjalan, yaitu sebesar Rp124.439.894.438,00 Nilai tersebut sudah termasuk SiLPA yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah, Dana Kapitalis JKN yang dikelola langsung oleh 26 Puskesmas; Dana BOS Pusat; dan SiLPA APBD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan rincian perhitungan SAL akhir TA 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.13 Perhitungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir TA 2020**

NO	URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019
		(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH – LRA	2.530.168.878.201,68	2.902.841.293.218,00
2	BELANJA DAERAH – LRA	2.474.309.181.122,93	2.464.754.796.102,93
3	TRANSFER	165.331.546.148,00	476.238.022.448,00

4	<b>SURPLUS/DEFISIT -LRA (1+2+3)</b>	<b>(109.471.849.069,25)</b>	<b>(38.151.525.332,93)</b>
5	PEMBIAYAAN NETO	233.911.743.507,25	272.063.268.840,18
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) (4+5)</b>	<b>124.439.894.438,00</b>	<b>233.911.743.507,25</b>
1	KAS BUD	104.045.411.024,00	203.930.016.256,07
2	DEPOSITO	-	-
3	KAS BLUD	8.657.323.862,00	7.276.537.173,00
4	KAS BOS	2.572.273.353,00	13.913.138.831,18
5	KAS JKN	9.125.094.838,00	8.283.129.132,00
6	KAS BENDAHARA PENGELUARAN	29.542.300,00	314.895.571,00
7	KAS BENDAHARA PENERIMAAN	9.536.000,00	199.029.662,00
8	UANG GAJI DAN TUNJANGAN YANG MASIH ADA DI BENDAHARA PENGELUARAN	-	(4.300.000,00)
9	UANG PAJAK YG MASIH DI KASDA	-	(703.118,00)
10	KOREKSI BERKURANG JASA GIRO BOS & JKN	713.061,00	
	<b>Saldo Akhir Kas Pemkab Bandung Barat per 01 Jan 2020</b>	<b>124.439.894.438,00</b>	<b>233.911.743.507,25</b>

### 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu. Neraca disajikan dengan menggunakan Basis Akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

Ikhtisar penyajian Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Per 31 Desember 2020 dan 2019, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.14 Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Per 31 Desember 2020**

NO	AKUN NERACA	2020	2019	KENAIKAN / (PENURUNAN)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	3	5	6
1	<b>ASET</b>	<b>3.581.789.720.075,68</b>	<b>3.481.844.482.544,50</b>	<b>99.945.237.531,18</b>	<b>2,87</b>
2	ASET LANCAR	389.243.323.655,96	468.182.187.314,20	(78.938.863.658,24)	(16,86)
3	INVESTASI JANGKA PANJANG	44.826.076.448,00	44.620.288.222,00	205.788.226,00	0,46
4	ASET TETAP	3.016.860.479.390,20	2.844.823.257.408,87	172.037.221.981,33	6,05
5	ASET LAINNYA	130.859.840.581,52	124.218.749.599,43	6.641.090.982,09	5,35
6	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>12.692.117.297,33</b>	<b>111.128.031.708,84</b>	<b>(98.435.914.411,51)</b>	<b>(88,58)</b>
7	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12.692.117.297,33	111.128.031.708,84	(98.435.914.411,51)	(88,58)
8	<b>EKUITAS</b>	<b>3.569.097.602.778,35</b>	<b>3.370.716.450.835,67</b>	<b>198.381.151.942,68</b>	<b>5,89</b>
9	EKUITAS DANA	3.569.097.602.778,35	3.370.716.450.835,67	198.381.151.942,68	5,89
10	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>3.581.789.720.075,68</b>	<b>3.481.844.482.544,51</b>	<b>99.945.237.531,17</b>	<b>2,87</b>

Berdasarkan penyajian tersebut, diperoleh informasi secara garis besar bahwa posisi Total Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada akhir TA 2020 mengalami

peningkatan dibandingkan dengan posisi Total Aset, Kewajiban, Ekuitas akhir TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Total Aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.581.789.720.075,68. Jumlah tersebut naik sebesar Rp99.945.237.531,18 atau 2,87% dibandingkan dengan posisi total nilai aset Tahun Anggaran 2019 yang mencapai sebesar Rp3.481.844.482.544,50. Seluruh posisi komponen Aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada akhir Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan dibandingkan akhir Tahun Anggaran 2019 kecuali komponen Aset Lancar yang mengalami penurunan sebesar 16,75%.
2. Nilai Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.692.117.297,33. Jumlah tersebut turun sebesar (Rp98.435.914.411,51) atau mencapai 88,58% dibandingkan dengan total nilai Kewajiban Tahun Anggaran 2019 yang mencapai Rp111.128.031.708,84
3. Nilai Total Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.569.097.602.778,35. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp190.468.128.386,62 atau mencapai 5,65% dari Total Ekuitas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.370.716.450.835,67.

### 5.3.1 Aset

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	<b>3.581.789.720.075,68</b>	<b>3.481.844.482.544,50</b>
Saldo tersebut merupakan saldo Aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per tanggal neraca yang terdiri dari:		
Aset Lancar	389.243.323.655,96	468.182.187.314,20
Investasi Jangka Panjang	44.826.076.448,00	44.620.288.222,00
Aset Tetap	3.016.860.479.390,20	2.844.823.257.408,87
Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya	130.859.840.581,52	124.218.749.599,43
<b>Jumlah</b>	<b>3.581.789.720.075,68</b>	<b>3.481.844.482.544,50</b>

#### 5.3.1.1 Aset Lancar

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	<b>389.243.323.655,96</b>	<b>468.182.187.314,20</b>
Aset Lancar adalah kas dan setara kas serta sumber daya lainnya yang diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:		
Kas dan Setara Kas	124.449.326.504,00	233.983.851.976,25
Piutang Pendapatan	462.968.543.013,79	422.095.886.410,79
Piutang Lainnya	64.267.160,00	328.989.665,00
Penyisihan Piutang	(241.086.999.351,41)	(219.497.141.585,86)
Beban Dibayar Dimuka	942.712.277,79	1.010.372.523,60
Persediaan	41.905.474.051,79	30.260.228.324,42
<b>Jumlah</b>	<b>462.968.543.013,79</b>	<b>468.182.187.314,20</b>

### 5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	<b>124.449.326.504,00</b>	<b>233.983.851.976,25</b>
Saldo tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per tanggal neraca, yang terdiri dari:		
Kas di Kas Daerah	104.045.411.024,00	203.930.016.256,07
Kas di Bendahara Penerimaan	9.536.000,00	199.029.662,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	29.542.300,00	314.895.571,00
Kas di BLUD	8.666.676.762,00	7.276.537.173,00
Kas JKN	9.125.094.838,00	8.283.129.132,00
Kas BOS	2.572.273.353,00	13.913.138.831,18
Kas Lainnya	792.227,00	67.105.351,00
<b>Jumlah</b>	<b>124.449.326.504,00</b>	<b>233.983.851.976,25</b>

Saldo masing-masing Aset Lancar Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan berikut ini.

#### 5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
<b>104.045.411.024,00</b>	<b>203.930.016.256,07</b>

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD). Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah rekening pada Bank BJB Cabang Padalarang nomor 000.314.814.9002 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 900/Kep.63-BPKD/2020 tentang Penunjukan Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Bendahara Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Bendahara Penerimaan BLUD RSUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp104.045.411.024,00, sedangkan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp233.983.851.976,25. Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2020 tersebut diperoleh melalui hasil perhitungan saldo akhir Buku Kas Umum (BKU) per 31 Desember 2020 dan R/C Kas Daerah per 31 Desember 2020 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1 Saldo Kas Daerah Catatan BKU	Rp104.045.411.013,14
2 Saldo Kas Daerah Catatan R/C 000.314.814.9002	Rp104.045.411.024,00
Selisih Pencatatan BKU dan R/C	(Rp10,86)

Selisih lebih besar di R/C tersebut ditelah dilakukan koreksi pencatatan dengan mengakui selisih lebih sebesar Rp10,86 tersebut sebagai Lain Lain PAD yang Sah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per tanggal 31 Desember 2020 tidak memiliki simpanan dalam bentuk deposito, hal ini dikarenakan simpanan deposito yang dimiliki pada PT Bamk BJB sebesar

Rp150.000.000.000,00 telah dilakukan pencairan sebelum tanggal periode pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.15 Penarikan Simpanan Deposito pada Tahun 2020**

No.	Tanggal Pencairan	Uraian	Nominal (Rp)
1	28 Desember 2020	Pencairan deposito a.n. Kas Umum Daerah KBB DEP -2020IDR000028	50.000.000.000,00
2	29 Desember 2020	Pencairan deposito a.n. Kas Umum Daerah KBB DEP - 2020IDR000029	25.000.000.000,00
3	30 Desember 2020	Pencairan deposito a.n. Kas Umum Daerah KBB DEP - 2020IDR000030	25.000.000.000,00
4	31 Desember 2020	Pencairan deposito a.n. Kas Umum Daerah KBB DEP - 2020IDR000080	25.000.000.000,00
5	31 Desember 2020	Pencairan deposito a.n. Kas Umum Daerah KBB DEP - 2020IDR000081	25.000.000.000,00
<b>Total Pencairan Deposito</b>			<b>150.000.000.000,00</b>

Saldo tersebut merupakan saldo pada rekening Kas Umum Daerah. Saldo per tanggal 31 Desember 2020 termasuk sisa dana transfer yang sifatnya mengikat (mandatoris) sebesar Rp1.579.645.973,00 yang terdiri dari:

1. Sisa Dana DAK Fisik Reguler
  - a. Kesehatan dan Keluarga Berencana
    1. Pelayanan Dasar sisa dana di RKUD sebesar Rp99.726.071,00
    2. Pelayanan Rujukan sisa dana di RKUD sebesar Rp1.020.639.729,00
    3. Pelayanan Kefarmasian sisa dana di RKUD sebesar Rp105.141.600,00
2. Sisa Dana DAK Fisik Penugasan
  - Kesehatan
  - Penurunan AKI-AKB sisa dana di RKUD sebesar Rp83.825.572,00
3. Cadangan DAK Fisik
  - a. Air Minum Penugasan sisa dana di RKUD sebesar Rp21.800.000,00
  - b. Irigasi sisa dana di RKUD sebesar Rp1,00
  - c. Pertanian sisa dana di RKUD sebesar Rp246.900.000,00
  - d. Kelautan dan Perikanan sisa dana di RKUD sebesar Rp1.613.000,00

#### 5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
<b>9.536.000,00</b>	<b>199.029.662,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada 31 Desember 2020.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 Rp9.536.000,00 yang merupakan kas yang ada pada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan yang berasal dari retribusi pelayanan UPTD RSUD Lembang, Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang berasal dari retribusi pelayanan persampahan, dan Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang berasal dari retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp199.029.662,00 tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.16 Penyetoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2020**

No.	Tanggal Setor	Penjelasan	Bendahara Penerimaan	Saldo
1		<b>Retribusi pelayanan kesehatan</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>407.000,00</b>
	04 Januari 2021	Retribusi pelayanan kesehatan	PKM Cihampelas	32.000,00
	06 Januari 2021	Retribusi pelayanan kesehatan	PKM Cikole	82.000,00
	07 Januari 2021	Retribusi pelayanan kesehatan	PKM Cipongkor	82.000,00
	04 Januari 2021	Retribusi pelayanan kesehatan	PKM Parongpong	64.000,00
	07 Januari 2021	Retribusi pelayanan kesehatan	PKM Pataruman	63.000,00
	07 Januari 2021	Retribusi pelayanan kesehatan	PKM Rende	30.000,00
	04 Januari 2021	Retribusi pelayanan kesehatan	PKM Batujajar	54.000,00
2	<b>09 Februari 2021</b>	<b>Retribusi Persampahan</b>	<b>Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran</b>	<b>1.160.000,00</b>
3	<b>03 Februari 2021</b>	<b>Retribusi Persampahan</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>5.980.000,00</b>
4	<b>04 Januari 2021</b>	<b>Retribusi Tempat Rekreasi</b>	<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>	<b>789.000,00</b>
5	<b>12 Januari 2021</b>	<b>Retribusi IMB</b>	<b>Kecamatan Cipongkor</b>	<b>1.200.000,00</b>
		<b>Total Kas di Bendahara Penerimaan</b>		<b>9.536.000,00</b>

#### 5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
<b>29.542.300,00</b>	<b>314.895.571,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang masih dikelola oleh Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.542.300,00, merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 18 Februari Tahun 2021.

#### 5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
<b>8.666.676.762,00</b>	<b>7.276.537.173,00</b>

Kas BLUD merupakan kas untuk 3 (tiga) BLUD RSUD dan 6 (enam) BLUD Puskesmas yang berasal dari pengelolaan dana fungsional (Non APBD) per tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Kas di BLUD pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8.666.676.762,00, adapun rincian saldo Kas di BLUD pada tiga RSUD dan enam Puskesmas berstatus BLUD kami sajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.17 Rincian Saldo Kas di BLUD Tahun 2020**

No.	Nama BLUD	No. Rekening	Saldo Per 31 Desember 2019		
			Kas di R/C	Kas Tunai	Total Saldo Kas di BLUD
1	2	3	4	5	6=4+5
1	RSUD Cililin	3636363636001	478.049.978,00		478.049.978,00

2	RSUD Lembang	0091559064100	1.036.916.058,00	1.666.500,00	1.038.582.558,00
3	RSUD Cikalong Wetan	0090375911001	550.335.624,00	36.184.481,00	586.520.105,00
4	BLUD Puskesmas Cililin	0059423053100	725.770.837,00		725.770.837,00
5	BLUD Puskesmas Rajamandala	0059411187100	1.080.867.672,00		1.080.867.672,00
6	BLUD Puskesmas Cikalangwetan	0059429396100	2.297.494.867,00		2.297.494.867,00
7	BLUD Puskesmas Saguling	0059429019100	14.535.170,00		14.535.170,00
8	BLUD Puskesmas Gununganhalu	0059427644100	2.007.746.919,00		2.007.746.919,00
9	BLUD Puskesmas Jayagiri	0059410342100	437.108.656,00		437.108.656,00
<b>Jumlah</b>			<b>8.628.825.781,00</b>	<b>37.850.981,00</b>	<b>8.666.676.762,00</b>

Rincian perhitungan saldo kas di BLUD dan posisi dana kas di BLUD diuraikan sebagai berikut:

1. BLUD RS CILILIN

Saldo Awal	:	2.077.547.487,00
Pendapatan	:	20.114.493.739,00
Belanja	:	21.713.991.248,00
Saldo Akhir	:	478.049.978,00

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 3636363636001 di Bank BJB sebesar Rp.34.501.996.006,72.

2. BLUD RSUD LEMBANG

Saldo Awal	:	0,00
Pendapatan	:	6.993.046.011,00
Belanja	:	5.954.463.453,00
Saldo Akhir	:	1.038.582.558,00

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 0091559064100 di Bank BJB sebesar Rp.1.036.916.058,00; dan Kas Tunai pada Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.666.500,00.

3. BLUD RSUD CIKALONG WETAN

Saldo Awal	:	0,00
Pendapatan	:	5.366.987.974
Belanja	:	4.789.820.771
Saldo Akhir	:	586.520.103

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 0090375911001 di Bank BJB sebesar Rp.550.335.624,00; Kas Tunai pada Bendahara Pengeluaran Jampersal sebesar Rp25.776.581,00 dan Kas Tunai pada Bendahara Penerimaan sebesar Rp10.407.900,00.

4. BLUD PUSKESMAS CILILIN

Saldo Awal : 610.087.090,00  
Pendapatan : 2.256.539.200,00  
Belanja : 2.140.855.453,00  
Saldo Akhir : 725.770.837,00

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 0059423053100 di Bank BJB sebesar Rp725.770.837,00.

5. BLUD PUSKESMAS RAJAMANDALA

Saldo Awal : 966.937.233,00  
Pendapatan : 1.639.493.900,00  
Belanja : 1.525.563.461,00  
Saldo Akhir : 1.080.867.672,00

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 0059411187100 di Bank BJB sebesar Rp1.080.867.672,00

6. BLUD PUSKESMAS CIKALONGWETAN

Saldo Awal : 1.847.521.405,00  
Pendapatan : 3.595.664.700,00  
Belanja : 3.145.691.238,00  
Saldo Akhir : 2.297.494.867,00

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 0059429396100 di Bank BJB sebesar Rp2.297.494.867,00

7. BLUD PUSKESMAS SAGULING

Saldo Awal : 25.930.064,00  
Pendapatan : 1.789.377.900,00  
Belanja : 1.800.772.794,00  
Saldo Akhir : 14.535.170,00

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 0059429019100 di Bank BJB sebesar Rp14.535.170,00

8. BLUD PUSKESMAS PUSKESMAS GUNUNGHALU

Saldo Awal : 1.386.833.112,00

Pendapatan : 3.174.461.263,00

Belanja : 2.553.547.456,00

Saldo Akhir : 2.007.746.919,00

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 0059427644100 di Bank BJB sebesar Rp2.007.746.919,00

9. BLUD PUSKESMAS PUSKESMAS GUNUNGHALU

Saldo Awal : 1.386.833.112,00

Pendapatan : 3.174.461.263,00

Belanja : 2.553.547.456,00

Saldo Akhir : 2.007.746.919,00

Saldo akhir kas tersebut terdapat pada rekening nomor 0059427644100 di Bank BJB sebesar Rp2.007.746.919,00

Jumlah pendapatan dan belanja yang digunakan dalam perhitungan di atas hanya yang bersumber dari pendapatan BLUD.

**5.3.1.1.5 Kas di JKN**

<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
<b>9.125.094.838,00</b>	<b>8.283.129.132,00</b>

Saldo Kas Dana JKN per 31 Desember 2020 sebesar Rp 9.125.094.838,00 merupakan saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam bentuk Kas Tunai dan Kas di Bank. Informasi lebih lanjut mengenai rincian historis pencairan, penggunaan, dan pengembalian Kas di Bendahara JKN pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama periode Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam **Lampiran 12**.

Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dikelola dan digunakan secara langsung, tanpa disetor terlebih dahulu ke Kas Daerah, dengan mekanisme permintaan dan pengesahan realisasi Pendapatan dan Belanja oleh BUD (SP3B/SP2B). Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP adalah saldo dana yang dibentuk sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Permenkes tersebut diturunkan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah harus menetapkan bendahara dan rekening dana kapitasi JKN dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menerima dana kapitasi tersebut yang dibayarkan per bulan dan dibayar dimuka berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah

elayanan kesehatan yang diberikan. Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP tersebut dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Di wilayah kerja Kabupaten Bandung Barat, terdapat 26 Puskesmas sebagai FKTP yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Sejak Bulan Mei 2014, dana kapitasi tersebut sudah masuk ke masing-masing rekening Bendahara FKTP.

#### 5.3.1.1.6 Kas BOS

Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
<b>2.572.273.353,00</b>	<b>13.913.138.831,18</b>

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.572.273.353,00 merupakan saldo kas yang ada di bendahara masing-masing satuan pendidikan dasar sejumlah 675 Sekolah Dasar Negeri, dan satuan pendidikan menengah sejumlah 67 Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan nilai saldo Kas BOS sebagai berikut:

Rincian perhitungan saldo kas BOS dan posisi dana kas di Bendahara BOS diuraikan sebagai berikut:

##### SALDO AWAL DANA BOS TINGAT SD TAHUN 2020

###### 1. Saldo Per 31 Desember 2019

a. SILPA BOS REGULER	3.782.724.364,00
b. SILPA BOS AFIRMASI	5.123.875.600,00
c. SILPA BOS KINERJA	1.360.000.000,00
<b>Jumlah saldo dana BOS</b>	<b>10.266.599.964,00</b>

##### MUTASI DANA BOS TAHUN 2020

###### A Mutasi Penambahan

1 Alokasi Dana BOS REGULER	132.464.340.000,00
2 Alokasi Dana BOS AFIRMASI	10.680.000.000,00
3 Alokasi Dana BOS KINERJA	7.260.000.000,00
<b>Jumlah Mutasi Penambahan</b>	<b>150.404.340.000,00</b>

###### B Mutasi Pengurangan

1 Belanja Pegawai	43.384.363.124,00
2 Belanja Barang dan Jasa	74.910.702.061,00
a. BOS REGULER	1.930.263.176,00
b. BOS AFIRMASI	1.236.816.156,00
c. BOS KINERJA	
3 Belanja Modal	16.241.705.409,00
a. BOS REGULER	13.798.738.295,00
b. BOS AFIRMASI	7.382.310.690,00
c. BOS KINERJA	
<b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b>	<b>158.884.898.911,00</b>

##### SALDO AKHIR DANA BOS TAHUN 2020

1. Saldo Rekening Bank	1.732.943.508,00
2. Saldo Kas Tunai	53.097.545,00
<b>Jumlah Saldo Akhir</b>	<b>1.786.041.053,00</b>

**SALDO AWAL DANA BOS TINGAT SMPN TAHUN 2020****1. Saldo Per 31 Desember 2019**

a. SILPA BOS REGULER	484.548.467,00
b. SILPA BOS AFIRMASI	1.430.000.000,00
c. SILPA BOS KINERJA	1.731.990.400,00
<b>Jumlah saldo dana BOS</b>	<b>3.646.538.867,00</b>

**MUTASI DANA BOS TAHUN 2020****A Mutasi Penambahan**

1 Alokasi Dana BOS REGULER	43.263.330.000,00
2 Alokasi Dana BOS AFIRMASI	480.000.000,00
3 Alokasi Dana BOS KINERJA	1.200.000.000,00
<b>Jumlah Mutasi Penambahan</b>	<b>44.943.330.000,00</b>

**B Mutasi Pengurangan**

1 Belanja Pegawai	13.228.098.427,00
2 Belanja Barang dan Jasa	24.434.889.330,00
a. BOS REGULER	223.122.097,00
b. BOS AFIRMASI	548.866.828,00
c. BOS KINERJA	
3 Belanja Modal	5.297.947.349,00
a. BOS REGULER	1.686.877.903,00
b. BOS AFIRMASI	2.383.123.572,00
<b>Jumlah Mutasi Pengurangan</b>	<b>47.802.925.506,00</b>

**SALDO AKHIR DANA BOS TAHUN 2020**

1. Saldo Rekening Bank	786.943.361,00
2. Saldo Kas Tunai	-
3. Koreksi Saldo Rekening Bank	(711.061,00)
<b>Jumlah Saldo Akhir</b>	<b>786.232.300,00</b>

Saldo Kas BOS masing Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama periode TA 2019 disajikan dalam **Lampiran 13**.

Dana BOS Pusat pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dikelola dan digunakan secara langsung tanpa disetor ke Kas Daerah terlebih dahulu dengan mekanisme permintaan dan pengesahan atas realisasi Belanja oleh BUD (SP3B/SP2B). Penyaluran Dana BOS ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui transfer ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat untuk kemudian disalurkan ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar. Penyaluran tersebut berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat antara Gubernur Jawa Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

**5.3.1.1.7 Kas Lainnya**

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	792.227,00	67.105.351,00

Saldo Kas Lainnya muncul karena terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saldo Kas Lainnya dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan saldo Kas selain Kas dalam pengelolaan Bendahara Umum Daerah pada akhir tahun anggaran. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp792.227,00 merupakan saldo kas yang terdiri dari penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2020 yang telah di pungut oleh Bendahara BOS

Sekolah namun sampai dengan periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Sdn Margaasih Kecamatan Cipatat sebesar Rp 326.350
2. Sdn Ciptagumati Cikalongwetan sebesar Rp 327.197
3. Sdn Hanjuangsari Parongpong sebesar Rp138.680

#### 5.3.1.1.2. Piutang Pendapatan

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	<b>463.463.948.813,79</b>	<b>422.095.886.410,79</b>
Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Pendapatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Piutang Pajak Daerah	397.704.447.644,79	354.228.657.284,79
Piutang Retribusi	190.256.000,00	251.729.300,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	56.767.708.016,00	57.313.321.328,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	8.801.537.153,00	10.302.178.498,00
<b>Jumlah</b>	<b>463.463.948.813,79</b>	<b>422.095.886.410,79</b>

Piutang di lingkungan pemerintah pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Piutang Pajak merupakan hak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang diakui atas saldo Piutang Pendapatan Daerah yang terdiri dari: Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, dan Piutang Pendapatan Lainnya.

Saldo Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp463.463.948.813,79 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp41.368.062.403,00 atau sebesar 9,80%.

Saldo Piutang Pendapatan Daerah tersebut berdasarkan hasil perhitungan masing-masing piutang yaitu: saldo awal + koreksi saldo awal + penerimaan tahun berjalan – pembayaran tahun berjalan – koreksi saldo awal. Rincian perhitungan saldo akhir masing-masing Piutang disajikan dalam **Lampiran 14**.

#### 5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	<b>397.704.447.644,79</b>	<b>354.228.657.284,79</b>
Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Pajak yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Piutang Pajak Hotel	3.267.618.033,23	2.717.789.260,23
Piutang Pajak Restoran	4.699.588.388,85	2.817.080.174,85
Piutang Pajak Hiburan	777.229.505,00	558.230.343,00
Piutang Pajak Reklame	549.514.825,00	185.741.825,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.536,71	78.807,71
Piutang Pajak Parkir	141.575.641,00	88.440.607,00
Piutang Pajak Air Tanah	6.926.487.713,00	3.803.480.537,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.103.883.781,00	962.286.067,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	380.238.548.221,00	343.095.529.663,00
<b>Jumlah</b>	<b>397.704.447.644,79</b>	<b>354.228.657.284,79</b>

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp397.704.447.644,79 dan Rp354.228.657.284,79, Piutang Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp43.475.790.360,00 atau mencapai 12.27% dengan rincian mutasi pada **Lampiran 15** dan **Lampiran 16**.

#### 5.3.1.1.2.2. Piutang Retribusi Daerah

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	<b>190.256.000,00</b>	<b>251.729.300,00</b>
Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	4.680.000,00
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	190.256.000,00	247.049.300,00
<b>Jumlah</b>	<b>190.256.000,00</b>	<b>251.729.300,00</b>

Piutang Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp190.256.000,00 dan Rp251.729.300,00 Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp61.473.300,00 atau mencapai (24.42%) dengan rincian mutasi pada **Lampiran 17**.

#### 5.3.1.1.2.3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	<b>56.272.302.216,00</b>	<b>57.313.321.328,00</b>
Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Piutang Kompensasi Dampak Negatif	583.963.810,00	3.712.971.965,00
Piutang Denda Pajak	3.075.550.401,00	2.696.755.286,00
Piutang dari Pengembalian	60.900.000,00	82.100.000,00
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	46.817.436.577,00	37.074.008.781,00
Piutang BLUD	5.229.531.384,00	5.527.988.596,00
Piutang Dana Non Kapitasi	178.985.000,00	7.985.384.700,00
Piutang BLUD PKM – BPJS	71.150.000,00	234.112.000,00
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal	254.785.044,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>56.272.302.216,00</b>	<b>57.313.321.328,00</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp56.272.302.216,00 dan Rp57.313.321.328,00 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.041.019.112,00 atau mencapai (1,82%). Adapun penjelasan atas rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah:

- Saldo Piutang Kompensasi Dampak Negatif, merupakan Piutang dari Perhitungan Kompensasi Dampak Negatif Persampahan TPA Sarimukti pada Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi dengan rincian mutasi pada **Lampiran 18**;

- b. Saldo Piutang Denda Pajak merupakan piutang yang timbul atas sanksi yang berikan kepada wajib pajak atas keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu, dengan rincian pada **Lampiran 19**.
- c. Saldo Piutang dari Pengembalian merupakan piutang yang timbul dari perhitungan pemotongan iuran Taspen yang kelebihan pemotongan sehingga ada pengembalian ke Kas Daerah dengan cara dicicil;
- d. Saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah merupakan piutang yang timbul atas perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa kerjasama Pemerintah Daerah dengan:
  - 1) PT. Akurasi Kuatmega Indonesia tentang Pembangunan dan Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Maribaya dengan jangka waktu selama 30 Tahun (29 April 2013 – 28 April 2043);
  - 2) PT. Bangun Bina Persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Batujajar dengan jangka waktu selama 20 Tahun (4 November 2013 – 4 November 2033) dan Pasar Panorama Lembang dengan jangka waktu selama 15 Tahun ( 15 Juli 2016 – 15 Juli 2031).
  - 3) PT. Bangun Bina Persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Panorama Lembang dengan jangka waktu selama 15 Tahun ( 15 Juli 2016 – 15 Juli 2031).
  - 4) PT. Bangun Bina Persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Tagog Padalarang dengan jangka waktu selama 15 Tahun (20 Mei 2020 – 20 Mei 2035).

Rincian mutasi Piutang dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah terdapat pada **Lampiran 20**:

- d. Saldo Piutang BLUD merupakan Piutang Jasa Layanan Umum untuk 3 (tiga) BLUD yaitu RSUD Cililin, RSUD Lembang dan RSUD Cikalang Wetan dengan rincian mutasi pada **Lampiran 21**;
- e. Saldo Piutang Dana Non Kapitali, merupakan Piutang atas jasa layanan pada UPT Puskesmas (Non BLUD) dari Klaim BPJS rincian mutasi pada **Lampiran 22**;
- f. Saldo Piutang BLUD PKM – BPJS merupakan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD pada 6 BLUD Puskesmas dengan rincian mutasi pada **Lampiran 23**;
- g. Saldo Piutang bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat yang belum di setor ke Kas Daerah sebesar Rp254.785.044,00 yang tercatat dalam laporan keuangan audited PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat Tahun 2020.

#### 5.3.1.1.2.4. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
-	10.302.178.498,00

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :

Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Jawa Barat	8.801.537.153,00	10.302.178.498,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.801.537.153,00</b>	<b>10.302.178.498,00</b>

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 merupakan jumlah saldo Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil perhitungan yang tetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.160-Bapenda/2021 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2020 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tanggal 25 Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1	PKB	3.020.959.650,00
2	BBNKB	1.561.469.490,00
3	PBBKB	2.941.185.800,00
4	PAP	1.277.922.213,00
	<b>Total</b>	<b>8.801.537.153,00</b>

#### 5.3.1.1.3.1 Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	-	<b>279.265.500,00</b>
Saldo tersebut merupakan saldo Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	279.265.500,00
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara		
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>279.265.500,00</b>

#### 5.3.1.1.3.2 Piutang Lain Lain

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	<b>64.267.160,00</b>	<b>49.724.165,00</b>
Saldo Piutang Lainnya – Piutang Lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat muncul karena adanya tunggakan yang menimbulkan hak tagih berupa Denda Keterlambatan Pembayaran Retribusi IMB.		
Piutang Lain-lain	64.267.160,00	49.724.165,00
<b>Jumlah</b>	<b>64.267.160,00</b>	<b>49.724.165,00</b>

Piutang Lain Lain pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akhir Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam Lampiran 23.a

#### 5.3.1.1.4. Penyisihan Piutang

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	<b>(241.086.999.351,41)</b>	<b>(219.497.141.585,86)</b>
Saldo tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(241.071.590.461,51)	(216.352.595.034,01)
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(15.408.889,90)	(3.144.546.551,85)
<b>Jumlah</b>	<b>(241.086.999.351,41)</b>	<b>(219.497.141.585,86)</b>

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 merupakan jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan klasifikasi tarif penyisihan piutang berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Berbasis Akrual. Perhitungan Penyisihan Piutang merupakan akumulasi Penyisihan Piutang dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018, yang dihitung berdasarkan kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 10%;
- c. Kualitas Piutang Diragukan dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 50%; dan
- d. Kualitas Piutang Macet dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 100%.

Saldo Piutang Netto pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah taksiran/perkiraan nilai realisasi bersih (NRV) dari seluruh nilai nominal Piutang pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang diperkirakan dapat direalisasikan. Informasi lebih lanjut mengenai rincian Perhitungan daftar umur piutang (*aging schedule*) dan penyisihan piutang pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akhir Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam **Lampiran 24**.

#### 5.3.1.1.5. Beban Dibayar Dimuka

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	<b>942.712.277,79</b>	<b>1.010.372.523,60</b>
Saldo tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Beban Sewa Dibayar Dimuka	942.712.277,79	1.010.372.523,60
<b>Jumlah</b>	<b>942.712.277,79</b>	<b>1.010.372.523,60</b>

Saldo Beban Dibayar di Muka merupakan bagian dari pembayaran beban atau pengeluaran belanja yang masa manfaatnya melebihi tanggal Neraca. Pada tanggal Neraca masa manfaat tersebut belum dinikmati atau digunakan. Rincian Beban Dibayar di Muka per OPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.18 Rincian Beban Dibayar di Muka Per OPD**

<b>No.</b>	<b>Nama OPD</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57.847.222,22	57.847.222,22
2.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	20.266.666,67	20.533.333,33
3.	Dinas Lingkungan Hidup	80.000.000,00	80.000.000,00
4	Dinas Perhubungan	916.666,67	
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.166.666,67	5.111.111,11
6	Sekretariat Daerah	602.265.277,78	719.745.301,39
7	Badan Pengelola Keuangan Daerah	126.452.777,78	71.875.000,00
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	24.963.666,67	55.260.555,56
9	Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah	20.833.333,33	
	<b>Jumlah</b>	<b>942.712.277,78</b>	<b>1.010.372.523,60</b>

Perhitungan Beban Dibayar di Muka pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 disajikan dalam **Lampiran 25**.

#### 5.3.1.1.6. Persediaan

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	41.905.474.051,79	30.260.228.324,42
Saldo tersebut merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Persediaan Bahan Pakai Habis	6.414.504.381,00	6.680.590.461,60
Persediaan Bahan/Material	27.277.166.356,69	20.187.994.653,82
Persediaan Barang Lainnya	8.213.803.314,10	3.391.643.209,00
<b>Jumlah</b>	<b>41.905.474.051,79</b>	<b>30.260.228.324,42</b>

Penilaian saldo akhir persediaan menggunakan Metode Periodik dan Metode Perpetual. Sehingga Persediaan diakui sebesar biaya perolehan yang terakhir berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran (Metode Periodik) dan pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Metode Perpetual digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan sifatnya terus-menerus serta membutuhkan kontrol yang besar; seperti: obat-obatan di RSUD dan pupuk di Dinas Pertanian (Metode Perpetual) serta Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).

Informasi lebih lanjut mengenai rincian mutasi Saldo Persediaan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan OPD pengelola pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam **Lampiran 26**.

#### 5.3.1.1.7. Investasi Jangka Panjang

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	44.826.076.448,00	44.620.288.222,00
Saldo tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang – Penyertaan Modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Perdana Multiguna Sarana	34.826.078.148,00	34.620.289.922,00
PMTHMETD – Bank BJB	9.999.998.300,00	9.999.998.300,00
<b>Jumlah</b>	<b>44.826.076.448,00</b>	<b>44.620.288.222,00</b>

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp44.620.288.222,00 merupakan:

- Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat dinilai berdasarkan Metode Ekuitas untuk Investasi pada seluruh BUMD (tingkat kepemilikan lebih dari 50%) yaitu dengan memperhitungkan kondisi/nilai hasil usaha dari Investasi (Laba/Rugi, perubahan ekuitas investasi dan setoran Deviden (Bagian Laba Pemda). Rincian perhitungan nilai Investasi/Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada BUMD PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat per 31 Desember 2020, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.19 Investasi/Penyertaan Modal  
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat**

<b>No</b>	<b>Uraian Perubahan Nilai Investasi / Penyertaan Modal Pemda Pada PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat</b>	<b>(UnAudited) (Rp)</b>
1	PENYERTAAN MODAL PEMDA	
1	Jumlah Modal yg tlh disetor s.d. 31 Des 2019	35.050.000.000,00
2	Jumlah Tambahan Modal disetor s.d. 31 Des 2020	-
<b>3</b>	<b>Jumlah Modal yg tlh disetor s.d. 31 Des 2020</b>	<b>35.050.000.000,00</b>
4	Laba Ditahan :	
5	Cadangan	(1.150.810.534,00)
6	Setoran Modal	-
7	Laba/(Rugi) tahun Berjalan	460.573.270,00
8	Laba/(Rugi) tahun lalu	721.100.456,00
9	Deviden tahun lalu	(254.785.044,00)
<b>10</b>	<b>Nilai Investasi TA 2020</b>	<b>34.826.078.148,00</b>
<b>11</b>	<b>Nilai Investasi TA 2019</b>	<b>34.620.289.922,00</b>
12	Tambahan nilai Investasi TA 2020	205.788.226,00
13	Tambahan Modal Disetor TA 2020	
	<b>Kenaikan/Penurunan nilai Investasi (koreksi ekuitas)</b>	<b>205.788.226,00</b>

**Keterangan:**

Kenaikan/(Penurunan) Nilai Investasi/Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 dicatat sebagai penambah/pengurang nilai Ekuitas pada LPE PPKD, tidak diperlakukan sebagai Keuntungan/(Kerugian) penurunan Nilai Investasi pada Laporan Operasional (sesuai saran Komite Standar Akuntansi Pemerintahan).

- b. Penambahan modal tanpa memberi hak memesan efek terlebih dahulu (PMT HMETD) atas saham Seri A pada Bank BJB dengan jumlah saham yang beli sebanyak 5.263.157 lembar dengan harga penerbitan saham senilai Rp1.900,00 sehingga nilai total yang di investasi jangka pendek adalah sebesar Rp9.999.998.300,00. Pembelian saham tersebut telah ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep.662-Bag Ekon/2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bandung Barat ke Dalam Modal Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK.

**5.3.2. Aset Tetap**

<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
3.016.860.479.390,20	2.844.823.257.408,87

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :

Tanah	636.732.305.644,00	599.702.742.354,00
Peralatan dan Mesin	1.002.219.256.521,32	760.273.742.396,63
Gedung dan Bangunan	1.574.765.416.727,84	1.544.348.168.502,84
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.074.307.982.211,59	1.058.534.952.446,47
Aset Tetap Lainnya	215.050.140.095,63	199.367.998.676,76
Konstruksi Dalam Penggerjaan	119.065.450.050,00	46.322.217.299,00
Akumulasi Penyusutan	(1.605.280.071.860,18)	(1.363.726.564.266,83)
<b>Jumlah</b>	<b>3.016.860.479.390,20</b>	<b>2.844.823.257.408,87</b>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pelayanan masyarakat. Aset Tetap diakui sebesar Harga Perolehannya.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp3.016.860.479.390,20 dan Rp2.844.823.257.408,87 dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp(1.605.280.071.860,18) dan Rp(1.363.726.564.266,83).

### 5.3.2.1. Tanah

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	636.732.305.644,00	599.702.742.354,00
Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap - Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Tanah Persil	286.810.266.568,00	-
Tanah Non Persil	76.578.207.737,00	-
Lapangan	273.343.831.339,00	-
Tanah Perkampungan	-	33.899.145.081,00
Tanah Pertanian	-	64.070.373,00
Kolam Ikan	-	699.069.820,00
Tanah Tandus/Rusak	-	546.366.000,00
Alang-alang dan Padang Rumput	-	6.252.706.400,00
Tanah Pengguna Lain	-	162.109.912.400,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	-	312.642.654.727,00
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	-	83.488.817.553,00
<b>Jumlah</b>	<b>636.732.305.644,00</b>	<b>599.702.742.354,00</b>

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp636.732.305.644,00 dan Rp599.702.742.354,00. Saldo Aset Tetap -Tanah per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp37.029.563.290,00 dibanding saldo per 31 Desember 2018 dengan prosentase peningkatan sebesar 6,17%,

Perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap - Tanah Tahun 2020 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

#### Uraian Mutasi

<b>Saldo Per 31 Desember 2019</b>	<b>599.702.742.354</b>
<b>Mutasi Penambahan TA 2020</b>	
Belanja Modal	7.133.690.500,00
Utang BM	-
Hibah	37.423.400.000,00
Reklas Pencatatan	-
Mutasi dari SKPD Lain	2.908.433.300,00
Koreksi Pembukuan	99.000.000,00
<b>Total Penambahan</b>	<b>47.564.523.800,00</b>
<b>Mutasi Berkurang TA 2020</b>	
Mutasi ke SKPD Lain	2.908.433.300,00
Penghapusan	-
Hibah	-

Reklas Pencatatan (Antar KIB)	-
Reklas ke Ekstrakompatabel	-
Reklas Ke Aset Lainnya	7.552.442.210,00
Koreksi Pembukuan	-
Pembayaran Utang	74.085.000,00
<b>Total Pengurangan</b>	<b>10.534.960.510,00</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>636.732.305.644</b>

Dari total Aset Tetap – Tanah tersebut di atas terdapat beberapa bidang tanah yang menjadi sengketa. Dengan rincian perkembangan perkara sebagai berikut:

NO.	NOMOR GUGATAN	URAIAN	KETERANGAN
1.	221/Pdt.G/E.COURT/2019/Pn. Blb	Gugatan terkait tanah di Blok Tarikolot Persil 10 b kelas D IV Kohir Nomor 414/1481 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat seluas ± 1860 m <sup>2</sup> Dengan Penggugat <b>JUDI RAHAYU SETIADI</b> Melawan <b>BUPATI BANDUNG BARAT</b> .	Masih Dalam Proses Sidang Di Pengadilan Bale Bandung Dengan Agenda Mediasi
2.	240/Pdt. G/2019/Pn.Blb	Gugatan terhadap sebidang tanah seluas 507 m <sup>2</sup> yang terletak di Blok Bebedahan SHM Nomor 03363 Kp. Cijeungjing RT 02/RW 016 Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang saat ini dipergunakan untuk proses belajar mengajar SDN II Kertamulya dengan Penggugat <b>YULIANI</b> Melawan <b>BUPATI BANDUNG BARAT</b> .	Masih dalam proses sidang di Pengadilan Bale Bandung Dengan Agenda Mediasi .
3.	248/Pdt.G/2018/Pn.Blb	<p>1. Kasus Gugatan terhadap Pasar Panorama Lembang Pernah Digugat Oleh Rudi Alamsyah Pada Tahun 2007 dengan Nomor Perkara 155/PDt.G/2016/PN. Blb terhadap Bupati Bandung Barat dan perkara ini <b>telah incrah</b> dengan dikeluarkannya Putusan MA nomor 2429.K/Pdt/2018;</p> <p>2. Kemudian Pada Tahun 2019 di Gugat kembali Oleh Penggugat yang berbeda dengan Nama Penggugat <b>RONNIE NOMA</b> terhadap <b>Rudi Alamsyah DKK</b> sebagai Tergugat termasuk Bupati Bandung barat Sebagai TERGUGAT XV, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Sebagai TERGUGAT XVI , dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat Sebagai TERGUGAT XVII.</p>	Pada Gugatan dengan nomor 248/Pdt.G/2018/Pn.Blb telah dimenangkan oleh PEMDA KBB dan telah Dikeluarkannya Putusan Pengadilan , Kemudian dari Pihak Penggugat Melakukan Banding dan sekarang Proses Banding tersebut masih berjalan prosesnya di Pengadilan Tinggi.

4.	104/Pdt.G/2017/Pn.Blb	Pada Tahun 2017 Ir. Oting Ganda Miharja, dkk menggugat <b>Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lembang sebagai TERGUGAT I</b> , dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat C.q Bupati Bandung Barat, C.q Dinas Pendidikan dan Olahraga sebagai <b>TERGUGAT II</b> menuntut sebidang tanah ± 10000 m <sup>2</sup> dengan Persil 85a DII C Nomor 46 yang saat ini dipergunakan untuk proses belajar mengajar SMP 3 Lembang	Gugatan ini dimenangkan oleh Para Tergugat, kemudian Penggugat melakukan upaya hukum banding dengan nomor 384/Pdt.G/2018/PT.BDG dan masih dimenangkan oleh Para Tergugat.
----	-----------------------	---	---

Informasi lebih lanjut mengenai rincian mutasi Saldo Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020, terdapat pada **Lampiran 27**.

### 5.3.2.2. Peralatan dan Mesin

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	1.002.219.256.521,32	760.273.742.396,63
Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Alat Besar Darat	31.345.284.315,00	28.553.787.080,00
Alat Besar Apung	44.297.480,00	34.017.480,00
Alat Bantu	5.484.673.739,00	3.424.042.177,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	121.300.150.361,00	118.471.723.898,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.207.015.511,00	979.122.600,00
Alat Angkutan Apung Bermotor	406.176.886,00	346.976.886,00
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	469.755.750,00	469.755.750,00
Alat Bengkel Bermesin	767.389.489,00	786.405.289,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	1.448.470.630,92	1.063.540.815,15
Alat Ukur	8.487.126.577,45	9.183.226.047,11
Alat Pengolahan	15.986.542.817,17	14.029.500.792,17
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	0	8.269.697.805,80
Alat Kantor	87.036.408.791,06	36.587.682.608,33
Alat Rumah Tangga	132.280.731.758,57	77.618.670.339,85
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16.794.018.804,67	15.916.774.970,68
Alat Studio	28.012.517.520,10	18.159.213.081,52
Alat Komunikasi	9.877.687.545,67	7.155.285.294,58
Peralatan Pemancar	3.041.196.845,00	646.963.904,41
Alat Kedokteran	205.655.854.710,81	151.337.469.853,96
Alat Kesehatan Umum	3.249.271.008,62	21.614.079.779,84
Unit Alat Laboratorium	46.019.020.647,52	28.423.341.925,10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1.496.554.503,00	583.681.063,00
Alat Peraga/Praktek Sekolah	49.650.173.028,84	67.924.739.310,95
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.552.540.984,68	1.353.586.358,00
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	67.190.800,00	20.836.416.928,00
Destroyive Testing Laboratory	24.970.000,00	1.984.633.697,04
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	11.515.881.436,00	2.506.808.823,00
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	1.596.398.354,08	2.236.025.157,08

Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	1.125.559.254,00	-
Senjata Api	152.478.319,00	90.183.137,00
Persenjataan Non Senjata Api	1.175.641.288,00	664.978.257,00
Alat Khusus Kepolisian	3.160.922.574,32	-
Komputer Unit	108.734.969.189,41	-
Peralatan Komputer	39.453.171.879,36	119.021.411.287,06
Alat Eksplorasi Topografi	84.862.817,00	-
Sumur	307.149.426,00	-
Produksi	118.965.000,00	-
Alat Pelindung	116.158.150,00	-
Alat Sar	5.605.074.946,87	-
Alat Kerja Penerbangan	126.381.224,00	-
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	18.554.638.415,14	-
Unit Peralatan Proses/Produksi	395.230.750,00	-
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	31.061.318.207,26	-
Peralatan Olah Raga	7.221.255.885,80	-
Pengolahan dan Pemurnian	1.448.000,00	-
Peralatan Komunikasi Navigasi	3.000.000,00	-
Alat Pengeboran Mesin	2.230.900,00	-
Alat Deteksi	1.500.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.002.219.256.521,32</b>	<b>760.273.742.396,63</b>

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.002.219.256.521,32 dan Rp760.273.742.396,63. Saldo Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp241.945.514.124,69 dibanding saldo per 31 Desember 2019 dengan prosentase bertambah sebesar 32,82 %.

Perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

#### **Uraian Mutasi**

<b>Saldo Per 31 Desember 2019</b>	<b>760.273.742.397</b>
<b>Mutasi Penambahan TA 2020</b>	
Belanja Modal	190.396.585.609,00
Mapping SA 108	40.654.239.061,47
Belanja Tidak Terduga	951.816.077,00
Hibah	1.689.245.000,00
Reklas dari Belanja Modal	40.541.408.562,00
Mutasi dari SKPD Lain	2.385.155.090,00
Koreksi Pembukuan	-
<b>Total Penambahan</b>	<b>276.618.449.399,47</b>
<b>Mutasi Berkurang TA 2020</b>	
Mapping SA 108	10.415.380.330,56
Mutasi Antar SKPD	2.385.155.090,00
Pembayaran Utang	14.425.957.018,00
Raklas dari Belanja Modal	1.236.891.990,00
Reklas ke Ekstrakompatabel	1.295.649.994,00

Reklas Ke Aset Lainnya	2.468.435.406,00
Reklas Ke Persediaan	2.297.838.296,22
Koreksi Pembukuan	147.627.150,00
<b>Total Pengurangan</b>	<b>34.672.935.274,78</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>1.002.219.256.522</b>

Adapun rincian penggunaan oleh SKPD atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut dan informasi lebih lanjut mengenai rincian mutasi Saldo Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020, terdapat pada **Lampiran 28**.

### 5.3.2.3. Gedung dan Bangunan

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	1.574.765.416.727,84	1.544.348.168.502,84
Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.543.686.010.710,45	1.527.376.283.824,72
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8.170.648.679,75	4.594.053.789,75
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	795.006.500,00	-
Bangunan Menara	161.385.571,00	161.385.571,00
Tugu/Tanda Batas	21.952.365.266,64	2.860.408.070,00
Bangunan Bersejarah	-	209.296.000,00
Tugu Peringatan	-	802.280.472,37
Monumen/Bangunan Bersejarah	-	1.144.359.000,00
Tugu Peringatan Lain	-	258.152.000,00
Rambu-Rambu	-	6.941.949.775,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.574.765.416.727,84</b>	<b>1.544.348.168.502,84</b>

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.574.765.416.727,84 dan Rp1.544.348.168.502,84. Saldo Aset Tetap –Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp 30.417.248.225,00 dibanding saldo per 31 Desember 2019 dengan prosentase bertambah sebesar 1,97%. Perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Tahun 2020 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

#### Uraian Mutasi

<b>Saldo Per 31 Desember 2019</b>	<b>1.544.348.168.502,84</b>
<b>Mutasi Penambahan TA 2020</b>	
Belanja Modal	113.378.948.383,00
Mapping SA 108	1.848.863.824,50
Belanja Tidak Terduga	-
Hibah	-
Reklas dari Belanja Modal	6.226.264.447,00
Mutasi dari SKPD Lain	89.538.218.938,00
Koreksi Pembukuan	462.617.050,00
<b>Total Penambahan</b>	<b>211.454.912.642,50</b>

**Mutasi Berkurang TA 2020**

Koreksi Saldo Awal	802.937.000,00
Mapping SA 108	15.361.765.486,50
Mutasi Antar SKPD	89.538.218.938,00
Pembayaran Utang	3.672.652.449,16
Raklas dari Belanja Modal	69.727.016.948,84
Reklas ke Ekstrakompatabel	8.700.000,00
Reklas Ke Aset Lainnya	1.449.044.000,00
Reklas Ke Persediaan	14.712.545,00
Koreksi Pembukuan	462.617.050,00
<b>Total Pengurangan</b>	<b>181.037.664.417,50</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>1.574.765.416.727,84</b>

Adapun rincian penggunaan oleh SKPD atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan informasi lebih lanjut mengenai rincian mutasi Saldo Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020, terdapat pada **Lampiran 29**.

**5.3.2.4. Jalan Irigasi dan Jaringan**

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	1.074.307.982.211,59	1.058.534.952.446,47
Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Jalan	707.243.368.950,13	691.590.393.861,13
Jembatan	18.232.941.231,00	17.676.648.231,00
Bangunan Air Irigasi	206.781.627.758,50	201.932.332.101,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	449.169.455,00	469.559.125,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	100.885.046.894,00	88.160.498.943,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.072.406.205,00	116.029.000,00
Bangunan Air Bersih/Baku	6.938.250.772,00	3.374.740.026,00
Bangunan Air Kotor	755.031.000,00	674.702.000,00
Bangunan Air	-	1.036.252.181,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.746.293.605,34	1.955.757.031,34
Instalasi Air Kotor	3.426.393.248,00	1.305.351.215,00
Instalasi Pengolahan Sampah	312.231.944,00	26.853.350,00
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	-	198.159.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	2.632.207.000,00	2.632.207.000,00
Instalasi Gardu Listrik	9.057.357.232,62	9.130.290.357,62
Instalasi Pertahanan	84.322.000,00	84.322.000,00
Instalasi Gas	-	289.696.650,00
Instalasi Pengaman	428.081.200,00	183.483.000,00
Jaringan Air Minum	9.995.516.001,00	10.001.983.001,00
Jaringan Listrik	3.590.421.144,00	27.159.573.101,38
Jaringan Telepon	604.716.571,00	463.521.272,00
Jaringan Gas	72.600.000,00	72.600.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.074.307.982.211,59</b>	<b>1.058.534.952.446,47</b>

Saldo Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.074.307.982.211,59 dan Rp1.058.534.952.446,47. Saldo Aset Tetap –Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp15.773.029.765,12 dibanding saldo per 31 Desember 2019 dengan prosentase bertambah sebesar 1,49%, dengan rincian dengan rincian perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

**Uraian Mutasi**

<b>Saldo Per 31 Desember 2019</b>	<b><u>1.058.534.952.446,47</u></b>
<b>Mutasi Penambahan TA 2020</b>	
Belanja Modal	82.998.056.756,00
Mapping SA 108	6.749.141.821,50
Belanja Tidak Terduga	-
Hibah	-
Reklas dari Belanja Modal	6.053.388.153,00
Mutasi dari SKPD Lain	-
Koreksi Pembukuan	-
<b>Total Penambahan</b>	<b><u>95.800.586.730,50</u></b>
<b>Mutasi Berkurang TA 2020</b>	
Koreksi Saldo Awal	-
Mapping SA 108	26.414.267.358,38
Mutasi Antar SKPD	-
Pembayaran Utang	52.422.034.983,00
Raklas dari Belanja Modal	1.071.254.623,00
Reklas ke Ekstrakompatabel	-
Reklas Ke Aset Lainnya	120.000.001,00
Reklas Ke Persediaan	-
Koreksi Pembukuan	-
<b>Total Pengurangan</b>	<b><u>80.027.556.965,38</u></b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b><u>1.074.307.982.211,59</u></b>

Adapun rincian penggunaan oleh SKPD atas Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dan informasi lebih lanjut mengenai rincian mutasi Saldo Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020, terdapat pada **Lampiran 30**.

**5.3.2.5. Aset Tetap Lainnya**

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
Aset Tetap Lainnya	215.050.140.095,63	199.367.998.676,76
Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Bahan Perpustakaan Tercetak	198.970.670.560,45	182.123.851.884,47
Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	38.571.500,00	-
Kartografi, Naskah Dan Lukisan	1.110.325.166,31	-
Musik	482.000,00	-
Karya Grafika (Graphic Material)	11.755.000,00	-
Three Dimensional Artefacs And Realita	1.849.800,00	-

Tarscalt	135.000,00	-
Barang Bercorak Kesenian	10.528.269.754,00	-
Alat Bercorak Kebudayaan	782.812.030,06	-
Tanda Penghargaan	88.427.000,00	-
Hewan Piaraan	13.300.000,00	-
Ternak	432.873.334,00	-
Tanaman	2.184.102.859,81	1.965.598.111,81
Aset Tetap Dalam Renovasi	886.566.091,00	344.680.000,00
Terbitan	-	238.797.529,98
Barang-Barang Perpustakaan	-	1.353.371.798,71
Barang Bercorak Kebudayaan	-	10.379.558.922,33
Alat Olah Raga Lainnya	-	2.515.967.095,46
Hewan	-	446.173.334,00
<b>Jumlah</b>	<b>215.050.140.095,63</b>	<b>199.367.998.676,76</b>

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp215.049.584.419,63 dan Rp199.367.998.676,76. Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp15.681.585.742,87 dibanding saldo per 31 Desember 2019 dengan prosentase bertambah sebesar 7,87%.

Perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Tahun 2020 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

#### **Uraian Mutasi**

<b>Saldo Per 31 Desember 2019</b>	<b>199.367.998.676,76</b>
<b>Mutasi Penambahan TA 2020</b>	
Belanja Modal	66.000.836.058,00
Mapping SA 108	5.181.747.332,96
Belanja Tidak Terduga	-
Hibah	-
Reklas dari Belanja Modal	199.109.961,00
Mutasi dari SKPD Lain	-
Koreksi Pembukuan	555.676,00
<b>Total Penambahan</b>	<b>71.382.249.027,96</b>
<b>Mutasi Berkurang TA 2020</b>	
Koreksi Saldo Awal	-
Mapping SA 108	7.382.307.946,09
Mutasi Antar SKPD	-
Pembayaran Utang	87.936.819,84
Raklas dari Belanja Modal	48.198.074.043,16
Reklas ke Ekstrakompatabel	-
Reklas Ke Aset Lainnya	31.788.800,00
Reklas Ke Persediaan	-
Koreksi Pembukuan	-
<b>Total Pengurangan</b>	<b>55.700.107.609,09</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>215.050.140.095,63</b>

Adapun rincian penggunaan oleh OPD atas Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya dan informasi lebih lanjut mengenai rincian mutasi Saldo Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020, terdapat pada **Lampiran 31**.

#### 5.3.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	119.065.450.050,00	46.322.217.299,00
Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
<u>Konstruksi Dalam Pengerjaan</u>	119.065.450.050,00	46.322.217.299,00
<b>Jumlah</b>	<b>119.065.450.050,00</b>	<b>46.322.217.299,00</b>

Saldo Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp119.065.450.050,00 dan Rp46.322.217.299,00. Saldo Aset Tetap–Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 bertambah sebesar Rp72.743.232.751,00 dibanding saldo per 31 Desember 2019 dengan prosentase bertambah sebesar 157,04%,

Perhitungan mutasi atas nilai Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2020 dengan ikhtisar perhitungan sebagai berikut:

#### Uraian Mutasi

<b>Saldo Per 31 Desember 2019</b>	<b>46.322.217.299,00</b>
<b>Mutasi Penambahan TA 2020</b>	
Belanja Modal	-
Mapping SA 108	-
Belanja Tidak Terduga	-
Hibah	-
Reklas dari Belanja Modal	72.743.232.751,00
Mutasi dari SKPD Lain	-
Koreksi Pembukuan	-
<b>Total Penambahan</b>	<b>72.743.232.751,00</b>
<b>Mutasi Berkurang TA 2020</b>	
Koreksi Saldo Awal	-
Mapping SA 108	-
Mutasi Antar SKPD	-
Pembayaran Utang	-
Raklas dari Belanja Modal	-
Reklas ke Ekstrakompatabel	-
Reklas Ke Aset Lainnya	-
Reklas Ke Persediaan	-
Koreksi Pembukuan	-
<b>Total Pengurangan</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>119.065.450.050,00</b>

Adapun rincian penggunaan oleh OPD atas Aset Tetap – Kontruksi Dalam Pengerjaan dan informasi lebih lanjut mengenai rincian mutasi Saldo Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020, terdapat pada **Lampiran 32**.

#### 5.3.2.7. Akumulasi Penyusutan

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	(1.605.280.071.860,18)	(1.363.726.564.266,83)
Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(693.701.309.707,86)	(567.197.067.061,51)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(267.070.994.250,75)	(222.880.775.314,47)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(644.507.767.901,57)	(573.648.721.890,85)
<b>Jumlah</b>	<b>(1.605.280.071.860,18)</b>	<b>(1.363.726.564.266,83)</b>

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik. Pada akhir tahun pertama aset dimanfaatkan, besarnya akumulasi penyusutan adalah sama dengan besarnya beban penyusutan selama tahun pertama pemakaian aset tersebut. Pada akhir tahun kedua, besarnya akumulasi penyusutan merupakan penjumlahan antara besarnya beban penyusutan untuk tahun pertama pemakaian dengan beban penyusutan untuk tahun kedua pemakaian, dan seterusnya. Akun akumulasi penyusutan merupakan akun pengurang (contra account) dari akun aset yang bersangkutan.

#### 5.3.3. Aset Lainnya

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	130.859.840.581,52	124.218.749.599,43
Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	11.855.651.475,84	5.813.421.824,67
Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah	53.999.373.530,00	47.077.631.480,00
Aset Tidak Berwujud	875.420.640,00	-
Asel Lain Lain (Aset Rusak Berat/Dlm Proses Penghapusan)	70.844.517.728,10	76.700.355.485,60
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(6.715.122.792,42)	(5.372.659.190,84)
<b>Jumlah</b>	<b>130.859.840.581,52</b>	<b>124.218.749.599,43</b>

Jumlah tersebut pada tanggal Neraca merupakan nilai total saldo Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari:

##### a. Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp11.855.651.475,84 dan Rp5.813.421.824,67 merupakan TGR kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, dan pihak ketiga yang telah ditetapkan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Saldo TGR per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp6.042.229.651,17 atau mencapai 103,94 %.

Adapun Mutasi TGR selama Tahun 2020 kami jelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Per 31 Desember 2019	5.813.421.824,67
2. Rekals dari Bagian Lancar	279.265.500,00
3. Penambahan Tahun 2020	939.719.728,50
4. Reklas dari Piutanga Lain Lain (an.Meta)	5.560.699.870,00
5. Reklas dari Piutanga Lain Lain (an. Dr Oni)	2.154.624.030,00
6. Pembayara Selama Tahun 2020	(780.416.876,01)
7. Penghapusan	(243.388.753,00)
8. Pembayaran Tahun Lalu yang diakui di tahun 2020	(1.868.273.848,32)
<b>Total TGR Per 31 Desember 2020</b>	<b>11.855.651.475,84</b>

**b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa:

- Bangun Guna Serah (BGS) atau *Built Operation Transfer* (BOT)
- Bangun Serah Guna (BSG) atau *Built Transfer Operation* (BTO)

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp53.999.373.530,00 dan Rp47.077.631.480,00. Saldo tersebut tidak mengalami penambahan dari saldo sebelumnya per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp6.921.742.050,00 atau mencapai 14,70%. Penambahan tersebut diatas merupakan penggunaan aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dikerjasamakan untuk pembangunan Pasar Tagog Padalarang dengan PT Bangun Bina persada, adapun aset tetap yang diserahkan tersebut terdiri dari Aset Tetap - Tanah senilai Rp6.921.742.050,00.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut merupakan kerja sama dalam bentuk *Built Operation Transfer* (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS) pada Pemerintah Kabupaten bandung Barat kami lampirkan pada table di bawah ini:

**Tabel 5.20 Tabel Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Per 31 Desember 2020**

No.	Perjanjian Bangun Guna Serah	Jangka Waktu Kerjasama	Nilai
			(Rp)
1	Akta Notaris Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn. Nomor 12 Tanggal 29 April 2013 dengan PT. Akurasi Kuatmega Indonesia tentang Pembangunan dan Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Maribaya	30 Tahun (29 April 2013 – 28 April 2043)	15.228.241.452,00
2	Nomor: 510/Perj.05-Disperindkop&UMKM/2013 dan Nomor: 058/BBP-Bd.Br/XI/2013 tanggal 4 November 2013 dengan PT. Bangun Bina Persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Batujajar Kabupaten Bandung Barat	20 Tahun (4 November 2013 – 4 November 2033)	1.938.390.028,00
3	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pengelolaan dan Penyerahan (BGS) Pasar Panorama Lembang tanggal 15 Juli 2016	15 Tahun ( 15 Juli 2016 – 15 Juli 2031)	29.911.000.000,00
4	PT. Bangun Bina Persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Tagog Padalarang Nomor 032/P.BGS.04-Disperindag/2020; Nomor012/BP.Pst.Tgg/PKS/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020	15 Tahun (20 Mei 2020 – 20 Mei 2035)	6.921.742.050,00
<b>Jumlah</b>			<b>53.999.373.530,00</b>

**c. Aset Tidak Berwujud**

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi merek, sertifikat ISO, detail desain, *software* computer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo Aset Tidak Berwujud (ATB) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp875.420.640,00 dan Rp0,00, saldo tersebut mengalami kenaik sebesar 100% dari nilai Aset Tak Berwujud Tahun 2019, rincian nilai Aset Tidak Berwujud pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **Lampiran 33**.

**d. Aset Lain-lain**

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	<b>64.129.394.935,68</b>	<b>71.327.696.294,76</b>
Saldo tersebut merupakan saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Aset Lain Lain (Aset Rusak Berat/Dlm Proses Penghapusan).	31.516.661.284,65	29.657.175.142,15
Piutang dalam proses penetapan	-	7.715.323.900,00
Aset Tidak Berwujud Dalam Proses Inventaris Manfaat	39.327.856.443,45	39.327.856.443,45
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat.	(6.715.122.792,42)	(5.372.659.190,84)
<b>Jumlah</b>	<b>64.129.394.935,68</b>	<b>71.327.696.294,76</b>

Aset Lain-lain dalam Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Aset Tidak Berwujud. Aset Lain-lain dapat berupa Aset Tetap Pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah dan dalam kondisi rusak berat yang belum dihapuskan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 64.129.394.935,68 dan Rp71.327.696.294,76, saldo tahun 2020 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp(7.198.301.359,08) atau mencapai 10,09% rincian nilai Aset Lain-lain pada masing-masing OPD dapat dilihat pada **Lampiran 34**.

**5.3.4. Kewajiban**

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	<b>12.682.765.397,33</b>	<b>111.128.031.708,84</b>
Saldo tersebut merupakan saldo Kewajiban yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Kewajiban Jangka Pendek	12.682.765.397,33	111.128.031.708,84
<b>Jumlah</b>	<b>12.682.765.397,33</b>	<b>111.128.031.708,84</b>

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Rincian Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan bagian utang jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 bulan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp12.682.765.397,33 dan Rp111.128.031.708,84, saldo per 31 Desember 2020 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp(98.445.266.311,51), adapun rincian kewajiban tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

#### 5.3.4..1 Kewajiban Jangka Pendek

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	<b>12.692.117.297,33</b>	<b>111.128.031.708,84</b>
Saldo tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari :		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)	792.227,00	67.808.469,00
Pendapatan Diterima Dimuka	3.555.222.021,33	2.691.067.477,67
Utang Belanja	8.551.367.209,00	108.005.218.622,17
Utang Jangka Pendek Lainnya	575.382.940,00	363.937.140,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.682.765.397,33</b>	<b>111.128.031.708,84</b>

##### 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)

Saldo utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp792.227,00 dan Rp67.808.469,00 saldo tahun 2020 tersebut terjadi penurunan sebesar adalah sebesar Rp(67.016.242,00) atau mencapai 98,83%

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2020 sebesar Rp792.227,00 merupakan kas dari penerimaan Pajak pada Bendahara Pengeluaran Sekolah Dasar dan Menengah yang belum disetorkan ke Kas Negara dengan rincian Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF) Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disajikan sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Utang Pajak			
			PPH 21	PPH 23	PPN	TOTAL
1	Sdn margaasih	Cipatat	-	26.350	300.000	326.350
3	Sdn ciptagumati	Cikalongwetan	-	-	327.197	327.197
4	Sdn hanjuangsari	Parongpong	-	-	138.680	138.680
<b>Jumlah</b>						<b>792.227</b>

##### 2) Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima di Muka pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp3.555.222.021,33 dan Rp2.691.067.477,67 yang merupakan pembayaran di muka atas Pajak Reklame, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), dan Penerimaan Konpensasi Dampak Negatif dari Kabupaten Bandung adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	2020	2019
		(Rp)	(Rp)
	<b>Pendapatan Diterima di Muka</b>	<b>3.564.574.921,33</b>	<b>2.691.067.477,67</b>
1.	Pajak Reklame	1.672.459.938,00	-
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	404.640.833,33	257.373.633,33

NO.	URAIAN	2020	2019
		(Rp)	(Rp)
3.	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.478.121.250,00	737.931.483,00
4.	Penerimaan KDN dari Kabupaten Bandung	-	1.000.000,00
5	Penerimaan Jasa Pelayanan RS Cikalang Wetan	9.352.900	

Informasi lebih lanjut mengenai rincian Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada **Lampiran 35**.

### 3) Utang Belanja

Saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp8.551.367.209,00 dan Rp108.005.218.622,17. Saldo Utang Beban/Belanja per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.21 Rincian Utang Beban/Belanja**

No.	Jenis Utang Beban	Saldo Per 2020	Saldo Per 2019
	<b>Utang Belanja</b>	<b>8.551.367.209,00</b>	<b>108.005.218.622,17</b>
<b>A</b>	<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.473.581.959,00</b>	<b>37.242.409.758,33</b>
1	Utang Bimbingan Teknis	-	81.031.500,00
2	Belanja Alat Perbekalan Kesehatan	-	159.869.600,00
3	Utang Pemeliharaan Jalan	-	11.181.643.000,00
4	Utang Pemeliharaan Jembatan	-	1.728.393.000,00
5	Utang Persediaan bahan/bibit tanaman	-	24.171.000,00
6	Utang Jasa Konsultansi Penelitian	-	296.807.500,00
7	Utang Jasa Konsultansi Perencanaan	-	2.558.297.500,00
8	Utang Jasa Konsultansi Pengawasan	-	629.027.300,00
9	Utang Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/masyarakat pada SKPD	-	12.358.481.069,00
10	Utang Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/masyarakat pada SKPD	-	123.557.500,00
11	Utang Sosialisasi	68.500.000,00	68.500.000,00
12	Utang Barang dan Jasa BLUD	2.891.278.355,00	-
13	Utang Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	-	3.612.287.366,93
14	Utang Persediaan bahan obat-obatan	-	630.501.510,00
15	Utang Bahan Kimia dan Pupuk	-	451.992.800,00
16	Utang Jasa telepon	195.021,00	581.424,00
17	Utang Jasa air	385.900,00	494.600,00
18	Utang Jasa listrik	895.543.766,00	910.137.585,00
19	Utang Jasa kawat/faksimili/internet	6.311.750,00	6.742.584,00
20	Utang Pembayaran Klaim Peserta Kartu Cermat Bidang Kesehatan	-	241.903.481,00
21	Utang Pakaian Batik Tradisional	143.418.000,00	2.177.989.438,40
22	Utang Jasa Pelayanan	4.467.949.167,00	2.177.989.438,40
<b>B</b>	<b>Utang Belanja Modal</b>	<b>49.730.000,00</b>	<b>70.734.752.613,84</b>
1	Utang Belanja Modal Tanah	-	74.085.000,00
2	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	14.425.957.018,00
3	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.730.000,00	3.706.177.793,00
4	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	52.422.034.983,00
5	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	106.497.819,84
<b>C</b>	<b>Utang Belanja Lain-lain</b>	<b>28.056.250,00</b>	<b>28.056.250,00</b>
1	Utang Jamkesda	28.056.250,00	28.056.250,00

Informasi lebih lanjut mengenai rincian mutasi Utang Beban/Utang Belanja Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam **Lampiran 36**

.

#### 4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp575.382.940,00 dan Rp363.937.140,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya ini merupakan utang Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri atas utang sebagai bentuk Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Persampahan Tahun 2020 kepada masyarakat Sarimukti sebesar Rp522.957.400,00 dan utang Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Persampahan Tahun 2010 kepada masyarakat Sarimukti sebesar Rp52.425.540,00.

Informasi lebih lanjut mengenai rincian mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam **Lampiran 38**.

#### 5.3.5. Ekuitas

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	3.569.097.602.778,35	3.370.716.450.835,66
Saldo tersebut merupakan saldo Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat		
<b>EKUITAS</b>	<b>3.569.097.602.778,35</b>	<b>3.370.716.450.835,66</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3.569.097.602.778,35</b>	<b>3.370.716.450.835,66</b>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp3.569.097.602.778,35 dan Rp3.370.002.108.955,66. Saldo Ekuitas Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp198.381.151.942,69 atau mencapai 5,89%.

#### 5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.22 Ikhtisar Laporan Operasional Tahun 2020**

No	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
1	PENDAPATAN	2.870.996.172.429,52	2.971.879.682.404,24	(100.883.509.974,72)	(3,39)
2	BEBAN	2.655.118.855.542,56	2.958.067.277.592,10	(302.948.422.049,54)	(10,24)

3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	215.877.316.886,96	13.812.404.812,14	202.064.912.074,82	1.462,92
4	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(122.024.321,30)	-	(122.024.321,30)	100,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>215.755.292.565,66</b>	<b>13.812.404.812,14</b>	<b>201.942.887.753,52</b>	<b>1.462,04</b>

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh informasi secara garis besar sebagai berikut:

- Jumlah Pendapatan Operasional yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp2.870.996.172.429,52 dan Rp2.971.879.682.404,24. Saldo Tahun Anggaran 2019 tersebut turun sebesar Rp(100.883.509.974,72) atau 3,39% dibandingkan Pendapatan Operasional yang dicapai periode sebelumnya.
- Jumlah Beban Operasional Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode Tahun Anggaran 2020 dan 2019 mencapai sebesar Rp2.655.118.855.542,56 dan Rp2.958.067.277.592,10. Saldo Tahun Anggaran 2019 tersebut turun Rp(302.948.422.049,54) atau (10,24)% dibandingkan Beban Operasional yang dicapai periode sebelumnya.
- Capaian Pendapatan dan Beban Operasional Tahun Anggaran 2020 dan 2019 tersebut menghasilkan Surplus/Defisit dari Operasi periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp215.877.316.886,96 dan Rp13.812.404.812,14. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp202.064.912.074,82 atau 1.462,92 % dari capaian Surplus/Defisit dari Operasi periode sebelumnya.
- Suplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp(122.024.321,30) dan Rp0,00.
- Atas hal-hal tersebut, Surplus/Defisit – LO yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada akhir periode Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebesar Rp215.755.292.565,66 dan Rp13.812.404.812,14, saldo Tahun Anggaran Tahun 2020 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp201.942.887.753,52 atau 1.462,04% dari nilai Surplus/Defisit-LO yang dicapai pada periode sebelumnya.

#### 5.4.1. Pendapatan – LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
Pendapatan Asli Daerah – LO	2.870.996.172.429,52	2.971.879.682.404,24
Pendapatan Transfer – LO	2.116.577.902.464,00	2.209.440.440.966,00
Lain-lain Pendapatan yang sah - LO	245.282.708.319,00	192.549.796.597,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.870.996.172.429,52</b>	<b>2.971.879.682.404,24</b>

Jumlah Pendapatan Operasional yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp2.870.996.172.429,52 dan Rp2.971.879.682.404,24. Saldo tahun 2020 tersebut turun sebesar Rp(100.883.509.974,72) atau (3,39)% dibandingkan nilai Pendapatan Operasional yang dicapai periode Tahun Anggaran 2019.

#### 5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah –LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	<b>509.135.561.646,52</b>	<b>569.889.444.841,24</b>
<b>Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Asli Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :</b>		
Pendapatan Pajak Daerah	374.398.022.141,34	419.646.441.299,57
Pendapatan Retribusi Daerah	18.754.535.533,00	40.778.995.427,67
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	749.627.065,00	470.526.236,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	115.233.376.907,18	108.993.481.878,00
<b>Jumlah</b>	<b>509.135.561.646,52</b>	<b>569.889.444.841,24</b>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah – LO yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode Tahun Anggaran 2020 - 2019 adalah sebesar Rp509.135.561.646,52 dan Rp569.889.444.841,24. Saldo tahun 2020 tersebut turun sebesar Rp(60.753.883.194,72) atau 10,66% dibandingkan nilai Pendapatan Operasional yang dicapai periode Tahun Aanggaran 2019.

#### 5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah –LO

Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan (/Penurunan)	(%)
<b>374.398.022.141,34</b>	<b>419.646.441.299,57</b>	<b>(45.248.419.158,23)</b>	<b>(10,78)</b>

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

Hotel Bintang Lima – LO	3.084.191.311,00	2.039.264.043,00	1.044.927.268,00	51,24
Hotel Bintang Empat - LO	901.271.146,00	1.832.929.543,00	(931.658.397,00)	(50,83)
Hotel Bintang Tiga – LO	2.250.168.628,00	5.266.521.453,00	(3.016.352.825,00)	(57,27)
Hotel Bintang Dua – LO	234.919.019,00	310.326.252,00	(75.407.233,00)	(24,30)
Hotel Bintang Satu – LO	446.000.926,00	962.495.888,00	(516.494.962,00)	(53,66)
Hotel Melati Tiga – LO	2.471.986.034,00	5.242.123.507,00	(2.770.137.473,00)	(52,84)
Hotel Melati Dua – LO	596.927.123,00	681.894.817,00	(84.967.694,00)	(12,46)
Hotel Melati Satu – LO	54.565.794,00	77.520.253,00	(22.954.459,00)	(29,61)
Losmen/Hostel – LO	401.918.779,00	724.652.501,00	(322.733.722,00)	(44,54)
Restoran – LO	16.124.839.307,00	22.923.530.643,20	(6.798.691.336,20)	(29,66)
Rumah Makan – LO	1.833.043.505,00	3.159.597.217,00	(1.326.553.712,00)	(41,98)
Café – LO	1.065.939.834,00	1.809.199.700,00	(743.259.866,00)	(41,08)
Tontonan Film/Bioskop - LO	4.755.000,00	26.180.000,00	(21.425.000,00)	(81,84)
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	-	423.294.682,00	(423.294.682,00)	(100,00)
Pameran – LO	1.560.000,00	4.707.600,00	(3.147.600,00)	(66,86)
Karaoke – LO	11.424.400,00	18.609.552,00	(7.185.152,00)	(38,61)
Sirkus/Akrobat/Sulap - LO	57.523.189,00	329.505.005,00	(271.981.816,00)	(82,54)
Permainan Ketangkasan - LO	1.195.134.635,00	2.848.268.323,00	(1.653.133.688,00)	(58,04)
Mandi Uap/Spa – LO	1.055.455,00	7.127.554,00	(6.072.099,00)	(85,19)
Pusat Kebugaran – LO	315.957.150,00	659.629.800,00	(343.672.650,00)	(52,10)
Pajak Hiburan / Pertandingan Olahraga - LO	-	171.034.100,00	(171.034.100,00)	(100,00)
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron - LO	2.820.560.730,34	2.772.485.450,66	48.075.279,68	1,73
Reklame Kain – LO	501.630.768,00	968.138.569,00	(466.507.801,00)	(48,19)
Reklame Melekat/Stiker - LO	5.692.375,00	26.182.969,00	(20.490.594,00)	(78,26)
Reklame Berjalan – LO	342.708.858,00	374.948.591,00	(32.239.733,00)	(8,60)
Reklame Udara – LO	-	10.548.125,00	(10.548.125,00)	(100,00)
Baliho – LO	21.297.500,00	38.347.500,00	(17.050.000,00)	(44,46)
Reklame Cahaya – LO	531.939.762,00	665.719.515,00	(133.779.753,00)	(20,10)
Pajak Penerangan Jalan PLN - LO	56.819.788.251,00	56.875.893.266,71	(56.105.015,71)	(0,10)
Pajak Penerangan Jalan Non PLN - LO	2.142.717,00	2.983.130,00	(840.413,00)	(28,17)
Pajak Parkir - LO – LO	1.026.571.528,00	2.123.598.646,00	(1.097.027.118,00)	(51,66)
Pajak Air Tanah - LO - LO	30.105.736.155,00	24.342.292.965,00	5.763.443.190,00	23,68
Batu Kapur – LO	1.341.424.793,00	1.240.321.406,00	101.103.387,00	8,15
Andesit – LO	1.572.862.000,00	1.677.254.198,00	(104.392.198,00)	(6,22)
Marmer – LO	92.358.450,00	153.644.275,00	(61.285.825,00)	(39,89)

Pasir Batu – LO	156.344.200,00	130.671.800,00	25.672.400,00	19,65
Pasir Pasang – LO	24.068.000,00	179.366.000,00	(155.298.000,00)	(86,58)
Tanah Urug – LO	8.766.000,00	16.172.000,00	(7.406.000,00)	(45,80)
Marmer – LO	998.750,00	-	998.750,00	100,00
Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LO	-	7.366.357,00	(7.366.357,00)	(100,00)
PBB Sektor Perkotaan - LO	126.744.671.918,00	133.971.640.270,00	(7.226.968.352,00)	(5,39)
BPHTB - Pemindahan Hak - LO	121.225.278.151,00	144.550.453.833,00	(23.325.175.682,00)	(16,14)

#### 5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah –LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	<b>18.754.535.533,00</b>	<b>40.778.995.427,67</b>	<b>(22.024.459.894,67)</b>	<b>(54,01)</b>

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas - LO	956.244.000,00	2.229.269.000,00	(1.273.025.000,00)	(57,11)
Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah – LO	250.379.108,00	19.978.588.238,00	(19.728.209.130,00)	(98,75)
Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda – LO	1.181.810.173,00	1.855.713.893,00	(673.903.720,00)	(36,32)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	3.481.474.500,00	4.002.580.600,00	(521.106.100,00)	(13,02)
Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO	-	9.050.000,00	(9.050.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum - LO	155.151.000,00	277.332.000,00	(122.181.000,00)	(44,06)
Retribusi Pelayanan Pasar - Los - LO	199.406.000,00	276.007.000,00	(76.601.000,00)	(27,75)
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios - LO	292.677.000,00	410.384.000,00	(117.707.000,00)	(28,68)
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	1.768.782.800,00	1.531.801.116,67	236.981.683,33	15,47
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran – LO	8.918.000,00	13.746.500,00	(4.828.500,00)	(35,13)
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan - LO	173.287.000,00	155.318.000,00	17.969.000,00	11,57
Retribusi Tera/ Tera Ulang - LO	104.200.000,00	176.979.100,00	(72.779.100,00)	(41,12)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Alat Berat/Alat Besar dan Peralatan Bengkel - LO	65.000.000,00	158.000.000,00	(93.000.000,00)	(58,86)
Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal – LO	177.823.000,00	324.173.000,00	(146.350.000,00)	(45,15)
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	114.560.000,00	232.926.200,00	(118.366.200,00)	(50,82)
Retribusi Tempat Rekreasi - LO	107.206.000,00	129.537.000,00	(22.331.000,00)	(17,24)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	20.000.000,00	121.000.000,00	(101.000.000,00)	(83,47)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	7.048.260.249,00	7.280.954.465,00	(232.694.216,00)	(3,20)
Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	40.000.000,00	75.000.000,00	(35.000.000,00)	(46,67)
Retribusi Penggunaan Koridor Tertentu - LO	188.174.870,00	209.643.398,00	(21.468.528,00)	(10,24)
Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA – LO	2.421.181.833,00	1.330.991.917,00	1.090.189.916,00	81,91

#### 5.4.1.1.3. Pendapatan Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	<b>749.627.065,00</b>	<b>470.526.236,00</b>	<b>279.100.829,00</b>	<b>59,32</b>

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

Bagian Laba atas Penyertaan Modal dari Saham PT BJB	494.842.021,00	470.526.236,00	24.315.785,00	5,17
Bagian Laba atas Penyertaan Modal dari PT PMS	254.785.044,00	254.785.044,00	100,00	

#### 5.4.1.1.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	<b>115.233.376.907,18</b>	<b>108.993.481.878,00</b>	<b>6.239.895.029,18</b>	<b>5,73</b>

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai - LO	-	6.934.945,00	(6.934.945,00)	(100,00)
Jasa Giro Kas Daerah - LO	4.728.259.725,00	7.129.078.995,00	(2.400.819.270,00)	(33,68)
Jasa Giro Pemegang Kas - LO	645.749.326,00	579.200.815,00	66.548.511,00	11,49
Jasa Giro Dana Kapitasi JKN - LO	-	68.791.668,00	(68.791.668,00)	(100,00)
Pendapatan Bunga Rekening Deposito pada Bank Jabar Banten di Kas Daerah - LO	8.512.158.468,00	16.270.130.130,00	(7.757.971.662,00)	(47,68)
Pendapatan Bunga Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia di Kas Daerah - LO	-	731.984.349,00	(731.984.349,00)	(100,00)
Kerugian Barang - LO	25.000.000,00	31.500.000,00	(6.500.000,00)	(20,63)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO - LO	-	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(100,00)
Bidang Pendidikan - LO	76.681.150,00	168.257.204,00	(91.576.054,00)	(54,43)
Bidang Kesehatan - LO	27.638.271,00	-	27.638.271,00	100,00
Bidang Pekerjaan Umum - LO	86.524.732,00	47.407.401,00	39.117.331,00	82,51
Bidang Penataan Ruang - LO	-	2.424.830,00	(2.424.830,00)	(100,00)
Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan - LO	6.688.695,00	-	6.688.695,00	100,00
Bidang Kearsipan dan Perpustakaan - LO	21.686.220,00	-	21.686.220,00	100,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	41.354.620,00	395.224.646,00	(353.870.026,00)	(89,54)
Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	50.202.250,00	467.992.690,00	(417.790.440,00)	(89,27)
Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	9.607.892,00	74.282.874,00	(64.674.982,00)	(87,07)
Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	5.527.258,00	14.415.909,00	(8.888.651,00)	(61,66)
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO	71.436,00	12.051,00	59.385,00	492,78
Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	7.809.940,00	19.241.827,00	(11.431.887,00)	(59,41)
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	333.078.678,00	79.435.222,00	253.643.456,00	319,31
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	47.581.870,00	97.802.766,00	(50.220.896,00)	(51,35)
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	2.074.608.007,00	3.345.159.404,00	(1.270.551.397,00)	(37,98)
Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	26.382.750,00	27.588.465,00	(1.205.715,00)	(4,37)
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	96.446.630,00	64.426.342,00	32.020.288,00	49,70
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka - LO	907.650,00	-	907.650,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Belanja - LO	939.719.728,50	2.875.282.684,00	(1.935.562.955,50)	(67,32)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran TASPEN - LO	94.957.240,00	3.308.663,00	91.648.577,00	2.769,96
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO	142.032.500,00	142.032.500,00	-	-
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	45.858.185.546,00	35.153.861.696,00	10.704.323.850,00	30,45
Pendapatan Lain-lain BLUD - LO	187.049.091,00	150.821.722,00	36.227.369,00	24,02
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	68.644.858,68	19.640.241,00	49.004.617,68	249,51
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cihampelas - LO	2.847.976.200,00	3.280.958.600,00	(432.982.400,00)	(13,20)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Mukapayung - LO	1.570.352.400,00	1.813.419.800,00	(243.067.400,00)	(13,40)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Pataruman - LO	1.794.682.500,00	1.967.012.000,00	(172.329.500,00)	(8,76)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Sindangkerta - LO	1.048.302.800,00	1.255.154.900,00	(206.852.100,00)	(16,48)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cicangkangirang - LO	1.343.746.200,00	1.386.319.100,00	(42.572.900,00)	(3,07)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Rongga - LO	2.017.104.350,00	2.109.230.975,00	(92.126.625,00)	(4,37)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cipatat - LO	1.765.252.200,00	2.014.859.600,00	(249.607.400,00)	(12,39)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Sumur Bandung - LO	1.033.154.725,00	760.632.118,00	272.522.607,00	35,83
Dana Kapitasi Kepada FKTP Padalarang - LO	1.827.604.200,00	1.987.903.100,00	(160.298.900,00)	(8,06)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Tagogapu - LO	764.377.500,00	763.802.150,00	575.350,00	0,08
Dana Kapitasi Kepada FKTP Jayamekar - LO	1.370.262.000,00	1.155.071.900,00	215.190.100,00	18,63
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cipeundeuy - LO	1.862.340.000,00	2.025.524.100,00	(163.184.100,00)	(8,06)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cirata - LO	742.172.900,00	861.891.225,00	(119.718.325,00)	(13,89)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Rende - LO	1.062.134.400,00	939.155.500,00	122.978.900,00	13,09
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cisarua - LO	1.335.631.800,00	1.332.389.200,00	3.242.600,00	0,24
Dana Kapitasi Kepada FKTP Pasirlangu - LO	654.220.300,00	680.479.775,00	(26.259.475,00)	(3,86)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Lembang - LO	1.953.008.400,00	1.899.267.200,00	53.741.200,00	2,83
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cikole - LO	837.009.600,00	858.151.646,00	(21.142.046,00)	(2,46)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cibodas - LO	793.904.700,00	864.460.400,00	(70.555.700,00)	(8,16)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Batuajjar - LO	2.704.202.400,00	2.886.421.550,00	(182.219.150,00)	(6,31)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Ngamprah - LO	1.803.991.600,00	1.759.807.850,00	44.183.750,00	2,51
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cimareme - LO	1.844.833.200,00	2.066.669.600,00	(221.836.400,00)	(10,73)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Cipongkor - LO	2.529.807.300,00	2.542.511.000,00	(12.703.700,00)	(0,50)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Citalem - LO	1.714.665.800,00	2.020.210.700,00	(305.544.900,00)	(15,12)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Parongpong - LO	971.700.900,00	985.230.800,00	(13.529.900,00)	(1,37)
Dana Kapitasi Kepada FKTP Ciwaruga - LO	726.384.000,00	804.207.050,00	(77.823.050,00)	(9,68)
Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah - LO	12.200.000.000,00	-	12.200.000.000,00	100,00

#### 5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	<b>2.116.577.902.464,00</b>	<b>2.209.440.440.966,00</b>

Saldo tersebut adalah pengakuan Transfer – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.500.049.569.433,00	1.639.819.402.415,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	260.276.510.589,00	241.510.582.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	356.251.822.442,00	328.110.456.551,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.116.577.902.464,00</b>	<b>2.209.440.440.966,00</b>

##### 5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan (/Penurunan)	(%)
	<b>1.500.049.569.433,00</b>	<b>1.639.819.402.415,00</b>	<b>(139.769.832.982,00)</b>	<b>(8,52)</b>

Saldo tersebut adalah pengakuan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

<b>Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>56.744.499.174,00</b>	<b>40.469.013.791,00</b>	<b>16.275.485.383,00</b>	<b>40,22</b>
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan – LO	2.409.414.308,00	3.148.615.167,00	(739.200.859,00)	(23,48)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan – LO	448.541.200,00	2.700.792.731,00	(2.252.251.531,00)	(83,39)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan – LO	1.052.666.436,00	742.953.502,00	309.712.934,00	41,69
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri – LO	49.954.621.396,00	30.330.337.064,00	19.624.284.332,00	64,70
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian pemerintah pusat yg dibagikan ke Kab/Kota - LO	2.711.491.934,00	3.244.830.633,00	(533.338.699,00)	(16,44)
Bagi Hasil Biaya Pemungutan PBB - LO	167.763.900,00	301.484.694,00	(133.720.794,00)	(44,35)
<b>Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam</b>	<b>28.589.461.635,00</b>	<b>44.691.678.213,00</b>	<b>(16.102.216.578,00)</b>	<b>(36,03)</b>
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	83.336.875,00	66.196.200,00	17.140.675,00	25,89
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan - LO	788.276.289,00	590.155.800,00	198.120.489,00	33,57
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	5.198.363.984,00	-	5.198.363.984,00	100,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi - LO	4.779.508.956,00	-	4.779.508.956,00	100,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi - LO	12.165.519.350,00	27.646.385.425,00	(15.480.866.075,00)	(56,00)
Bagi Hasil Dari Pertambangan Mineral & Batubara Royalti – LO	519.106.048,00	280.995.400,00	238.110.648,00	84,74
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi – LO	-	10.913.811.410,00	(10.913.811.410,00)	(100,00)
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	5.055.350.133,00	5.194.133.978,00	(138.783.845,00)	(2,67)
<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>1.022.493.222.000,00</b>	<b>1.126.707.364.000,00</b>	<b>(104.214.142.000,00)</b>	<b>(9,25)</b>
Dana Alokasi Umum- LO -	1.022.493.222.000,00	1.126.707.364.000,00	(104.214.142.000,00)	(9,25)
<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>392.222.386.624,00</b>	<b>427.951.346.411,00</b>	<b>(35.728.959.787,00)</b>	<b>(8,35)</b>
DAK Reguler Bidang Pendidikan - LO	14.262.021.510,00	61.435.339.023,00	(47.173.317.513,00)	(76,79)
DAK Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana – LO	65.667.690.517,00	40.304.211.462,00	25.363.479.055,00	62,93
DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan – LO	-	554.574.500,00	(554.574.500,00)	(100,00)
DAK Reguler Bidang Pertanian - LO	-	3.275.166.887,00	(3.275.166.887,00)	(100,00)
DAK Reguler Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman – LO	-	2.756.250.000,00	(2.756.250.000,00)	(100,00)
DAK Penugasan Bidang Irigasi - LO	14.121.427.730,00	16.423.123.694,00	(2.301.695.964,00)	(14,01)
BOP PAUD – LO	18.655.800.000,00	23.747.600.000,00	(5.091.800.000,00)	(21,44)
Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	210.750.794.000,00	218.093.380.755,00	(7.342.586.755,00)	(3,37)
Tunjangan Khusus Guru - LO	-	2.464.683.680,00	(2.464.683.680,00)	(100,00)
Bantuan Operasional Kesehatan - LO	51.401.857.267,00	37.699.343.620,00	13.702.513.647,00	36,35
Bantuan Operasional KB - LO	4.600.024.340,00	4.479.628.200,00	120.396.140,00	2,69
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	3.852.363.260,00	4.857.160.858,00	(1.004.797.598,00)	(20,69)
Bantuan operasional Penyelenggaraan Pendidikan	8.149.000.000,00	-	8.149.000.000,00	100,00

Kesetaraan – LO				
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM – LO	417.358.000,00	-	417.358.000,00	100,00
Dana Pelayanan Kepariwisataan - LO	344.050.000,00	-	344.050.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.500.049.569.433,00</b>	<b>1.639.819.402.415,00</b>	<b>(139.769.832.982,00)</b>	<b>(8,52)</b>

#### 5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	<b>260.276.510.589,00</b>	<b>241.510.582.000,00</b>	<b>18.765.928.589,00</b>	<b>7,77</b>

Saldo tersebut adalah pengakuan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

Dana Insentif Daerah - LO	9.072.192.000,00	-	9.072.192.000,00	100,00
Dana Desa – LO	251.204.318.589,00	241.510.582.000,00	9.693.736.589,00	4,01
<b>Jumlah</b>	<b>9.072.192.000,00</b>	<b>241.510.582.000,00</b>	<b>18.765.928.589,00</b>	<b>7,77</b>

#### 5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	<b>356.251.822.442,00</b>	<b>328.110.456.551,00</b>	<b>28.141.365.891,00</b>	<b>8,58</b>

Saldo tersebut adalah pengakuan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

<b>Pendapatan Bagi Hasil Pajak</b>	<b>211.887.943.482,00</b>	<b>246.462.513.739,00</b>	<b>(34.574.570.257,00)</b>	<b>(14,03)</b>
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	65.194.371.390,00	81.376.843.200,00	(16.182.471.810,00)	(19,89)
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	31.765.782.960,00	60.910.416.300,00	(29.144.633.340,00)	(47,85)
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	33.906.342.449,00	38.903.949.671,00	(4.997.607.222,00)	(12,85)
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LO	7.785.749.713,00	6.708.102.558,00	1.077.647.155,00	16,06
Bagi Hasil Pajak Rokok - LO	73.235.696.970,00	58.563.202.010,00	14.672.494.960,00	25,05
<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>144.363.878.960,00</b>	<b>81.647.942.812,00</b>	<b>62.715.936.148,00</b>	<b>76,81</b>
Bantuan Keuangan Dari Provinsi - LO	137.326.835.600,00	74.709.167.557,00	62.617.668.043,00	83,82
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Bandung - LO	976.939.215,00	888.030.165,00	88.909.050,00	10,01
Bantuan Keuangan Dari Kota Bandung - LO	5.114.171.955,00	5.135.313.270,00	-21.141.315,00	-0,41
Bantuan Keuangan Dari Kota Cimahi - LO	945.932.190,00	915.431.820,00	30.500.370,00	3,33
<b>Jumlah</b>	<b>356.251.822.442,00</b>	<b>328.110.456.551,00</b>	<b>28.141.365.891,00</b>	<b>8,58</b>

#### 5.4.1.3. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	<b>245.282.708.319,00</b>	<b>192.549.796.597,00</b>	<b>52.732.911.722,00</b>	<b>27,39</b>

Saldo tersebut adalah pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

Pendapatan Hibah Dari Pemerintah - LO	6.835.824.219,00	16.066.118.317,00	(9.230.294.098,00)	(57,45)
Pendapatan Hibah Dana BOS Pusat SDN - LO	132.464.340.000,00	117.876.480.000,00	14.587.860.000,00	12,38
Pendapatan Hibah Dana BOS Pusat SMPN - LO	43.263.330.000,00	39.439.200.000,00	3.824.130.000,00	9,70
Pendapatan Hibah Vaksin - LO	5.675.814.100,00	7.870.802.080,00	(2.194.987.980,00)	(27,89)
Pendapatan Hibah Dana BOS Afirmasi - LO	11.160.000.000,00	7.882.000.000,00	3.278.000.000,00	41,59
Pendapatan Hibah Dana BOS Kinerja - LO	8.460.000.000,00	3.298.000.000,00	5.162.000.000,00	156,52
Pemerintah Daerah – LO	-	117.196.200,00	(117.196.200,00)	(100,00)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Non Pemerintah - LO	37.423.400.000,00	-	37.423.400.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>245.282.708.319,00</b>	<b>192.549.796.597,00</b>	<b>52.732.911.722,00</b>	<b>27,39</b>

#### 5.4.2. Beban Operasi – LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	<b>2.655.118.855.542,56</b>	<b>2.958.067.277.592,10</b>

Saldo tersebut adalah Beban Operasi – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

Beban Pegawai	1.153.717.425.472,00	1.337.528.136.824,00
Beban Persediaan	297.994.238.752,22	380.963.125.360,79
Beban Jasa dan Sewa	304.798.362.470,81	191.487.190.040,13
Beban Pemeliharaan	13.201.682.035,00	37.956.758.566,00
Beban Perjalanan Dinas	36.095.622.879,00	52.361.288.056,00
Beban Bunga	2.855.004.000,00	-
Beban Subsidi	-	-
Beban Hibah	51.612.800.000,00	74.852.604.645,00
Beban Bantuan Sosial	1.365.000.000,00	12.322.500.000,00
Beban Penyusutan	231.313.885.025,03	230.469.424.352,50
Beban Penyisihan Piutang	24.718.995.427,50	60.932.943.201,68
Beban Transfer	416.535.864.737,00	476.238.022.448,00
Beban Tidak Terduga	73.232.148.462,00	
Beban Lain- lain	47.677.826.282,00	102.955.284.098,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.655.118.855.542,56</b>	<b>2.958.067.277.592,10</b>

##### 5.4.2.1 Beban Pegawai – LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	<b>1.153.717.425.472,00</b>	<b>1.337.528.136.824,00</b>	<b>(183.731.001.352,00)</b>	<b>(13,74)</b>

Saldo tersebut adalah Beban Pegawai – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari

Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	425.696.569.675,00	446.079.808.005,00	(20.383.238.330,00)	(4,57)
Beban Tunjangan Keluarga - LO	40.234.097.524,00	42.398.859.413,00	(2.164.761.889,00)	(5,11)
Beban Tunjangan Jabatan - LO	8.968.866.000,00	9.055.624.360,00	(86.758.360,00)	(0,96)
Beban Tunjangan Fungsional - LO	31.534.592.000,00	33.421.928.000,00	(1.887.336.000,00)	(5,65)
Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	3.350.810.000,00	3.567.841.000,00	(217.031.000,00)	(6,08)
Beban Tunjangan Beras - LO	18.960.575.074,00	20.055.097.295,00	(1.094.522.221,00)	(5,46)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	725.581.088,00	764.762.207,00	(39.181.119,00)	(5,12)
Beban Pembulatan Gaji - LO	5.150.627,00	5.573.309,00	(422.682,00)	(7,58)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	17.234.693.411,00	12.447.438.456,00	4.787.254.955,00	38,46
Beban Uang Paket – LO	95.508.000,00	95.424.000,00	84.000,00	0,09
Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO	31.241.700,00	29.208.700,00	2.033.000,00	6,96
Beban Tunjangan Komisi - LO	58.273.950,00	58.495.500,00	(221.550,00)	(0,38)
Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO	31.241.700,00	29.940.335,00	1.301.365,00	4,35
Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO	8.952.300,00	10.236.725,00	(1.284.425,00)	(12,55)
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya – LO	15.529.500,00	12.773.775,00	2.755.725,00	21,57
Beban Tunjangan Perumahan - LO	14.820.000.000,00	9.072.000.000,00	5.748.000.000,00	63,36
Beban Uang Jasa Pengabdian - LO	-	460.740.000,00	(460.740.000,00)	(100,00)
Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD – LO	393.120.000,00	393.120.000,00	-	-
Beban Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	3.499.941.894,00	3.661.860.020,00	(161.918.126,00)	(4,42)
Beban Tunjangan Transportasi	7.728.000.000,00	7.093.200.000,00	634.800.000,00	8,95
Beban Tunjangan Profesi Guru PNSD	202.091.791.040,00	230.987.133.760,00	(28.895.342.720,00)	(12,51)
Beban Tambahan Penghasilan Guru PNSD	636.750.000,00	445.500.000,00	191.250.000,00	42,93
Beban Tunjangan Khusus Guru	-	3.604.915.800,00	(3.604.915.800,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Reses	2.205.000.000,00	1.470.000.000,00	735.000.000,00	50,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	252.205.984.014,00	-	252.205.984.014,00	100,00
Tambahan Penghasilan Tunjangan Kerja	-	285.818.248.056,00	(285.818.248.056,00)	(100,00)
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan	8.820.000.000,00	8.819.909.471,00	90.529,00	0,00

dan Anggota DPRD				
Beban Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	921.421.380,00	871.500.000,00	49.921.380,00	5,73
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel – LO	400.453.760,00	821.829.558,00	(421.375.798,00)	(51,27)
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran – LO	552.840.586,00	1.023.769.121,00	(470.928.535,00)	(46,00)
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan – LO	53.341.502,00	270.347.158,00	(217.005.656,00)	(80,27)
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame – LO	159.643.111,00	190.300.523,00	(30.657.412,00)	(16,11)
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan – LO	2.689.768.689,00	2.592.831.926,00	96.936.763,00	3,74
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir – LO	40.034.229,00	74.974.919,00	(34.940.690,00)	(46,60)
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah – LO	1.043.529.642,00	326.899.751,00	716.629.891,00	219,22
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	122.505.061,00	114.217.265,00	8.287.796,00	7,26
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	3.454.691.778,00	3.784.828.935,00	(330.137.157,00)	(8,72)
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	4.600.310.319,00	5.537.197.590,00	(936.887.271,00)	(16,92)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO	6.875.000,00	6.250.000,00	625.000,00	10,00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	84.000.000,00	210.000.000,00	(126.000.000,00)	(60,00)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar – LO	13.922.828,00	13.922.828,00	-	-
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	-	7.858.390,00	(7.858.390,00)	(100,00)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	6.589.665,00	6.589.665,00	-	-
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO	-	9.325.000,00	(9.325.000,00)	(100,00)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(100,00)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	-	6.050.000,00	(6.050.000,00)	(100,00)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO	200.000.000,00	235.960.130,00	(35.960.130,00)	(15,24)
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LO	125.000.000,00	-	125.000.000,00	100,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/ Honorarium Tim Penilai Kinerja	1.355.810.000,00	-	1.355.810.000,00	100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	534.836.874,00	1.432.726.083,00	(897.889.209,00)	(62,67)
Honorarium Uang/Saku	268.800.000,00	1.224.940.000,00	(956.140.000,00)	(78,06)
Honorarium Operasional Pelayanan Kesehatan	126.000.000,00	-	126.000.000,00	100,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	138.058.207.500,00	(138.058.207.500,00)	(100,00)
Honorarium/Uang Saku	24.963.459.800,00	30.953.941.000,00	(5.990.481.200,00)	(19,35)
Uang Transport	5.255.865.200,00	7.559.051.500,00	(2.303.186.300,00)	(30,47)
Honorarium Tenaga Pendamping	2.429.795.000,00	-	2.429.795.000,00	100,00
Uang Lembur PNS	182.083.000,00	698.390.000,00	(516.307.000,00)	(73,93)
Uang Lembur Non PNS	789.007.000,00	-	789.007.000,00	100,00
Honorarium Pengelola Dana BOS	56.612.461.551,00	20.627.264.795,00	35.985.196.756,00	174,45
Beban Pegawai BLUD	7.367.110.000,00	999.325.000,00	6.367.785.000,00	637,21

#### 5.4.2.2 Beban Persediaan – LO

Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
297.994.238.752,22	380.963.125.360,79	(82.968.886.608,57)	(21,78)

Saldo tersebut adalah Beban Persediaan – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

Beban Persediaan alat tulis kantor	10.573.819.769,00	10.139.866.187,00	433.953.582,00	4,28
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.833.440.574,00	896.188.063,00	937.252.511,00	104,58
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	307.052.500,00	363.910.100,00	(56.857.600,00)	(15,62)
Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.578.992.569,00	942.468.544,00	636.524.025,00	67,54
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	3.069.016.892,00	4.385.504.158,00	(1.316.487.266,00)	(30,02)
Beban Persediaan pengisian tabung Gas/pemadam kebakaran	4.265.550,00	5.765.000,00	(1.499.450,00)	(26,01)
Beban pengisian tabung gas/ Pemadam Kebakaran	81.954.100,00	235.795.750,00	(153.841.650,00)	(65,24)
Beban Alat Perbekalan Kesehatan	12.411.808.887,27	1.554.530.790,42	10.857.278.096,85	698,43
Beban Dokumentasi	146.128.800,00	118.492.147,00	27.636.653,00	23,32
Beban Persediaan Alat Kontrasepsi	1.645.224.967,00	1.390.568.437,00	254.656.530,00	18,31
Beban Persediaan bahan baku bangunan	838.174.920,00	1.449.314.090,00	(611.139.170,00)	(42,17)
Beban Persediaan Blanko E-KTP	2.725.098.090,00	1.665.112.500,00	1.059.985.590,00	63,66
Beban Persediaan Bahan Makanan pokok	1.267.944.059,62	1.712.289.045,60	(444.344.985,98)	(25,95)
Beban Bahan Makanan dan Minuman	303.865.658,00	0	303.865.658,00	100,00
Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	154.553.600,00	1.264.560.000,00	(1.110.006.400,00)	(87,78)
Beban Persediaan bibit ternak	50.255.500,00	101.935.000,00	(51.679.500,00)	(50,70)
Beban Persediaan bahan obat-obatan	13.291.619.177,62	15.778.406.308,29	(2.486.787.130,67)	(15,76)
Beban Bahan Kimia dan Pupuk	2.622.599.978,50	3.775.351.765,50	(1.152.751.787,00)	(30,53)
Beban Perlengkapan Peserta	723.724.750,00	3.786.185.930,00	(3.062.461.180,00)	(80,89)
Beban Pakan Ternak	815.528.625,00	1.136.969.600,00	(321.440.975,00)	(28,27)
Beban Barang Yang Tidak Dikapitalisasi	3.844.025.271,00	1.381.269.062,00	2.462.756.209,00	178,30
Beban Persediaan Ternak	5.000.000,00	0	5.000.000,00	100,00
Beban Dekorasi	1.185.960.122,00	2.538.462.710,00	(1.352.502.588,00)	(53,28)
Beban Persediaan Vaksin	7.244.499.866,00	7.905.016.600,00	(660.516.734,00)	(8,36)
Beban Persediaan Bahan Logistik	360.103.295,00	168.940.605,75	191.162.689,25	113,15
Beban Cetak	10.093.651.598,60	14.136.964.307,00	(4.043.312.708,40)	(28,60)
Beban Penggandaan	2.781.220.030,00	3.562.145.266,00	(780.925.236,00)	(21,92)
Beban Cetak Foto	229.792.515,00	115.056.000,00	114.736.515,00	99,72
Beban Cetak Spanduk	1.356.058.200,00	1.316.556.625,00	39.501.575,00	3,00
Beban Cetak Plakat/Cendera Mata	543.937.600,00	924.926.250,00	(380.988.650,00)	(41,19)
Beban makanan dan minuman Pasien	246.715.000,00	691.056.443,00	(444.341.443,00)	(64,30)
Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH/DPRD	158.781.250,00	144.000.000,00	14.781.250,00	10,26
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	47.520.000,00	153.535.000,00	(106.015.000,00)	(69,05)
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	16.500.000,00	320.543.000,00	(304.043.000,00)	(94,85)
Beban Pakaian Dinas Harian	418.898.500,00	1.886.157.560,00	(1.467.259.060,00)	(77,79)
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	23.980.000,00	130.759.200,00	(106.779.200,00)	(81,66)
Beban Pakaian Sipil Resmi	0	49.500.000,00	(49.500.000,00)	(100,00)
Beban pakaian kerja lapangan	1.810.273.125,00	1.323.056.610,00	487.216.515,00	36,83
Beban Pakaian KORPRI	122.980.000,00	93.410.000,00	29.570.000,00	31,66
Beban Pakaian Adat Daerah	0	406.543.700,00	(406.543.700,00)	(100,00)
Beban Pakaian Batik Tradisional	791.609.150,00	1.092.132.765,00	(300.523.615,00)	(27,52)
Beban Pakaian Olahraga	826.423.600,00	2.391.291.975,00	(1.564.868.375,00)	(65,44)
Beban Pakaian Pramuka	61.840.000,00	54.945.000,00	6.895.000,00	12,55
Beban Pakaian Profesi	9.800.000,00	0	9.800.000,00	100,00
Beban Barang Dana BOS	103.284.659.648,01	109.161.396.907,00	(5.876.737.258,99)	(5,38)
Beban Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/masyarakat pada SKPD	46.684.912.485,00	112.795.551.302,00	(66.110.638.817,00)	(58,61)
Beban Barang dan Jasa BLUD	40.478.696.396,60	29.877.540.410,00	10.601.155.986,60	35,48
Beban Hadiyah	238.622.000,00	635.679.150,00	(397.057.150,00)	(62,46)
Beban Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	20.339.069.133,00	36.647.210.497,23	(16.308.141.364,23)	(44,50)
Beban Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	343.641.000,00	356.265.000,00	(12.624.000,00)	(3,54)

#### 5.4.2.3 Beban Jasa dan Sewa – LO

Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
304.798.362.470,81	191.487.190.040,13	137.501.175.751,68	71,81

Saldo tersebut adalah Beban Jasa dan Sewa – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

Beban Jasa telepon 181.625.990,00 334.630.870,00 (153.004.880,00) (45,72)

	2020	2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Beban Jasa air	219.493.524,00	195.125.100,00	24.368.424,00	12,49
Beban Jasa listrik	11.659.789.706,00	11.353.952.246,00	305.837.460,00	2,69
Beban Jasa surat kabar/majalah	2.326.515.500,00	2.209.301.000,00	117.214.500,00	5,31
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	3.486.667.409,00	3.155.782.256,00	330.885.153,00	10,49
Beban Jasa paket/pengiriman	1.210.781.893,00	776.453.995,00	434.327.898,00	55,94
Beban Jasa Sertifikasi	155.345.175,00	357.464.600,00	(202.119.425,00)	(56,54)
Beban Jasa Transaksi Keuangan	-	1.050.000,00	(1.050.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Publikasi Media Cetak dan Elektronik	5.972.671.100,00	3.445.482.500,00	2.527.188.600,00	73,35
Beban Pembayaran Klaim Peserta Kartu Cermat				
Bidang Kesehatan	3.753.415.336,00	3.496.270.169,00	257.145.167,00	7,35
Beban Jasa Laboratorium	403.213.480,00	551.137.215,00	(147.923.735,00)	(26,84)
Beban Jasa Instalasi Jaringan Komputer/Internet	343.548.532,00	3.850.000,00	339.698.532,00	8.823,34
Beban Pembayaran Klaim Kejadian Luar Biasa (KLB)	45.648.258,00	-	45.648.258,00	100,00
Beban Jasa Laundry	-	321.500,00	(321.500,00)	(100,00)
Beban Akomodasi Hotel	6.875.823.100,00	11.167.236.187,00	(4.291.413.087,00)	(38,43)
Beban Jasa Penyelenggaraan (event organizer)	1.028.614.400,00	5.863.601.215,00	(4.834.986.815,00)	(82,46)
Beban Jasa Pelayanan	55.919.312.892,00	45.784.741.758,80	10.134.571.133,20	22,14
Beban Iuran Keanggotaan APKASI	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-
Beban Jasa Pengamanan	4.010.906.185,00	3.615.402.000,00	395.504.185,00	10,94
Beban petugas upacara dan peringatan hari besar	104.800.000,00	281.500.000,00	(176.700.000,00)	(62,77)
Beban Jasa Tukang	22.860.000,00	651.912.000,00	(629.052.000,00)	(96,49)
Beban Jasa Kebersihan	71.600.000,00	-	71.600.000,00	100,00
Beban Pembayaran E-Toll	7.587.000,00	-	7.587.000,00	100,00
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan/Tenaga Kerja	24.062.291.268,00	8.910.000,00	24.053.381.268,00	269.959,39
Beban Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat	8.640.000,00	16.026.450.835,00	(16.017.810.835,00)	(99,95)
Beban Jasa Service	3.549.267.771,00	3.561.352.609,00	(12.084.838,00)	(0,34)
Beban Pengantian Suku Cadang	3.507.921.646,00	2.817.201.907,00	690.719.739,00	24,52
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.042.888.605,00	1.807.405.049,00	1.235.483.556,00	68,36
Beban Jasa KIR	7.770.000,00	5.462.500,00	2.307.500,00	42,24
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	431.280.100,00	276.997.800,00	154.282.300,00	55,70
Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.828.500,00	5.836.300,00	7.992.200,00	136,94
Beban Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	83.823.900,00	184.012.000,00	(100.188.100,00)	(54,45)
Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	730.917.523,61	738.916.789,56	(7.999.265,95)	(1,08)
Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.677.137.734,20	3.124.458.499,99	(1.447.320.765,79)	(46,32)
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	295.250.000,00	669.410.000,00	(374.160.000,00)	(55,89)
Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	85.000.000,00	27.152.777,78	57.847.222,22	213,04
Beban Sewa Lahan	18.200.000,00	232.300.000,00	(214.100.000,00)	(92,17)
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	286.689.500,00	1.312.317.000,00	(1.025.627.500,00)	(78,15)
Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara	-	17.136.000,00	(17.136.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Insenerator	29.600.000,00	39.200.000,00	(9.600.000,00)	(24,49)
Beban sewa meja kursi	261.147.750,00	374.567.500,00	(113.419.750,00)	(30,28)
Beban sewa komputer dan printer	444.820.000,00	206.000.000,00	238.820.000,00	115,93
Beban sewa proyektor	43.588.000,00	-	43.588.000,00	100,00
Beban sewa generator	190.823.000,00	80.219.500,00	110.603.500,00	137,88
Beban sewa tenda	470.995.000,00	1.149.123.000,00	(678.128.000,00)	(59,01)
Beban sewa pakaian adat/tradisional	-	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Alat-alat Kesenian	-	688.925.000,00	(688.925.000,00)	(100,00)
Beban sewa Sound System	229.910.000,00	-	229.910.000,00	100,00
Beban Sewa Panggung	23.574.000,00	115.440.000,00	(91.866.000,00)	(79,58)
Beban Jasa Konsultansi Penelitian	3.904.889.650,00	6.824.626.700,00	(2.919.737.050,00)	(42,78)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	5.317.222.167,00	24.023.022.667,00	(18.705.800.500,00)	(77,87)
Beban Jasa Konsultansi Sistem Informasi	1.451.656.250,00	2.308.659.250,00	(857.003.000,00)	(37,12)
Beban Jasa Konsultansi Pendampingan	942.004.600,00	3.372.640.750,00	(2.430.636.150,00)	(72,07)
Beban Jasa Konsultansi Pengadaan CPNS	-	3.587.281.594,00	(3.587.281.594,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Yang di Swakelola	223.000.000,00	-	223.000.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	1.063.237.000,00	-	1.063.237.000,00	100,00
Beban Sewa Tanah	111.885.000,00	123.285.000,00	(11.400.000,00)	(9,25)
Beban Jasa Narasumber	4.872.590.000,00	6.776.236.000,00	(1.903.646.000,00)	(28,09)
Beban Jasa Tenaga Ahli	6.140.157.026,00	17.573.728.400,00	(11.433.571.374,00)	(65,06)
Beban Sewa Alat Ukur	395.912.000,00	139.700.000,00	256.212.000,00	183,40
Beban Jasa Non PNS	143.045.225.000,00	-	143.045.225.000,00	100,00

#### 5.4.2.4 Beban Pemeliharaan – LO

Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
-------------------------	-------------------------	--------------------------	-----

13.201.682.035,00	37.956.758.566,00	(23.555.676.002,00)	(62,06)
-------------------	-------------------	---------------------	---------

Saldo tersebut adalah Beban Jasa dan Sewa – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari

Beban Pemeliharaan Jalan	5.734.041.156,00	29.877.349.005,00	(24.143.307.849,00)	(80,81)
Beban Pemeliharaan Jembatan	99.578.800,00	2.125.441.000,00	(2.025.862.200,00)	(95,31)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.350.210.910,00	2.931.153.556,00	419.057.354,00	14,30
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.528.349.720,00	2.231.745.674,00	296.604.046,00	13,29
Beban Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1.465.951.449,00	639.069.331,00	826.882.118,00	129,39
Beban Pemeliharaan Taman	23.550.000,00	152.000.000,00	(128.450.000,00)	(84,51)

#### 5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas – LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	<b>36.095.622.879,00</b>	<b>52.361.288.056,00</b>	<b>(15.924.840.177,00)</b>	<b>(30,41)</b>

Saldo tersebut adalah Beban Perjalanan Dinas – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari

Beban perjalanan dinas dalam daerah	15.923.757.125,00	18.835.642.000,00	(2.911.884.875,00)	(15,46)
Beban perjalanan dinas luar daerah	20.171.865.754,00	33.478.786.056,00	(13.306.920.302,00)	(39,75)
Beban perjalanan dinas luar negeri	-	46.860.000,00	(46.860.000,00)	(100,00)

#### 5.4.2.6 Beban Bunga – LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	<b>2.855.004.000,00</b>	-	<b>2.855.004.000,00</b>	-

Saldo tersebut adalah Beban Bunga – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari

Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	2.855.004.000,00	-	2.855.004.000,00	100,00
---	------------------	---	------------------	--------

#### 5.4.2.7 Beban Hibah – LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	<b>51.612.800.000,00</b>	<b>74.852.604.645,00</b>	<b>(23.239.804.645,00)</b>	<b>(31,05)</b>

Saldo tersebut adalah Beban Hibah – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari

Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok Masyarakat	51.612.800.000,00	74.852.604.645,00	(23.239.804.645,00)	(31,05)
---	-------------------	-------------------	---------------------	---------

#### 5.4.2.8 Beban Bantuan Sosial – LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	<b>1.365.000.000,00</b>	<b>12.322.500.000,00</b>	<b>(10.957.500.000,00)</b>	<b>(88,92)</b>

Saldo tersebut adalah Beban Bantuan Sosial – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari

Beban Bantuan Sosial Kemasyarakatan	1.365.000.000,00	12.322.500.000,00	(10.957.500.000,00)	(88,92)
-------------------------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------

#### 5.4.2.9 Beban Penyusutan – LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
	<b>231.313.885.025,03</b>	<b>230.469.424.352,50</b>	<b>844.460.672,53</b>	<b>0,37</b>

Saldo tersebut adalah Beban Penyusutan – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	122.420.144.821,51	87.360.687.774,77	35.059.457.046,74	40,13
--------------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39.271.553.922,54	36.953.454.662,26	2.313.099.260,28	6,27
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	69.622.186.280,98	106.155.281.915,47	(36.533.095.634,49)	(34,41)
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-

#### 5.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang – LO

Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<b>24.718.995.427,50</b>	<b>60.932.943.201,68</b>	<b>(36.213.947.774,18)</b>	<b>(59,43)</b>

Saldo tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

Beban Penyisihan Piutang Pajak	24.718.995.427,50	60.145.731.649,93	(35.426.736.222,43)	(58,90)
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	787.211.551,75	(787.211.551,75)	(100,00)

#### 5.4.2.11 Beban Transfer – LO

Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
<b>416.535.864.737,00</b>	<b>476.238.022.448,00</b>	<b>-59.702.157.711,00</b>	<b>-12,54</b>

Saldo tersebut adalah Beban Transfer – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	-	34.236.302.724,00	(34.236.302.724,00)	(100,00)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	35.507.863.220,00	-	35.507.863.220,00	100,00
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	-	3.538.032.620,00	(3.538.032.620,00)	(100,00)
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.010.843.314,00	-	3.010.843.314,00	100,00
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cicadas Kecamatan Rongga	2.368.706.300,00	2.478.198.200,00	(109.491.900,00)	(4,42)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cibedug Kecamatan Rongga	2.154.191.440,00	2.426.985.100,00	(272.793.660,00)	(11,24)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sukamanah Kecamatan Rongga	2.543.851.980,00	2.646.774.700,00	(102.922.720,00)	(3,89)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Bojong Kecamatan Rongga	2.337.950.726,00	2.306.052.500,00	31.898.226,00	1,38
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Bojongsalam Kecamatan Rongga	2.584.353.288,00	2.536.869.005,00	47.484.283,00	1,87
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cinengah Kecamatan Rongga	2.390.266.496,00	2.435.338.500,00	(45.072.004,00)	(1,85)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga	2.686.241.264,00	2.632.817.100,00	53.424.164,00	2,03
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cibitung Kecamatan Rongga	2.872.040.888,00	3.286.668.500,00	(414.627.612,00)	(12,62)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilangari Kecamatan Gununghalu	2.570.088.986,00	3.040.741.530,00	(470.652.544,00)	(15,48)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sindangjaya Kecamatan Gununghalu	2.190.911.480,00	2.267.426.850,00	(76.515.370,00)	(3,37)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Bunijaya Kecamatan Gununghalu	2.238.117.040,00	2.449.102.312,00	(210.985.272,00)	(8,61)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu	2.663.499.288,00	2.806.145.105,00	(142.645.817,00)	(5,08)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Gunung Halu Kecamatan Gununghalu	2.823.323.188,00	3.269.506.338,00	(446.183.150,00)	(13,65)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Celak Kecamatan Gununghalu	2.221.626.324,00	2.192.256.204,00	29.370.120,00	1,34
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Wargasaluyu Kecamatan Gununghalu	2.222.569.110,00	2.060.175.900,00	162.393.210,00	7,88

Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu	2.351.513.664,00	2.484.485.105,00	(132.971.441,00)	(5,35)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa TamanJaya Kecamatan Gununghalu	2.501.083.132,00	2.772.141.112,00	(271.057.980,00)	(9,78)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta	2.805.193.000,00	2.856.192.300,00	(50.999.300,00)	(1,79)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Weninggalih Kecamatan Sindangkerta	2.305.950.329,00	2.541.267.400,00	(235.317.071,00)	(9,26)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Wangunsari Kecamatan Sindangkerta	2.036.641.034,00	2.183.557.800,00	(146.916.766,00)	(6,73)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Buningagara Kecamatan Sindangkerta	1.945.603.748,00	2.029.254.200,00	(83.650.452,00)	(4,12)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cikadu Kecamatan Sindangkerta	2.051.349.296,00	2.038.482.400,00	12.866.896,00	0,63
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Rancasenggang Kecamatan Sindangkerta	1.973.201.388,00	1.965.345.300,00	7.856.088,00	0,40
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cintakarya Kecamatan Sindangkerta	1.827.520.448,00	1.977.127.200,00	(149.606.752,00)	(7,57)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cicangkanggirang Kecamatan Sindangkerta	2.296.144.000,00	2.580.792.600,00	(284.648.600,00)	(11,03)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Puncaksari Kecamatan Sindangkerta	2.057.618.900,00	2.044.811.600,00	12.807.300,00	0,63
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Pasirpogor Kecamatan Sindangkerta	2.126.191.964,00	2.108.559.100,00	17.632.864,00	0,84
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sindangkerta Kecamatan Sindangkerta	2.466.401.196,00	2.076.370.600,00	390.030.596,00	18,78
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Karyamukti Kecamatan Cililin	2.407.791.500,00	2.992.660.600,00	(584.869.100,00)	(19,54)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Nanggerang Kecamatan Cililin	2.203.576.596,00	3.043.154.700,00	(839.578.104,00)	(27,59)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Mukapayung Kecamatan Cililin	2.599.286.896,00	2.808.115.300,00	(208.828.404,00)	(7,44)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin	2.810.336.000,00	2.606.906.700,00	203.429.300,00	7,80
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Bongas Kecamatan Cililin	2.155.438.100,00	2.130.083.400,00	25.354.700,00	1,19
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Batulayang Kecamatan Cililin	2.534.197.496,00	2.886.341.200,00	(352.143.704,00)	(12,20)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cililin Kecamatan Cililin	1.974.616.140,00	2.162.750.700,00	(188.134.560,00)	(8,70)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Karangtanjung Kecamatan Cililin	2.128.159.942,00	2.300.511.100,00	(172.351.158,00)	(7,49)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Kidangpananjung Kecamatan Cililin	2.015.209.800,00	3.174.222.900,00	(1.159.013.100,00)	(36,51)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Budiharja Kecamatan Cililin	1.929.397.348,00	1.956.400.100,00	(27.002.752,00)	(1,38)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Karanganyar Kecamatan Cililin	2.754.020.664,00	2.784.626.400,00	(30.605.736,00)	(1,10)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas	2.290.282.300,00	2.261.887.700,00	28.394.600,00	1,26
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Tanjungwangi Kecamatan Cihampelas	2.271.768.068,00	2.361.166.100,00	(89.398.032,00)	(3,79)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas	2.957.499.532,00	2.981.258.500,00	(23.758.968,00)	(0,80)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas	2.423.798.786,00	2.388.279.700,00	35.519.086,00	1,49
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas	2.217.968.718,00	2.194.586.400,00	23.382.318,00	1,07
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Citapen Kecamatan Cihampelas	2.150.410.300,00	2.132.759.100,00	17.651.200,00	0,83
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cihampelas Kecamatan Cihampelas	2.613.216.240,00	2.565.867.100,00	47.349.140,00	1,85
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas	2.380.799.272,00	2.347.323.900,00	33.475.372,00	1,43
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Tanjungjaya Kecamatan Cihampelas	2.225.686.662,00	2.211.492.000,00	14.194.662,00	0,64
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas	2.467.376.602,00	2.476.305.000,00	(8.928.398,00)	(0,36)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cintaasih Kecamatan Cipongkor	2.625.185.988,00	3.302.559.400,00	(677.373.412,00)	(20,51)

Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Karangsari Kecamatan Cipongkor	2.067.007.680,00	2.201.282.000,00	(134.274.320,00)	(6,10)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor	2.023.326.000,00	2.310.920.500,00	(287.594.500,00)	(12,45)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor	2.118.632.400,00	2.600.645.800,00	(482.013.400,00)	(18,53)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cijenuk Kecamatan Cipongkor	1.960.094.196,00	1.991.939.600,00	(31.845.404,00)	(1,60)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cicangkanghilir Kecamatan Cipongkor	2.050.922.688,00	3.589.068.300,00	(1.538.145.612,00)	(42,86)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sukamulya Kecamatan Cipongkor	1.953.250.610,00	1.946.963.700,00	6.286.910,00	0,32
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Citalem Kecamatan Cipongkor	2.373.107.926,00	2.339.345.900,00	33.762.026,00	1,44
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Mekarsari Kecamatan Cipongkor	2.109.662.334,00	2.807.193.700,00	(697.531.366,00)	(24,85)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor	2.252.104.380,00	2.396.488.900,00	(144.384.520,00)	(6,02)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cibenda Kecamatan Cipongkor	2.176.856.564,00	2.741.442.800,00	(564.586.236,00)	(20,59)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor	2.233.337.600,00	2.209.196.600,00	24.141.000,00	1,09
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sirnagalih Kecamatan Cipongkor	2.534.100.200,00	2.597.245.600,00	(63.145.400,00)	(2,43)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor	2.601.536.396,00	2.417.514.600,00	184.021.796,00	7,61
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Selacau Kecamatan Batujajar	2.098.475.510,00	2.163.438.300,00	(64.962.790,00)	(3,00)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar	1.788.366.840,00	1.842.152.100,00	(53.785.260,00)	(2,92)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar	1.828.868.688,00	1.999.795.800,00	(170.927.112,00)	(8,55)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Giriasih Kecamatan Batujajar	1.739.425.918,00	1.811.098.000,00	(71.672.082,00)	(3,96)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Galanggang Kecamatan Batujajar	1.995.032.496,00	2.092.227.000,00	(97.194.504,00)	(4,65)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Pangauban Kecamatan Batujajar	2.604.040.530,00	2.556.566.500,00	47.474.030,00	1,86
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cangkorah Kecamatan Batujajar	2.510.469.040,00	2.506.152.500,00	4.316.540,00	0,17
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Bojonghaleung Kecamatan Saguling	2.092.213.188,00	1.941.746.900,00	150.466.288,00	7,75
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cikande Kecamatan Saguling	1.984.145.680,00	1.975.990.500,00	8.155.180,00	0,41
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Girimukti Kecamatan Saguling	2.236.629.788,00	2.619.995.200,00	(383.365.412,00)	(14,63)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cipangeran Kecamatan Saguling	2.004.408.288,00	2.054.413.500,00	(50.005.212,00)	(2,43)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Jati Kecamatan Saguling	2.131.231.956,00	2.113.306.600,00	17.925.356,00	0,85
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Saguling Kecamatan Saguling	2.417.381.986,00	2.357.344.518,00	60.037.468,00	2,55
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat	2.539.956.588,00	2.877.700.400,00	(337.743.812,00)	(11,74)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat	2.570.088.100,00	3.122.496.800,00	(552.408.700,00)	(17,69)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cipatat Kecamatan Cipatat	2.491.975.252,00	2.893.569.800,00	(401.594.548,00)	(13,88)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Citatah Kecamatan Cipatat	3.412.344.396,00	3.922.089.862,00	(509.745.466,00)	(13,00)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat	3.010.270.364,00	3.601.407.000,00	(591.136.636,00)	(16,41)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat	2.208.252.992,00	2.393.939.600,00	(185.686.608,00)	(7,76)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat	2.024.546.380,00	2.170.999.700,00	(146.453.320,00)	(6,75)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sumurbandung Kecamatan Cipatat	2.510.482.796,00	2.801.859.900,00	(291.377.104,00)	(10,40)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Kertamukti Kecamatan Cipatat	2.478.049.780,00	2.499.182.100,00	(21.132.320,00)	(0,85)

Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat	2.170.091.800,00	2.366.846.600,00	(196.754.800,00)	(8,31)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Mandalasari Kecamatan Cipatat	2.304.420.296,00	2.443.404.500,00	(138.984.204,00)	(5,69)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat	2.275.676.888,00	2.923.352.900,00	(647.676.012,00)	(22,16)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Laksanamekar Kecamatan Padalarang	2.148.696.200,00	2.807.222.560,00	(658.526.360,00)	(23,46)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cimerang Kecamatan Padalarang	1.939.030.478,00	2.013.135.000,00	(74.104.522,00)	(3,68)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang	1.928.286.042,00	2.039.872.600,00	(111.586.558,00)	(5,47)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang	2.046.184.232,00	2.040.246.100,00	5.938.132,00	0,29
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang	2.607.040.300,00	2.560.315.300,00	46.725.000,00	1,82
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Padalarang Kecamatan Padalarang	2.527.522.000,00	2.653.052.700,00	(125.530.700,00)	(4,73)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang	2.062.217.186,00	2.219.296.500,00	(157.079.314,00)	(7,08)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang	2.252.837.396,00	2.371.167.700,00	(118.330.304,00)	(4,99)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Tagogapu Kecamatan Padalarang	1.996.632.704,00	2.563.758.000,00	(567.125.296,00)	(22,12)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang	2.263.875.424,00	2.694.947.200,00	(431.071.776,00)	(16,00)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah	1.661.773.680,00	1.760.049.208,00	(98.275.528,00)	(5,58)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah	1.821.962.094,00	1.826.423.300,00	(4.461.206,00)	(0,24)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah	2.152.003.080,00	3.070.249.200,00	(918.246.120,00)	(29,91)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah	2.110.824.518,00	2.940.272.100,00	(829.447.582,00)	(28,21)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilame Kecamatan Ngamprah	2.732.985.504,00	3.720.845.783,00	(987.860.279,00)	(26,55)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah	1.946.515.504,00	3.120.639.200,00	(1.174.123.696,00)	(37,62)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah	2.378.992.164,00	2.505.059.700,00	(126.067.536,00)	(5,03)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Ngamprah Kecamatan Ngamprah	1.748.444.594,00	3.056.054.100,00	(1.307.609.506,00)	(42,79)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sukatani Kecamatan Ngamprah	1.767.024.964,00	2.200.558.700,00	(433.533.736,00)	(19,70)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah	1.813.292.896,00	2.915.228.883,00	(1.101.935.987,00)	(37,80)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah	2.208.916.280,00	3.276.582.334,00	(1.067.666.054,00)	(32,58)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Ciwaruga Kecamatan Parongpong	2.121.126.796,00	2.106.452.400,00	14.674.396,00	0,70
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cihideung Kecamatan Parongpong	1.757.626.848,00	2.546.432.800,00	(788.805.952,00)	(30,98)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cigugurgirang Kecamatan Parongpong	2.034.637.700,00	2.026.055.000,00	8.582.700,00	0,42
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong	1.837.413.700,00	1.839.597.500,00	(2.183.800,00)	(0,12)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong	2.345.338.200,00	2.316.868.000,00	28.470.200,00	1,23
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cihanjuang Rahayu Kecamatan Parongpong	1.952.507.400,00	1.932.490.200,00	20.017.200,00	1,04
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong	2.177.008.634,00	2.387.467.500,00	(210.458.866,00)	(8,82)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Gudangkahuripan Kecamatan Lembang	1.958.550.556,00	2.200.851.600,00	(242.301.044,00)	(11,01)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Wangunsari Kecamatan Lembang	1.893.502.888,00	2.070.449.300,00	(176.946.412,00)	(8,55)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang	2.014.012.100,00	2.750.690.588,00	(736.678.488,00)	(26,78)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang	1.762.873.000,00	1.772.900.100,00	(10.027.100,00)	(0,57)

Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Langensari Kecamatan Lembang	2.062.671.800,00	2.047.249.100,00	15.422.700,00	0,75
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Kayuambon Kecamatan Lembang	1.650.706.188,00	2.242.459.800,00	(591.753.612,00)	(26,39)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Lembang Kecamatan Lembang	1.790.202.396,00	1.795.213.720,00	(5.011.324,00)	(0,28)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang	2.264.395.550,00	2.862.935.700,00	(598.540.150,00)	(20,91)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sukajaya Kecamatan Lembang	2.085.048.296,00	2.944.747.612,00	(859.699.316,00)	(29,19)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Jayagiri Kecamatan Lembang	2.198.570.472,00	2.175.351.740,00	23.218.732,00	1,07
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cibogo Kecamatan Lembang	2.043.702.680,00	2.036.159.900,00	7.542.780,00	0,37
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cikole Kecamatan Lembang	2.086.945.000,00	2.146.600.336,00	(59.655.336,00)	(2,78)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cikidang Kecamatan Lembang	2.142.268.000,00	1.987.338.664,00	154.929.336,00	7,80
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Wangunharja Kecamatan Lembang	2.013.464.396,00	2.107.020.200,00	(93.555.804,00)	(4,44)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cibodas Kecamatan Lembang	2.249.080.539,00	3.013.737.900,00	(764.657.361,00)	(25,37)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang	2.173.823.000,00	2.324.143.756,00	(150.320.756,00)	(6,47)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua	1.724.338.000,00	2.793.721.283,00	(1.069.383.283,00)	(38,28)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua	1.829.528.400,00	2.835.486.129,00	(1.005.957.729,00)	(35,48)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Padaasih Kecamatan Cisarua	2.180.765.322,00	3.972.377.524,00	(1.791.612.202,00)	(45,10)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua	2.005.303.654,00	3.736.659.488,00	(1.731.355.834,00)	(46,33)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua	2.036.766.088,00	2.956.116.305,00	(919.350.217,00)	(31,10)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua	1.908.646.350,00	2.195.726.429,00	(287.080.079,00)	(13,07)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cipada Kecamatan Cisarua	1.879.222.180,00	2.089.052.771,00	(209.830.591,00)	(10,04)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sadangmekar Kecamatan Cisarua	1.773.386.208,00	2.473.353.394,00	(699.967.186,00)	(28,30)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Kanangasari Kecamatan Cikalangwetan	2.018.994.796,00	2.259.666.500,00	(240.671.704,00)	(10,65)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Mandalaasari Kecamatan Cikalangwetan	2.332.200.000,00	2.600.792.100,00	(268.592.100,00)	(10,33)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalangwetan	2.608.627.896,00	2.559.823.500,00	48.804.396,00	1,91
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cipada Kecamatan Cikalangwetan	2.395.076.300,00	2.542.753.200,00	(147.676.900,00)	(5,81)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Ganjarsari Kecamatan Cikalangwetan	2.416.696.888,00	2.520.180.600,00	(103.483.712,00)	(4,11)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalangwetan	2.337.641.080,00	3.135.657.800,00	(798.016.720,00)	(25,45)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalangwetan	1.864.396.334,00	2.096.970.500,00	(232.574.166,00)	(11,09)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cikalang Kecamatan Cikalangwetan	2.120.672.388,00	2.561.656.400,00	(440.984.012,00)	(17,21)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Rende Kecamatan Cikalangwetan	2.230.566.042,00	2.446.897.500,00	(216.331.458,00)	(8,84)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Puteran Kecamatan Cikalangwetan	2.092.058.072,00	2.243.386.500,00	(151.328.428,00)	(6,75)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Tenjolaut Kecamatan Cikalangwetan	2.298.654.700,00	3.631.552.900,00	(1.332.898.200,00)	(36,70)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisomang Barat Kecamatan Cikalangwetan	2.604.806.500,00	2.562.372.400,00	42.434.100,00	1,66
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Wangunjaya Kecamatan Cikalangwetan	2.083.475.196,00	2.068.346.500,00	15.128.696,00	0,73
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Margaluyu Kecamatan Cipeundeuy	2.427.849.300,00	2.351.278.000,00	76.571.300,00	3,26
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Nanggeleng Kecamatan Cipeundeuy	2.495.897.600,00	2.470.222.900,00	25.674.700,00	1,04

Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sirnaraja Kecamatan Cipeundeuy	2.314.164.124,00	2.453.046.100,00	(138.881.976,00)	(5,66)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Jatimekar Kecamatan Cipeundeuy	2.093.761.080,00	2.316.099.700,00	(222.338.620,00)	(9,60)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Bojongmekar Kecamatan Cipeundeuy	2.268.247.840,00	2.331.417.661,00	(63.169.821,00)	(2,71)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Nyenang Kecamatan Cipeundeuy	1.928.940.000,00	2.128.915.400,00	(199.975.400,00)	(9,39)
Bantuan Keuangan Kepada Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy	1.605.605.900,00	1.602.415.200,00	3.190.700,00	0,20
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Margalaksana Kecamatan Cipeundeuy	2.485.961.396,00	2.538.384.300,00	(52.422.904,00)	(2,07)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy	2.165.125.864,00	2.156.158.100,00	8.967.764,00	0,42
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy	2.176.720.900,00	2.658.147.400,00	(481.426.500,00)	(18,11)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Sirmagalah Kecamatan Cipeundeuy	2.037.615.100,00	2.101.770.100,00	(64.155.000,00)	(3,05)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa Ciroyom Kecamatan Cipeundeuy	2.138.455.196,00	2.309.587.200,00	(171.132.004,00)	(7,41)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	11.471.167.269,00	28.762.386.095,00	(17.291.218.826,00)	(60,12)
Beban Bantuan Kepada Partai Politik Partai Nasional Demokrat	91.839.000,00	67.388.000,00	24.451.000,00	36,28
Beban Bantuan Kepada Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa	119.218.500,00	102.820.500,00	16.398.000,00	15,95
Beban Bantuan Kepada Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera	191.695.500,00	145.229.500,00	46.466.000,00	31,99
Beban Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	213.649.500,00	271.178.500,00	(57.529.000,00)	(21,21)
Beban Bantuan Kepada Partai Politik Partai Golongan Karya	148.048.500,00	152.740.500,00	(4.692.000,00)	(3,07)
Beban Bantuan Kepada Partai Politik Partai Gerindra	190.266.000,00	142.934.000,00	47.332.000,00	33,11
Beban Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrat	115.188.000,00	98.247.000,00	16.941.000,00	17,24
Beban Bantuan Kepada Partai Politik Partai Amanat Nasional	106.620.000,00	88.577.000,00	18.043.000,00	20,37
Beban Bantuan Kepada Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan	83.883.000,00	87.606.000,00	(3.723.000,00)	(4,25)
Beban Bantuan Kepada Partai Politik Partai Hati Nurani Rakyat	-	61.226.000,00	(61.226.000,00)	(100,00)
Beban Bantuan Kepada Partai Politik Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	16.837.000,00	(16.837.000,00)	(100,00)
Beban Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Perindo	45.925.500,00	15.308.500,00	30.617.000,00	200,00

#### 5.4.2.12 Beban Tidak Terduga – LO

Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
73.232.148.462,00	-	73.232.148.462,00	100,00

Saldo tersebut adalah Beban Tidak Terduga – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

Beban Tidak Terduga 73.232.148.462,00 - 73.232.148.462,00 100,00

#### 5.4.2.13 Beban Lain Lain – LO

Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
47.677.826.282,00	102.955.284.098,00	(55.016.713.424,00)	(53,44)

Saldo tersebut adalah Beban Tidak Terduga – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama melakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :

Beban makanan dan minuman harian pegawai	65.062.000,00	318.550.500,00	(253.488.500,00)	(79,58)
Beban makanan dan minuman rapat	8.144.968.600,00	14.934.257.770,00	(6.789.289.170,00)	(45,46)
Beban makanan dan minuman tamu	2.750.950.230,00	2.962.248.150,00	(211.297.920,00)	(7,13)
Beban makanan dan minuman Lembur	550.355.250,00	821.781.000,00	(271.425.750,00)	(33,03)
Beban makanan dan minuman Pendidikan dan Pelatihan	75.825.000,00	564.135.600,00	(488.310.600,00)	(86,56)
Beban makanan dan minuman Kursus, Sosialisasi dan	1.274.880.000,00	1.425.545.000,00	(150.665.000,00)	(10,57)

Bintek				
Beban makanan dan minuman Kegiatan	7.967.125.943,00	9.706.329.200,00	(1.739.203.257,00)	(17,92)
Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.218.293.989,00	8.563.965.100,00	(6.345.671.111,00)	(74,10)
Beban Sosialisasi	7.503.557.600,00	11.428.649.000,00	(3.925.091.400,00)	(34,34)
Beban Bimbingan Teknis	3.781.571.499,00	7.266.785.200,00	(3.485.213.701,00)	(47,96)
Beban Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/masyarakat pada SKPD	615.271.000,00	1.086.511.935,00	(471.240.935,00)	(43,37)
Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.650.684.000,00	3.607.152.488,00	(956.468.488,00)	(26,52)
Beban Sosialisasi	4.621.278.172,00	9.063.485.450,00	(4.442.207.278,00)	(49,01)
Beban Bimbingan Teknis	5.214.002.999,00	7.196.915.000,00	(1.982.912.001,00)	(27,55)
Uang Untuk diberikan pada Pihak Ketiga	-	218.200.000,00	(218.200.000,00)	(100,00)
Uang Untuk diberikan pada Masyarakat	244.000.000,00	12.021.934.016,00	(11.777.934.016,00)	(97,97)
Beban Lain-lain	-	72.500,00	(72.500,00)	(100,00)
Beban Luar Biasa Lainnya	-	1.477.161.510,00	(1.477.161.510,00)	(100,00)
Beban Lainnya - Mutasi Aset Tetap Ke Aset Lainnya	-	10.271.604.679,00	(10.271.604.679,00)	(100,00)

#### 5.4.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	(122.024.321,30)	-
Saldo tersebut adalah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-
Defisit Penjualan Aset Nonlancar	(122.024.321,30)	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>(122.024.321,30)</b>	<b>-</b>

#### 5.4.4. Surplus/Defisit - LO

	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
	<b>215.755.292.565,66</b>	<b>13.812.404.812,14</b>
Saldo tersebut adalah Surplus/Defisit - LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama malakukan kegiatan operasional di tahun 2020 dan 2019 yang terdiri dari :		
Pendapatan	2.870.996.172.429,52	2.971.879.682.404,24
Beban	2.655.118.855.542,56	2.958.067.277.592,10
<b>Surplus/Defisit Dari Operasi</b>	<b>215.877.316.886,96</b>	<b>13.812.404.812,14</b>
Defisit Penjualan Aset Nonlancar	(122.024.321,30)	-
<b>Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(122.024.321,30)</b>	<b>-</b>
Pos Luar Biasa	-	-
<b>Surplus/Defisit Setelah Pos Luar Biasa</b>	<b>215.755.292.565,66</b>	<b>13.812.404.812,14</b>
<b>Surplus/Defisit-Lo</b>	<b>215.755.292.565,66</b>	<b>13.812.404.812,14</b>

#### 5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020:

**Tabel 5.23 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020**

NO	URAIAN	2020	2019
1	2	3	4

<b>1</b>	<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>3.370.716.450.835,67</b>	<b>3.310.188.519.821,68</b>
<b>2</b>	<b>Surplus/Defisit - LO</b>	<b>215.755.292.565,66</b>	<b>13.812.404.812,14</b>
<b>3</b>	<b>Koreksi Ekuitas</b>	<b>2.149.345.617,49</b>	<b>45.994.425.745,84</b>
4	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Kas	(2.000,00)	4.300.000,00
5	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Piatung	(191.610.093,00)	42.131.573.893,00
6	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Penyisihan Piatung	3.129.137.661,95	
7	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Persediaan	-	(1.096.025.504,00)
8	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	-	(15.000.000,00)
9	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya	-	(20.000.000,00)
10	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Aset Tetap - Aset Lain-lain	1.489.125,00	729.981.852,96
11	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Akm Penyusutan - Gedung dan Bangunan	-	(912.642.744,77)
12	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Akm Penyusutan - Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	(373.789.600,02)
13	Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Akm Penyusutan - Aset Lain-lain	(239.750.519,50)	35.000.000,00
14	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Kas	(711.079,00)	(4.200.900,00)
15	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Kewajiban	(18.930.796,16)	
16	Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Aset Tetap - Tanah	-	
17	Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	-	
18	Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	-	
19	Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya	-	
20	Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Akm Penyusutan - Peralatan dan Mesin	-	
21	Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Akm Penyusutan - Gedung dan Bangunan	-	
22	Koreksi Ekuitas - Penghapusan Aset Lain-lain	(1.806.667.560,10)	
23	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Piatung	-	5.521.987.324,67
24	Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Aset - Aset Tetap BTT	-	
25	Koreksi Ekuitas - Mutasi Akm. Penyusutan AT ke Persediaan	2.824.940.241,63	
26	Koreksi Ekuitas - Lainnya	(1.648.105.039,33)	(6.758.576,00)
27	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan- aset Tetap-Aset Tetap Lainnya	555.676,00	-
28	Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan-Aset Tetap -Tanah	99.000.000,00	
<b>29</b>	<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	<b>(19.523.486.240,47)</b>	<b>721.100.456,00</b>
30	Dampak Kumulatif - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(15.172.004.293,94)	
31	Dampak Kumulatif - Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(7.891.597.235,53)	
32	Dampak Kumulatif - Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan.	(336.710.006,02)	
33	Dampak Kumulatif - Kebijakan/Ekuitas	210.545.759,34	721.100.456,00
34	Dampak Kumulatif - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(95.128.233,33)	
35	Dampak Kumulatif - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.761.407.769,01	
<b>36</b>	<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>3.569.097.602.778,35</b>	<b>3.370.716.450.835,67</b>

### 5.5.1. Ekuitas Awal

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	<b>3.370.716.450.835,67</b>	<b>3.310.188.519.821,68</b>

Saldo tersebut merupakan Ekuitas Awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas, merupakan Ekuitas Awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020, yaitu saldo ekuitas akhir Audited per 31 Desember 2019.

<b>Jumlah</b>	<b>3.370.716.450.835,67</b>	<b>3.310.188.519.821,68</b>
---------------	-----------------------------	-----------------------------

### 5.5.2. Surplus/Defisit – LO

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	<b>215.755.292.565,66</b>	<b>13.812.404.812,14</b>

Saldo tersebut merupakan Surplus/Defisit – Laporan Operasional dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 merupakan Saldo Surplus/Defisit – LO yang dihasilkan pada periode Tahun Anggaran 2020 (untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020) setelah *closing entry*

Jumlah	215.755.292.565,66	13.812.404.812,14
--------	--------------------	-------------------

### 5.5.3. Koreksi Ekuitas

Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
<b>2.149.345.617,49</b>	<b>45.994.425.745,84</b>

Saldo tersebut merupakan Koreksi Ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 merupakan saldo koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun berjalan dengan rincian :

Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Kas	(2.000,00)	4.300.000,00
Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Piutang	(191.610.093,00)	42.131.573.893,00
Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Penyisihan Piutang	3.129.137.661,95	
Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Persediaan	-	(1.096.025.504,00)
Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	-	(15.000.000,00)
Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya	-	(20.000.000,00)
Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Aset Tetap - Aset Lain-lain	1.489.125,00	729.981.852,96
Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Akm Penyusutan - Gedung dan Bangunan	-	(912.642.744,77)
Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Akm Penyusutan - Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	(373.789.600,02)
Koreksi Ekuitas - Saldo Awal Akm Penyusutan - Aset Lain-lain	(239.750.519,50)	35.000.000,00
Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Kas	(711.079,00)	(4.200.900,00)
Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Kewajiban	(18.930.796,16)	
Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Aset Tetap - Tanah	-	
Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	-	
Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	-	
Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya	-	
Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Akm Penyusutan - Peralatan dan Mesin	-	
Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Akm Penyusutan - Gedung dan Bangunan	-	
Koreksi Ekuitas - Penghapusan Aset Lain-lain	(1.806.667.560,10)	
Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan Piutang	-	5.521.987.324,67
Koreksi Ekuitas - Mutasi Antar SKPD Aset - Aset Tetap BTT	-	
Koreksi Ekuitas - Mutasi Akm. Penyusutan AT ke Persediaan	2.824.940.241,63	
Koreksi Ekuitas - Lainnya	(1.648.105.039,33)	(6.758.576,00)
Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan- aset Tetap-Aset Tetap Lainnya	555.676,00	
Koreksi Ekuitas - Koreksi Pencatatan-Aset Tetap -Tanah	99.000.000,00	
Jumlah	<b>2.149.345.617,49</b>	<b>45.994.425.745,84</b>

### 5.5.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
<b>(19.523.486.240,47)</b>	<b>721.100.456,00</b>

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Koreksi Kesalahan Mendasar dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 merupakan Saldo Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dengan rincian :

Dampak Kumulatif - Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(15.172.004.293,94)	-
Dampak Kumulatif - Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(7.891.597.235,53)	-

Dampak Kumulatif - Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan.	(336.710.006,02)	-
Dampak Kumulatif - Kebijakan/Ekuitas	210.545.759,34	721.100.456,00
Dampak Kumulatif - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(95.128.233,33)	-
Dampak Kumulatif - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.761.407.769,01	-
<b>Jumlah</b>	<b>(19.523.486.240,47)</b>	<b>721.100.456,00</b>

## 5.6. Penjelasan atas Pos-PoS Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran (transitoris). Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 sudah termasuk arus kas keluar dan masuk dari aktivitas BLUD, Dana Kapitasi JKN, dan Dana BOS Pusat sebesar ketetapan pendapatan dan belanja yang disahkan atas transaksi yang dilakukan oleh BLUD RSUD CILILIN, enam BLUD Puskesmas, Dana Kapitasi JKN pada 26 Puskesmas, dan Dana BOS Pusat yang dikelola di luar mekanisme APBD. Total nilai Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah defisit sebesar Rp(109.538.162.193,25). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, arus kas bersih mengalami kenaikan defisit sebesar Rp(71.454.445.329,32) atau sebesar 187,62% dengan perhitungan seperti dalam tabel berikut:

### 5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2020 dan 2019, yaitu sebagai berikut:

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	<b>355.743.214.255,75</b>	<b>299.849.801.550,70</b>

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>2.529.951.418.201,68</b>	<b>2.902.841.293.218,00</b>
Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	330.898.929.358,00	379.096.936.256,00
Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah	27.510.250.500,00	38.560.684.794,00
Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	494.842.021,00	470.526.236,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	105.696.492.947,68	109.958.885.985,00
Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.201.878.322.566,00	1.639.819.402.415,00
Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	307.243.438.867,00	241.510.582.000,00
Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	213.388.584.827,00	243.264.633.170,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	147.492.887.115,00	81.663.962.362,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	195.347.670.000,00	168.495.680.000,00

Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau  
Pemerintah Daerah Lainnya

<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>2.529.951.418.201,68</b>	<b>2.902.841.293.218,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	-	-
Pembayaran Pegawai	1.153.720.854.748,00	1.337.528.136.824,00
Pembayaran Barang dan Jasa	665.332.491.206,93	599.173.041.572,30
Belanja Bunga	2.855.004.000,00	
Pembayaran Hibah	110.656.193.554,00	175.289.674.878,00
Pembayaran Bantuan Sosial	2.103.828.500,00	13.285.454.435,00
Pembayaran Tak Terduga	74.183.964.539,00	1.477.161.510,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	35.507.863.220,00	34.236.302.724,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah	3.010.843.314,00	3.538.032.620,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Desa	125.506.506.114,00	437.213.594.604,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya	1.306.333.500,00	1.250.092.500,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>2.174.183.882.695,93</b>	<b>2.602.991.491.667,30</b>
<b>Jumlah</b>	<b>355.767.535.505,75</b>	<b>299.849.801.550,70</b>

### 5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Nilai arus kas dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2020 dan 2019, yaitu sebagai berikut:

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	<b>(465.239.384.575,00)</b>	<b>(338.001.326.883,63)</b>

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai

#### Arus Masuk Kas

Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	217.460.000,00	-
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	-	-
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>217.460.000,00</b>	<b>-</b>

#### Arus Keluar Kas

Perolehan Tanah	7.133.690.500,00	20.388.039.964,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	190.396.585.609,00	111.695.339.176,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	113.378.948.383,00	51.922.752.065,50
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.998.056.756,00	77.081.366.659,13
Perolehan Aset Tetap Lainnya	66.000.836.058,00	75.811.243.519,00
Perolehan Aset Lainnya	5.548.727.269,00	1.102.585.500,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>465.456.844.575,00</b>	<b>338.001.326.883,63</b>
<b>Jumlah</b>	<b>(465.239.384.575,00)</b>	<b>(338.001.326.883,63)</b>

### 5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai arus kas dari aktivitas pendanaan Pemerintah selama tahun 2020 dan 2019, yaitu sebagai berikut:

<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
-----------------------------	-----------------------------

merupakan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu arus kas masuk dari aktivitas pendanaan dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Rincian arus kas dari aktivitas pendanaan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah nihil

**Arus Masuk Kas**

Pencairan Dana Cadangan -  
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah -  
Daerah -

**Jumlah Arus Masuk Kas**

**Arus Keluar Kas**

Pembentukan Dana Cadangan -  
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah -  
Daerah -

**Jumlah Arus Keluar Kas**

**Jumlah**

**5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Nilai arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2020 dan 2019, yaitu sebagai berikut:

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	<b>(66.313.124,00)</b>	<b>67.808.469,00</b>

Jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas transitoris yaitu arus kas masuk dari aktivitas transitoris dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Rincian arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

**Arus Masuk Kas**

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8.424.846.096,00	12.766.326.490,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>8.424.846.096,00</b>	<b>12.766.326.490,00</b>

**Arus Keluar Kas**

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8.491.159.220,00	12.698.518.021,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>8.491.159.220,00</b>	<b>12.698.518.021,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>(66.313.124,00)</b>	<b>67.808.469,00</b>

**5.6.5. Kenaikan/Penurunan Kas Selama Periode Tahun 2020**

	<b>Per 31 Desember 2020</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>
	<b>(109.538.162.193,25)</b>	<b>(38.083.716.863,93)</b>

Jumlah kenaikan/(penurunan) kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas diuraikan sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	355.767.535.505,75	299.849.801.550,70
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(465.239.384.575,00)	(338.001.326.883,63)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(66.313.124,00)	67.808.469,00
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>(109.538.162.193,25)</b>	<b>(38.083.716.863,93)</b>

**5.6.6. Saldo Awal Kas di BUD Per 1 Januari 2020**

Saldo Kas Awal pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Bendahara

Umum Daerah) per 1 Januari 2020 senilai Rp233.916.746.625,25 selisih dengan neraca Tahun 2019 Rp 5.003.118,00 dikarenakan pengembalian Kas Di Bendahara Pengeluaran Bappelitbangda Rp4.300.000,00 dan Rp703.118,00 dari Pajak PFK yang sudah diterima di Kas Daerah diakui sebagai pendapatan lain-lain pad yang sah sehingga Saldo Awal di TA. 2020 menjadi sebesar Rp233.911.743.507,25 dengan perhitungan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.24 Saldo Awal Kas di BUD Per 1 Januari 2020**

NO	URAIAN	31-Des-19 (Rp)
1	2	3
1	Kas di Kas Daerah	203.930.016.256,07
2	Kas di Bendahara Penerimaan	199.029.662,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	314.895.571,00
4	Kas di BLUD	7.276.537.173,00
5	Kas JKN	8.283.129.132,00
6	Kas BOS	13.913.138.831,18
8	Saldo Akhir Kas Pemkab Bandung Barat per 31 Des 2019	233.916.746.625,25

#### **5.6.7. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020**

Saldo akhir Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2020 adalah sebesar Rp124.439.894.438,00. Perhitungan saldo akhir Kas per 31 Desember 2020 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.25 Saldo Akhir Kas di BUD Per 31 Desember 2020**

NO	URAIAN	31-Des-20 (Rp)
1	KAS BUD	104.045.411.024,00
2	DEPOSITO	-
3	KAS BENDAHARA PENERIMAAN	9.536.000,00
4	KAS BENDAHARA PENGELUARAN	29.542.300,00
5	KAS BLUD	8.666.676.762,00
6	KAS BOS	2.572.273.353,00
7	KAS JKN	9.125.094.838,00
<b>Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020</b>		<b>124.448.534.277,00</b>

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten Bandung Barat terpisah secara administratif dari Kabupaten Bandung mulai Bulan Oktober 2007 dengan mempunyai APBD sendiri (APBD mini). Kabupaten Bandung Barat memiliki luas wilayah lebih kurang 130.577,40 km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Purwakarta
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kota Bandung

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung

Secara administratif Kabupaten Bandung Barat mencakup enam belas kecamatan yang meliputi 165 desa. Enam belas kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Kecamatan Ngamprah
2. Kecamatan Cipatat
3. Kecamatan Batujajar
4. Kecamatan Padalarang
5. Kecamatan Sindangkerta
6. Kecamatan Cipongkor
7. Kecamatan Gunung Halu
8. Kecamatan Rongga
9. Kecamatan Cililin
10. Kecamatan Cikalangwetan
11. Kecamatan Cipeundeuy
12. Kecamatan Parongpong
13. Kecamatan Cisarua
14. Kecamatan Lembang
15. Kecamatan Cihampelas
16. Kecamatan Saguling.

Wilayah kecamatan tersebut terdiri dari pemerintahan desa. Nama-nama desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah:

### **Kecamatan Rongga**

- 1 Cicadas
- 2 Cibedug
- 3 Sukamanah
- 4 Bojong
- 5 Bojongsalam
- 6 Cinengah
- 7 Sukaresmi
- 8 Cibitung

**Kecamatan Gununghalu**

- 9 Cilangari
- 10 Sindangjaya
- 11 Bunijaya
- 12 Sirnajaya
- 13 Gununghalu
- 14 Celak
- 15 Wargasaluyu
- 16 Sukasari
- 17 Tamanjaya

**Kecamatan Sindangkerta**

- 18 Mekarwangi
- 19 Weninggalih
- 20 Wangunsari
- 21 Buninagara
- 22 Cikadu
- 23 Rancasenggang
- 24 Cintakarya
- 25 Cicangkanggirang
- 26 Puncaksari
- 27 Pasirpogor
- 28 Sindangkerta

**Kecamatan Cililin**

- 29 Karyamukti
- 30 Nanggerang
- 31 Mukapayung
- 32 RancaPanggung
- 33 Bongas
- 34 Batulayang
- 35 Cililin
- 36 Karangtanjung
- 37 KidangPananjung
- 38 Budiharja
- 39 Karanganyar

**Kecamatan Cihampelas**

- 40 Singajaya
- 41 Tanjungwangi
- 42 Situwangi
- 43 Pataruman
- 44 Cipatik
- 45 Citapen
- 46 Cihampelas
- 47 Mekarmukti
- 48 Tanjungjaya
- 49 Mekarjaya

**Kecamatan Cipongkor**

- 50 Cintaasih
- 51 Karangsari
- 52 Neglasari
- 53 Girimukti
- 54 Cijenuk
- 55 Cicangkanghilir
- 56 Sukamulya
- 57 Citalem
- 58 Mekarsari
- 59 Sarinagen
- 60 Cibenda
- 61 Cijambu
- 62 Sirnagalih
- 63 Baranangsiang

**Kecamatan Batujajar**

- 64 Selacau
- 65 Batujajar Barat
- 66 Batujajar Timur
- 67 Giriashih
- 68 Galanggang
- 69 Pangauban
- 70 Cangkorah

**Kecamatan Saguling**

- 71 Bojonghaleuang
- 72 Cikande
- 73 Girimukti
- 74 Cipangeran
- 75 Jati
- 76 Saguling

**Kecamatan Cipatat**

- 77 Rajamandala Kulon
- 78 Ciptaharja
- 79 Cipatat
- 80 Citatah
- 81 Gunungmasigit
- 82 Cirawamekar
- 83 Nyalindung
- 84 Sumur Bandung
- 85 Kertamukti
- 86 Sarimukti
- 87 Mandalasari
- 88 Mandalawangi

**Kecamatan Padalarang**

- 89 Laksanamekar
- 90 Cimerang
- 91 Cipeundeuy
- 92 Kertajaya
- 93 Jayamekar
- 94 Padalarang
- 95 Kertamulya
- 96 Ciburuy
- 97 Tagogapu
- 98 Campakamekar

**Kecamatan Ngamprah**

- 99 Cimareme
- 100 Gadobangkong

101 Tanimulya

102 Pakuhaji

103 Cilame

104 Margajaya

105 Mekarsari

106 Ngamprah

107 Sukatani

108 Cimanggu

109 Bojongkoneng

**Kecamatan Parongpong**

110 Ciwaruga

111 Cihideung

112 Cigugurgirang

113 Sariwangi

114 Cihanjuang

115 Cihanjuang Rahayu

116 Karyawangi

**Kecamatan Lembang**

117 Gudang Kahuripan

118 Wangunsari

119 Pagerwangi

120 Mekarwangi

121 Langensari

122 Kayuambon

123 Lembang

124 Cikahuripan

125 Sukajaya

126 Jayagiri

127 Cibogo

128 Cikole

129 Cikidang

130 Wangunharja

131 Cibodas

132 Suntenjaya

**Kecamatan Cisarua**

- 133 Pasirhalang
- 134 Jambudipa
- 135 Padaasih
- 136 Kertawangi
- 137 Tugumukti
- 138 Pasirlangu
- 139 Cipada
- 140 Sadangmekar

**Kecamatan Cikalongwetan**

- 141 Kanangasari
- 142 Mandalaasari
- 143 Mekarjaya
- 144 Cipada
- 145 Ganjarsari
- 146 Mandalamukti
- 147 Ciptagumati
- 148 Cikalang
- 149 Rende
- 150 Puteran
- 151 Tenjolaut
- 152 Cisomang Barat
- 153 Wangunjaya

**Kecamatan Cipeundeuy**

- 154 Margaluyu
- 155 Nanggeleng
- 156 Sirnaraja
- 157 Jatimekar
- 158 Bojongmekar
- 159 Nyenang
- 160 Cipeundeuy
- 161 Margalaksana

- 162 Sukahaji
- 163 Ciharashas
- 164 Sirnagalih
- 165 Ciroyom

Pada awalnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung Barat terdiri dari:

- 1. Sekretariat Daerah
- 2. Sekretariat DPRD
- 3. Inspektorat
- 4. Dinas Daerah, sebanyak 12 OPD
- 5. Badan, sebanyak 4 OPD
- 6. Kantor, sebanyak 6 OPD dan
- 7. Kecamatan, sebanyak 15 OPD, yaitu:
  - Kecamatan Ngamprah
  - Kecamatan Cipatat
  - Kecamatan Batujajar
  - Kecamatan Padalarang
  - Kecamatan Sindangkerta
  - Kecamatan Cipongkor
  - Kecamatan Gunung Halu
  - Kecamatan Rongga
  - Kecamatan Cililin
  - Kecamatan Cikalangwetan
  - Kecamatan Cipeundeuy
  - Kecamatan Parongpong
  - Kecamatan Cisarua
  - Kecamatan Lembang
  - Kecamatan Cihampelas.

Kemudian pada tahun 2009 ditetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan OPD sebagai berikut:

- 1. Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
- 2. Pembentukan Dinas Daerah berjumlah 12 (dua belas) dinas, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.

3. Pembentukan Lembaga Teknis Daerah berjumlah 9 (sembilan) buah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
4. Pembentukan Inspektorat, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
5. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
6. Pembentukan Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.

Untuk Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, susunan selengkapnya dari OPD Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan dan Permukiman
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
9. Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13. Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20. Dinas Peneneman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23. Dinas Perikanan dan Peternakan

24. Dinas Kearsipan dan Perpusatakan
25. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Lembaga Lain setingkat OPD yang pembentukannya tidak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Hasil Pemilihan Umum Tahun 2018 untuk Masa Jabatan 2019-2024, susunan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.1 Susunan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat  
Masa Jabatan Tahun 2019-2024**

**Pimpinan DPRD**

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	JABATAN
1	RISMANTO, S.Pd, M.Ikom	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	KETUA
2	Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	WAKIL KETUA
3	PIPIH SUPRIATI, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
4	H. AYI SUDRAJAT, S.IP.	PARTAI GOLONGAN KARYA	WAKIL KETUA

**Badan Musyawarah DPRD**

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	JABATAN
1	RISMANTO, S.Pd, M.Ikom	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	KETUA
2	Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	WAKIL KETUA
3	PIPIH SUPRIATI, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
4	H. AYI SUDRAJAT, S.IP.	PARTAI GOLONGAN KARYA	WAKIL KETUA
5	BAGJA SETIAWAN, S.Sy.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	SEKRETARIS
6	H. NEVI HENDRI, S.Pd.I.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
7	PARID RIDA, S.Sos.I.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
8	Ir. SUNDAYA, M.M.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
9	AMUNG MA'MUR, S.Ag.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
10	H. HANES LISE, BSC.F.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
11	DADAN SUPARDAN, S.Psi. I	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
12	WENDI SUKMAWIJAYA, S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
13	H. ADE WAWAN, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
14	ALIT MUNAWAR	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
15	IWAN SETIAWAN, S.H., M.H., C.L.A.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
16	ASEP SOFYAN, ZA, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	JABATAN
17	K. WAHYU	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
18	DONA AHMAD MUHARAM	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
19	ASEP MUSLIM SUGILAR, S.Ag.	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
20	H. DIDIN RACHMAT, S.K.M, M.M.Kes.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA
21	H. INEN SUTISNA	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
22	YANA RODIANA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA
23	HILMAN, S.Pd.I.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
24	AHMAD DAHLAN S.Sos., M.Si.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
25	IWAN RIDWAN SETIAWAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA

#### Badan Anggaran DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	RISMANTO, S.Pd.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	KETUA
2	Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	WAKIL KETUA
3	PIPIH SUPRIATI, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
4	H. AYI SUDRAJAT, S.IP.	PARTAI GOLONGAN KARYA	WAKIL KETUA
5	H. NEVI HENDRI, S.Pd.I.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
6	GUMILAR, S.IP.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
7	BAGJA SETIAWAN, S.Sy.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
8	H. RAHMAT MULYANA, S.E., M.M.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
9	DENI SETIAWAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
10	IWAN RIDWAN SETIAWAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
11	Ir. SUNDAYA, M.M.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
12	H. DEDEN KUSUMA WIJAYA, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
13	H. AGUS MAHDAR HILMI, S.E.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
14	CECEP SUDRAJAT, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
15	WENDI SUKMAWIJAYA, S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
16	Drs. AKHMAD KOSASIH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
17	IWAN SETIAWAN, S.H., M.H., C.L.A.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
18	H. CECEP LUKMAN NURHAKIM, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
19	H. KOSWARA SUZAENAL, SP.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
20	DONA AHMAD MUHARAM	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
21	ASEP BAYU ROHENDI	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
22	H. DIDIN RACHMAT, S.K.M, M.M.Kes.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA
23	H. INEN SUTISNA	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
24	H. EDI MIRWAN, S.E.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	ANGGOTA
25	YANA RODIANA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA

**Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD**

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	PITHER TJUANDYS, S.I.P.	PARTAI DEMOKRAT	KETUA
2	IMAN BUDIMAN, S.Th.I.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	WAKIL KETUA
3	PARID RIDA, S.Sos.I.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
4	YAYAT SUDYAT, S.H.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
5	AHMAD DAHLAN S.Sos., M.Si.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
6	H. HANES LISE, BSC.F.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
7	DARJAT SAEPUDIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
8	DADAN SUPARDAN, S.Psi. I	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
9	H. ADE WAWAN, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
10	ALIT MUNAWAR	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
11	K. WAHYU	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
12	ADE RONI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA

**Badan Urusan Rumah Tangga DPRD**

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	TAOFIKUROHMAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	KETUA
2	H. DEDEN KUSUMA WIJAYA, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
3	NUR DJULAEHA, S.I.P.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
4	ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
5	ASEP SOFYAN, ZA, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
6	ASEP MUSLIM SUGILAR, S.Ag.	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
7	METTI MELANI	PARTAI NASDEM	ANGGOTA

**Badan Kehormatan DPRD**

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	DADAN SUPARDAN, S.Psi. I	PARTAI GOLONGAN KARYA	KETUA
2	ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	WAKIL KETUA
3	HELY NARNI	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
4	APENDI SUPRIADI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
5	CACA HERDIANA	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
6	NOVIA LISNAWATI, S.I.P.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA

**Komisi I DPRD**

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	WENDI SUKMAWIJAYA, S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	KETUA
2	H. SUNARYA ERAWAN, S.I.P.	PARTAI GOLONGAN KARYA	WAKIL KETUA
3	H. INEN SUTISNA	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIS
4	HELY NARNI	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
5	YAYAT SUDYAT, S.H.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA

6	H. DEDEN KUSUMA WIJAYA, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
7	ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
8	H. KOSWARA SUZAENAL, SP.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
9	K. WAHYU	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
10	NOVIA LISNAWATI, S.I.P.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA

#### Komisi II DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	Ir. SUNDAYA, M.M.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	KETUA
2	ASEP BAYU ROHENDI	PARTAI AMANAT NASIONAL	WAKIL KETUA
3	AHMAD DAHLAN S.Sos., M.Si.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	SEKRETARIS
4	NUR DJULAEHA, S.I.P.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
5	PARID RIDA, S.Sos.I.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
6	TAOFIKUROHMAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
7	H. HANES LISE, BSC.F.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
8	DADAN SUPARDAN, S.Psi. I	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
9	H. ADE WAWAN, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
10	H. CECEP LUKMAN NURHAKIM, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
11	YANA RODIANA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA
12	ADE RONI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA

#### Komisi III DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	IWAN RIDWAN SETIAWAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	KETUA
2	DONA AHMAD MUHARAM	PARTAI AMANAT NASIONAL	WAKIL KETUA
3	GUMILAR, S.I.P.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	SEKRETARIS
4	H. IMAN BUDIMAN, S.Th.I.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
5	DENI SETIAWAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
6	APENDI SUPRIADI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
7	H. AGUS MAHDAR HILMI, S.E.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
8	ALIT MUNAWAR	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
9	PITHER TJUANDYS, S.I.P.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
10	CACA HERDIANA	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
11	H. DIDIN RACHMAT, S.K.M, M.M.Kes.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA
12	HILMAN, S.Pd.I.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA

#### Komisi IV DPRD

NO	NAMA	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	BAGJA SETIAWAN, S.Sy.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	KETUA

2	AMUNG MA'MUR, S.Ag.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
3	ASEP SOFYAN, ZA, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRAT	SEKRETARIS
4	H. NEVI HENDRI, S.Pd.I.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
5	H. RAHMAT MULYANA, S.E., M.M.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
6	DARJAT SAEPUDIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
7	CECEP SUDRAJAT, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
8	Drs. AKHMAD KOSASIH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
9	IWAN SETIAWAN, S.H., M.H., C.L.A.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
10	ASEP MUSLIM SUGILAR, S.Ag.	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
11	H. EDI MIRWAN, S.E.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	ANGGOTA
12	METTI MELANI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	ANGGOTA

Sedangkan susunan perangkat Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.2 Nama-nama Pejabat Kabupaten Bandung Barat**

No.	Jabatan	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Bupati	Aa Umbara Sutisna	Aa Umbara Sutisna
2	Wakil Bupati	Hengky Kurniawan	Hengky Kurniawan
3	Sekretaris Daerah	Ir. H. Asep Sodikin, MUM	Ir. H. Asep Sodikin, MUM
4	Asisten Pemerintahan	Drs. Aseng Junaedi, M.Si.	Drs. Aseng Junaedi, M.Si.
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Maman Sulaeman, SH, M.Si	Drs. Asep Ilyas, M.Si
6	Asisten Administrasi Umum	Drs. Agus Maolana, MM	Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
7	Staf Ahli Bidang Hukum , Politik dan Pemerintahan	Drs. Asep Sehabudin	Drs. Rony Rudyana
8	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Siti Aminah Anshoriah	Drs. Agus Maolana, MM
9	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Jarot Prasetyo	Maman Sulaeman, SH, M.Si
10	Kepala Dinas Pendidikan	Drs. H. Imam Santoso. MR.M.Pd	Drs. Imam Santoso Mulyo R, M.Pd
11	Kepala Dinas Kesehatan	drg. Hernawan Widjajanto, M.Kes	drg. Hernawan Widjajanto, M. Kes
12	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman	Ir. Rachmat Adang Syafa'at	Ir. Rachmat Adang Safaat
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ir.H.Anugrah,MM	Ir. Anugrah, MM
14	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	Drs. Asep Wahyu, S.IP.,MM	Drs. Asep Wahyu, S.IP.,MM
15	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Drs. Ade Komarudin, M.Si	Ludi Awaludin, SIP.M.Si
16	Kepala Kantor Lingkungan Hidup	Ir. Apung Hadiat Purwoko, M.Si	Ir.Apung Hadiat Purwoko,M,SI
17	Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Drs.H. Asep Ilyas, M.Si	H. Wahyu Diguna K, SH. M.Si.
18	Kepala Badan PPPAKB	R. Eriska Hendrayana	Drs. Asep Wahyu
19	Kepala Dinas Sosial,	Hari Partomo, SIP	Hari Partomo, SIP
20	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ade Zakir Hasim, ST	Ade Zakir Hasim, ST

No.	Jabatan	Tahun 2020	Tahun 2019
21	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dra. Sri Dustirawati, M.Si	Dra. Sri Dustirawati, M.Si
22	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Jaja, S.Sos., SE.MM	Jaja, S.Sos. MM
23	Kepala Dinas Politik Pamong Praja dan Pemadam kebakaran	Rini Sartika, S.Sos, M.Si.	Rini Sartika, S.Sos, M.Si.
24	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Duddi Prabowo, S.Sos.MM	Duddi Prabowo, S.Sos.MM
25	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Drs. Rony Rudyana	Drs. Rony Rudyana
26	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM	Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
27	Inspektur Kabupaten Bandung Barat	Drs. Yadi Azhar, M.Si	Drs. Yadi Azhar, M.Si
28	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Drs.H. Asep Ilyas, M.Si	Drs. Agus Maolana, MM
29	Camat Ngamprah	Drs. H. Aep Supriatna, M.Si	Drs. Med Ardiwilaga, M.Si
30	Camat Cipatat	Iyep Tamchur Rachmat,S.Sos	Dudung Kusmana HS,S.Sos
31	Camat Batujajar	Drs. Dedy Kusniadi, M.Si	Drs. Dedy Kusniadi, M.Si
32	Camat Padalarang	Usep Supriatna,S.Sos	Usep Supriatna,S.Sos
33	Camat Sindangkerta	Deden Suparna,S.Sos	Deden Suparna,S.Sos
34	Camat Cipongkor	Dedi Rohendi, SP, M.Si	Dedi Rohendi, SP, M.Si
35	Camat Gunung Halu	Drs. Taufik Firmansyah	Drs. Taufik Firmansyah
36	Camat Rongga	Akhmad Suherman,S.Sos, M.Si.	Akhmad Suherman,S.Sos, M.Si.
37	Camat Cililin	Drs, Endang Hadiat	Drs, Endang Hadiat
38	Camat Cikalangwetan	Weda Wardiman, S.STP.S.Si	Weda Wardiman, S.STP.S.Si
39	Camat Cipeundeuy	Heri Kemaludin,S.IP	Heri Kemaludin,S.IP
40	Camat Parongpong	Muhamad Yudi, S.Sos	Muhamad Yudi, S.Sos
41	Camat Cisarua	Edi Setiadi, ST,SP, M.Si	Edi Setiadi, ST,SP, M.Si
42	Camat Lembang	Drs. H. Slamet Nugraha	Drs. H. Slamet Nugraha
43	Camat Cihampelas	Drs. Jajang Nuryana Arifin	Drs. Jajang Nuryana Arifin
44	Camat Saguling	Asep Jarkasih, S.Pd, MM	Asep Jarkasih, S.Pd, MM
45	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wandiana, SH., MM	Wandiana, SH., MM
46	Kepala Kantor Arsip Daerah	Avira Nurfashihah, SH, MM	Dra. Euis Suryati. M.Si.
47	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Ir. Hj. Ida Nurhamida M.Si.	Ir. Hj. Ida Nurhamida M.Si.
48	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Ir. Undang Husni Tamrin	Ir. Undang Husni Tamrin
49	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Ricky Riyadi, S.Sos	Maman Sulaeman, SH, M.Si

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.3 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dan TKK di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat**

N O	PERANGKAT DAERAH	Golongan I								Golongan II								Golongan III								Golongan IV								Ju mla h	JU ML AH TK K	
		a		b		c		D		a		b		c		d		a		b		c		d		a		b		c		d				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P					
1	SEKRETARIA T DAERAH							3		5	1	3		1	1	1	6	1	8	2	6	6	5	7	4	7	2	4					119	331		
2	SEKRETARIA T DPRD									3	1	2		3	1	1	2	4	1	5	2	3	2	1		1						32	122			

N O	PERANGKAT DAERAH	Golongan I					Golongan II					Golongan III					Golongan IV					Ju mla h	JU ML AH TK K										
		a		b		c	D	a		b		c	d	a		b		c	d	a		b	c	d	e								
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P								
3	INSPEKTORAT									2		1		1		6	5	4	5	6	3	7	3	6	1	6		2	58	4			
4	SEKRETARIA T KPU																										1	0					
5	BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH															6	3	2		6	3	8	6	9	3		1	2	49	34			
6	BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH								2	1	2	2	1	5	3	1	5	1	1	1	2	8	7	3	4	1			88	117			
7	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA							2				1			1	5	6	2	9	4	2		2	3	1		1	1	40	27			
8	DINAS PENDIDIKAN			3	1	1		4	2	3	1	1	7	5	2	9	4	4	1	9	2	6	8	7	3	5	8	7	11	52			
9	DINAS KESEHATAN					1			1	4	1	0	1	4	1	4	0	4	2	0	4	6	1	4	9	1	8	1	0	1	544	85	
10	DINAS SOSIAL						3		1						1			2	2		6	3	1	2	2	3				950			
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			5		4		1	7		1	2	3	6		6		7	5	1	0	1	9	2	1	0	1	3		113	293		
12	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN					1					2	1	1		3		7	1	4		4		5	1	1	2	1			35			
13	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH										1			1		1		1	1	2			2	4	1	3	1			19	31		
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				2				4		1	0		5		1		4		4		2		7	1	2		1		44	138		
15	DINAS PERHUBUNG AN									1		1	1	3	2	5		9		1	4	2	5		8		3	2	1			58	
16	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIL									4		1	1		1				1	1	4		6	4	3	1	1			29	82		
17	DINAS LINGKUNGA N HIDUP		1	5	3	8	1	3		1				3	1	6	3	6	2	5	1	3	2	1		1			65	242			
18	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA									2		1			3			1	1	1	1	4	3	1	2	1				22	23		
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												1			1	1		2	1	3	1	2		5		1	1		19	45		
20	DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK															1			1	1	7	3	1	2	5	1	0			50	47		
21	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIK A DAN STATISTIK													2			3	1	1		6		3		1		1			19	41		
22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRA SI												1		1	1	4		1	2	6	3	6	1			1	1		28	72		
23	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA AN												1		1		1	1		1	3	3	1		1	1			15	24			
24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU															4	1	3	2	6	2	4	3	4	1	2				32	28		

N O	PERANGKAT DAERAH	Golongan I					Golongan II					Golongan III					Golongan IV					Ju mla h	JU ML AH TK K											
		a		b		c	D	a		b		c	d	a		b		c	d	a		b	c	d	e									
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P									
	SATU PINTU																																	
2 5	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN							1 2	1			1				9	3	2	2	1 0	1	1 0	1	5	1	7		1	76	75				
2 6	DINAS PERIKANAN DAN PERTERNAKAN							1	1			2	1	1		2	4	2	4	1 0	4	7	4	2	2	2	1	50	102					
2 7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	3	8	8	3	1	1 4	1	7		4	1	8	5	1 6	6	7	2	2	4	2	1	1	1		105	59						
2 8	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN								1	1	3				1	2	1	1	3	2	3	1	6	3	1		1	30	35					
2 9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										3				1		2	1	1	1	5		6		1			21	37					
3 0	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										2				3		1	1	1									8	30					
3 1	BNN																			2									3	0				
3 2	KECAMATAN LEMBANG		1					2			2	1		4	1		5	1		3	3	1		1				25	8					
3 3	KECAMATAN PARONGPONG										2	1	2	4		1	1	4	1	1	1	1		1			20	13						
3 4	KECAMATAN CISARUA							1	1					4		1	1	3	1	1	1	1	2	1				17	10					
3 5	KECAMATAN CIKALONGWETAN							1			5			1		3		2		1		2						15	16					
3 6	KECAMATAN CIPEUNDEUY							3		1		1	1	2		1		1	1	2		1		1				15	14					
3 7	KECAMATAN NGAMPRAH							2		3				3		2				3	3	1		1				18	16					
3 8	KECAMATAN CIPATAT							1						7		1	4		2	1	1	1						18	21					
3 9	KECAMATAN PADALARANG							2		1	1	4			2	1	1	2	1	1	2		1					19	15					
4 0	KECAMATAN BATUJAJAR							1			1			3		2	1	1	1	3	1	1		1				16	9					
4 1	KECAMATAN CIHAMPELAS							1	3		3			2	1	3		1	2	1		2		1				20	12					
4 2	KECAMATAN CILILIN							1	1		1		1	4			3	3		1		1						16	13					
4 3	KECAMATAN CIPONGKOR							2		1			1		1		1		1	4		1					11	10						
4 4	KECAMATAN RONGGA										3		2	1	5		2				1						14	8						
4 5	KECAMATAN SINDANGKERTA										2			1			1		3		1		1					9	11					
4 6	KECAMATAN GUNUNGHALU							3		2			1		2				5				1					14	11					
4 7	KECAMATAN SAGULING							1							3		2	3		2								11	13					
JUMLAH		1	0	1 9	0	2 3	1	2 1	0	9 8	2 3	1 4	3 9	1 4	1 6	9 6	5 2	3 6	3 9	3 6	4 9	4 9	5 3	3 2	4 2	1 1	9 0	11 60	4 2	1 8	1 0	0 0	790 3	236 9

## Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dari mulai penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban disusun dengan sistem berbasis Aplikasi yaitu dengan menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). *Leading sector* dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Perangkat lunak/sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan tersebut berdasarkan hasil asistensi dari Kementerian Dalam Negeri dengan pendamping dari Konsultan Usadi yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pedoman dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keluaran yang dihasilkan oleh sistem tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kemudian dikonversi ke dalam sistem akuntansi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

